
**KOMPILASI ARTIKEL DAN REVIEW BUKU
DI HARIAN KOMPAS, BERNAS, PIKIRAN RAKYAT,
DAN RADAR JOGJA**



PENULIS :
AGUS SUBAGYO, S.IP, M.Si

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
CIMAHI
2002**

Konflik Politik dan Kekerasan Kolektif

KONDISI sosial politik di Indonesia semenjak reformasi ditandai oleh dua gejala yang sangat mencolok dalam tingkah laku politik, yaitu konflik politik (*politic conflict*) dan kekerasan kolektif (*political violence*). Proses tarik menarik kepentingan antara berbagai kelompok dan kekuatan dalam masyarakat di samping memberikan kontribusi positif terhadap demokratisasi, juga cenderung mengarahkan elite politik berperilaku konfliktual. Adu argumentasi dan "perang" pernyataan dari berbagai tokoh politik ditengarai sebagai proses perebutan kekuasaan dengan kepentingan yang berbeda. Menengok pendapat Hans J Morgenthau (1978) bahwa "konflik politik sebenarnya adalah wujud dari perjuangan untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbesar kekuasaan (*struggle for power*), nampaknya jelas bahwa manuver politik yang ditunjukkan oleh para politisi akhir-akhir ini dalam rangka itu.

Perilaku konfliktual ini kemudian berkembang di tingkat bawah (*grass root*) yang ditunjukkan dengan adanya penerarahan massa sebagai sarana untuk unjuk kekuatan dan dukungan para patronnya. Entah mengapa, kerap kali perbedaan pendapat di tingkat elite cenderung disikapi oleh arus bawah dengan tindakan yang berlebihan, seakan-akan mereka belum paham akan makna demokrasi, yang toleran terhadap perbedaan sepanjang dalam kerangka sistem (*frame of system*) yang ada. Apakah ini murni merupakan reaksi hati nurani rakyat yang menginginkan demokrasi, atau merupakan mobilisasi massa di tingkat elite. Ini memerlukan kajian lebih lanjut.

Tapi yang jelas, adegan-adegan konfliktual di kalangan elite politik telah menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Aksi saling dukung mendukung terhadap panutannya masing-masing telah menimbulkan pengkotak-kotakan dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan cenderung menimbulkan kekerasan kolektif sebagai akibat dari pola dan karakteristik di atas. Pembantaian dan pembakaran manusia hidup-hidup di tengah keramaian kota, tawuran dan saling tikam antara anak-anak sekolah tanpa perkara yang jelas, ledakan bom yang meluluhlantakan tubuh manusia yang tidak berdosa, dan perang antara kampung yang mengingatkan kita pada suku-suku primitif adalah "*start point*" dari fenomena kekerasan kolektif dan merupakan representasi dan cerminan perilaku politik yang konfliktual. Dari sini muncul pertanyaan besar tentang "keruntuhan" ketentraman dan tertib sosial yang selama ini diagung-agungkan oleh masyarakat Indonesia.

Konflik : Hasil Kalkulasi Politik

Charles Tilly, ilmuwan politik yang mempelajari berbagai revolusi dalam sejarah Eropa menunjukkan bahwa "perilaku konflik dan tindakan kekerasan merupakan hasil dari kalkulasi politik para pemimpin yang memobilisasikan sumber daya kelompoknya untuk menanggapi peluang politik yang berubah". Dari sini dapat dikatakan bahwa konflik dan kekerasan merupakan hasil dari kalkulasi strategis dan keputusan taktis. Jika hipotesa ini diterapkan dalam kondisi merebaknya konflik politik di Indonesia

Agus Subagyo*

sekarang ini, akan terlihat bahwa terjadi kalkulasi politik di antara mereka yang terlibat konflik. Kongkretnya, sekarang ini ada dua kelompok besar yang saling tarik menarik, yaitu kelompok pendukung Gus Dur yang diwakili oleh PKB dan NU dengan kelompok anti Gus Dur.

Kedua kelompok ini saling melakukan mobilisasi sumber daya yang dimilikinya (terutama "massa") guna menanggapi dan mengantisipasi perubahan politik yang terjadi. Ini jelas sekali terlihat dari kelompok pendukung Gus Dur yang kerap kali melakukan ancaman kepada semua pihak yang berani "mendongkel" kekuasaan Gus Dur. Rencana massa NU dan Banser yang akan "*menggerudug*" ke Jakarta guna *memback-up* kekuasaan Gus Dur dan sebagai reaksi atas isu demonstrasi massa besar-besaran pada tanggal 15 Januari 2001 lalu, mencerminkan politisasi massa untuk kepentingan penguasa.

Jika dilihat dari aspek kalkulasi politik, tindakan penerarahan massa sebagai wujud dukungan politik merupakan pilihan alternatif yang kerap kali efektif untuk mencapai tujuan tertentu, setidaknya itu terjadi di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang sarat akan nuansa politik aliran, politisasi massa untuk mendukung sang patron seringkali dilakukan guna menekan lawan demi keuntungan politik. Memang dalam demokrasi, bentuk partisipasi politik semacam itu dapat dianggap sah-sah saja, namun begitu efek samping yang ditimbulkan dari kegiatan ini yang perlu diwaspadai. Karena cara-cara seperti itu sangat rawan dan riskan mengundang kekerasan kolektif dan pertumpahan darah. Serangkaian benturan massa yang mewarnai Sidang Istimewa MPR 1999 yang lalu merupakan bukti meledaknya kekerasan kolektif.

Konfigurasi Pemilahan Sosial

Karakter konfigurasi pemilahan sosial dalam masyarakat yang majemuk yang bisa dipilah berdasar parameter agama, suku, ras atau kelas sosial, menentukan tinggi rendahnya kesadaran konflik di kalangan anggota masyarakat tersebut, yang selanjutnya akan menentukan besar kecilnya kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan kolektif. Jika konfigurasi pemilahan itu bersifat *intersected*, maka kesadaran konflik di kalangan anggota masyarakat itu akan cenderung rendah, dan akibatnya perilaku kekerasan kolektif tidak akan mudah terjadi.

Sebaliknya, jika dalam masyarakat berkembang kondisi struktural yang menghasilkan konfigurasi pemilahan *consolidated*, maka kesadaran konflik di kalangan anggota masyarakat cenderung tinggi. Dalam kesadaran ini, peristiwa kecil bisa memicu terjadinya tindak kekerasan kolektif, apalagi kalau diikuti dengan mobilisasi konflik di kalangan anggota masyarakat tersebut. Berlarut-larutnya konflik sosial di Ambon, Aceh dan Papua merupakan konsekuensi logis dari pola dan karakter konfigurasi pemilahan sosial yang sangat dipengaruhi oleh proses akumulasi kapital dan pem-

biinan kekuasaan negara yang menyertainya, karakteristik pengorganisasian kelompok terbelakang, dan tingkat militansi beragama.

Perubahan konfigurasi pemilahan sosial yang ada pada gilirannya akan mendorong peningkatan kesadaran konflik dan perluasan frustrasi di kalangan masyarakat. Namun, kondisi itu sendiri tidak akan menimbulkan kekerasan kolektif yang membakar kalau tidak ada api yang memercikinya. Mobilisasi konflik senantiasa dimanfaatkan elite politik untuk menggalang dukungan. Fenomena inilah yang selalu mewarnai dinamika perpolitikan Indonesia. Selain konflik elit politik, perubahan konfigurasi pemilahan sosial ikut andil dalam menghasilkan kekerasan kolektif yang akhir-akhir ini terjadi. Konfigurasi pemilahan sosial adalah "rumput kering" yang sedang menunggu jilatan api berupa mobilisasi konflik antar elite.

Belajar pada Philipina

Konflik elite politik yang dapat menimbulkan kolektif di tingkat massa merupakan cerminan ketidakdewasaan budaya politik di negeri kita ini. Seharusnya, elite politik menyadari sepenuhnya bahwa mereka mempunyai "ekor" yang dapat bergerak ke sana kemari demi membela dirinya yang dianggap sebagai "kepala". Alangkah lebih baiknya jika para "kobo" politik kita bermain di tengah lapangan. Jika penonton sudah masuk ke arena pertandingan, akan terjadi keributan, kekacauan dan anarkhisme, dimana aturan main dilanggar begitu saja.

Seyogyanya, kita harus menengok sejenak ke negara sebelah, Philipina yang saat ini juga sedang mengalami krisis politik. Di Philipina, meskipun terjadi demonstrasi besar-besaran antara dua kubu yang bertikai antara pro dan anti Estrada (Presiden Philipina), namun kegiatan "kolosal" ini berjalan dengan tertib dan lancar. Kendatipun jarak antara kedua kelompok yang sedang melakukan unjuk rasa dan pembelaan sangat dekat, hanya dibatasi oleh tali pembatas, mereka tidak saling bertrok dan bahkan menghormati, sebagai sikap partisipasi politik. Bayangkan jika itu terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, tingkat kematangan dan kedewasaan elite politik adalah suatu keharusan. Mereka harus menjadi panutan yang baik bagi pengikut-pengikutnya dan jangan sekali-kali memobilisasi massa demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Selain itu, perlu ditumbuhkan kesadaran di tingkat massa bahwa konflik di tingkat elite politik bukan berarti konflik dan kekerasan di tingkat massa. Semua pihak harus menyadari jika terjadi benturan massa, yang akan mengalami kerugian paling besar adalah massa itu sendiri. Sementara pimpinan yang mereka dukung dan bela mati-matian, enak-enak saja di kursi kekuasaannya.

* Penulis adalah Staff Peneliti pada Lembaga Kajian Strategi Komunikasi Indonesia (LksKI) Yogyakarta dan Mahasiswa S-2 Ilmu Politik UGM.

Disintegrasi dan Image Communities

Agus Subagyo*

JOHN Naisbit dalam *Global Paradox* (1994) pernah membayangkan bahwa di dunia ini akan muncul 1000 negara kecil yang mendasarkan diri pada basis etnis. Menurutinya, konsep negara bangsa (*nation state*) telah mengalami penurunan secara struktural maupun fungsional yang kemudian memberikan ruang gerak bagi kelompok-kelompok etnis tertentu untuk melepaskan diri dari ikatan nasionalisme menuju primordialisme sebagai pijakan untuk muncul sebagai entitas baru lepas dari ikatan lama. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah tesis Naisbit ini terbukti? Fenomena negara-negara besar terpecah menjadi negara-negara etnis nampaknya telah terindikasi terjadi di Yugoslavia yang terbagi menjadi unit-unit politik etnis, Serbia, Kroasia, Muslim Bosnia, dan Macedonia. Dari proyek ini, lalu bagaimana dengan Indonesia? Masih merupakan teki-teki yang harus mendapat perhatian.

Pola Konflik dan Disintegrasi

Sebagai sebuah negara yang sedang mengalami proses transisi menuju demokrasi, bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada permasalahan kompleks multidimensional warisan orde baru. Banyak sekali "PR" yang harus diselesaikan oleh seluruh komponen masyarakat berkaitan dengan krisis ekonomi, politik, dan bahkan krisis kepercayaan. Padahal, bersamaan dengan itu muncul persoalan menguatnya identitas-identitas sosial masyarakat. Belakangan ini penguatan ini menjadi pada konflik sosial, baik konflik yang bersifat horizontal dan vertikal maupun konflik antara pusat dan daerah yang mengarah pada gejala disintegrasi.

Konflik horizontal yang mencakup konflik antar etnik, antar agama, antar wilayah, antar penduduk asli dengan pendatang, antar anak sekolah dan antar warga pemukiman memberikan warna buruk bagi perjalanan sejarah kita ini. Serangkaian kekerasan dan kerusuhan yang sarat bemuansa SARA seperti konflik di Sambas, Maluku dan daerah-daerah lain merupakan pengalaman pahit bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang beradab. Celakanya, sampai saat ini permasalahan itu belum selesai secara tuntas sehingga sangat rawan untuk timbul kembali. Selain itu, konflik vertikal juga memperumit permasalahan ini. Serangkaian konflik antar pengusaha dengan buruh, warga masyarakat dengan pemerintah, dan warga setempat dengan warga asing memperparah keadaan.

Di samping kedua macam konflik di atas, kita perlu mewaspadaikan dan memberikan perhatian serius pada merebaknya upaya-upaya pemisahan diri yang dilakukan oleh beberapa wilayah seperti Aceh, Papua, dan Riau. Gejala separatisme ini menunjukkan perkembangan konsep etnisitas dan relasinya dengan kekuasaan negara. Yang terjadi kemudian adalah proses tarik menarik kepentingan antara pusat dan daerah. Merdekanya Timor-Timor dari wilayah kesatuan Republik Indonesia nampaknya dijadikan

pemicu bagi wilayah-wilayah lain untuk melakukan hal yang serupa. Dilatarbelakangi oleh pola konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat inilah yang mengantarkan bangsa Indonesia pada bayang-bayang disintegrasi bangsa.

Politik Domestik dan Globalisasi

Proses disintegrasi tampaknya telah menjadi masalah akut yang terakumulasi, menjadi suatu penyakit yang parah. Dibutuhkan usaha yang sistematis dan panjang untuk memecahkannya. Selain itu, perlu dikaji masalah-masalah mendasar berkaitan dengan gejala munculnya disintegrasi bangsa. Setidaknya, ada dua hal yang perlu dicermati di sini, rangka mencari solusi atau jalan keluar dari bayang-bayang disintegrasi bangsa, yaitu politik domestik dan perubahan global.

Politik domestik merujuk pada upaya pengelolaan hubungan lembaga pemerintah, khususnya hubungan antara pusat dan daerah. Pola hubungan sentralistik di masa orde baru setidaknya menjadi pengalaman yang paling berharga bagi kita yang seharusnya tidak terulang kembali di masa depan. Dan upaya desentralisasi merupakan alternatif yang harus benar-benar dipertimbangkan sehingga pembagian "kue" ekonomi nasional menjadi merata dan berkeadilan. Jika pemerintah orde baru telah melakukan dengan ideologi *developmentalisme* yang sangat dominatif, gerakan desentralisasi akan memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi perjuangan kepentingan orang banyak dan menumbuhkan hubungan pusat dan daerah bersifat dialogis, bukan dominatif serta represif. Pembenahan dan penataan struktur dan fungsi politik domestik diharapkan dapat memperkecil ruang, untuk tidak mengizinkan menghapus bayangan disintegrasi.

Globalisasi ekonomi dan budaya telah memberikan kontribusi bagi suatu kondisi yang memungkinkan timbulnya identitas etnik dan ancaman disintegrasi. Menurut Peter Evans (1979) globalisasi telah memunculkan *triple aliansi* (persekutuan segitiga) antar modal asing, elite, dan pengusaha lokal dimana pada episode selanjutnya akan melahirkan masyarakat berakar *personil individual* yang mengentalkan identitas lokal (*individualism-identity and locality*) sebagaimana yang dikatakan oleh Anthony Giddens (1991). Bahkan Schout (1999) menyebutkan sebagai peristiwa munculnya *tribalisme* (*The Time of Tribalism atau Primitive Day*). Berdasarkan uraian itu, dapat dikatakan peristiwa domestik suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Sebagai contoh, keinginan Papua dan Riau untuk merdeka tidak dapat dilepaskan dari "penetrasi asing" berupa perusahaan multinasional seperti Freeport dan Caltex yang mencerminkan pola relasi *triple aliansi* yang pada gilirannya memicu proses menguatnya identitas etnik dan ancaman disintegrasi.

Image Communities

Jika kita tengok ke belakang, kristalisasi semangat nasio-

nalisme di Indonesia ditandai dengan proses melebur dan mengikatnya kelompok etnis, ras, dan agama yang berbeda itu dalam satu uji politik. Ben Anderson (1991) mengatakan bahwa peleburan dalam entitas politik ini diilhami oleh "image communities" (masyarakat yang dibayangkan) yang merupakan sentimen sentral nasionalisme Indonesia. *Image communities* berujud kesamaan nasib akibat kolonialisme yang kemudian dijadikan "memori kolektif" sebagai dasar ideologi nasional.

Sekarang ini, *image communities* telah mengalami berbagai penafsiran yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat dengan tafsiran sempit dan berbagai primordialisme. Artinya, sentimen nasionalisme yang berkembang adalah sentimen etnis yang menginginkan *etnonasionalisme*. Dasar pengikat *image communities* bukan lagi kesamaan nasib akibat kolonialisme asing, melainkan kesamaan nasib akibat kolonialisme pusat (Jakarta) terhadap daerah-daerah. Kemiskinan, pengangguran ketimpangan ekonomi, sentralisasi negara, dan alienasi budaya dijadikan "teknik baru" untuk membangun "memori kolektif" berdasar ideologi *etnonasionalisme*.

Oleh karena itu, gejala disintegrasi bangsa yang diindikasikan dengan pergolakan di Aceh, Papua dan Riau seyogyanya dipahami dengan perspektif mudurnya *image communities*. Dalam konteks ini, kolonialisme barat telah berubah menjadi kolonialisme pusat terhadap daerah dengan segala dampaknya. Dengan demikian, perlu ada suatu langkah antisipasi untuk membangun *image communities* dalam arti semula. Sejalan dengan itu, paling tidak ada tiga agenda yang harus diformulasikan secara matang. *Pertama*, sebagai negara yang sedang mengalami krisis legitimasi, perlu upaya mengembalikan kepercayaan publik yang bukan hanya pada pemerintah tetapi pada berbagai *stakeholder* dan pusat-pusat kekuasaan.

Kedua, perlu dirumuskan kembali "renasionalisme" yang telah ditanamkan oleh para "founding fathers" sehingga dapat dipahami sebagai dasar pengikat tertinggi dalam berbangsa dan bernegara. Dan upaya membentuk ikatan baru "etnonasionalisme" adalah bukan pilihan terbaik dan sia-sia. *Ketiga*, dalam rangka menghapuskan bayang-bayang disintegrasi bangsa, implementasi "good governance" yang mensyaratkan pola hubungan antara negara, pengusaha dan masyarakat sipil adalah suatu keharusan. Ketiga agenda ini tentunya juga sangat tergantung pada *style of leadership* pimpinan kita. Sebagai bangsa yang besar dan beragam, dalam kondisi seperti ini dibutuhkan juga seorang pemimpin besar yang dapat menyatukan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi. Kepemimpinan besar seperti duet Soekarno-Hatta nampaknya menempati posisi yang krusial.

*Penulis adalah Staf Peneliti pada Lembaga Kajian Strategis Komunikasi Indonesia (LksKI) Yogyakarta dan Mahasiswa S-2 Ilmu Politik UGM.

Reformasi dan Demokratisasi di Alam Kekerasan

GELONTORAN reformasi sebagai antitesa terhadap krisis multidimensional di era rezim orde baru ternyata tidak dapat menghasilkan sintesa demokrasi yang toleran terhadap perbedaan. Berbagai peristiwa kontra demokrasi seperti kekerasan, kerusuhan dan anarkhisme massa sangat "akrab" terdengar di telinga kita dan menambah daftar cerita panjang nan buram potret kebiadaban (*uncivilized*) anak manusia. Tindak kekerasan dan kerusuhan yang meletus di Sampit, Kalimantan Tengah, baru-baru ini adalah satu dari sekian banyak kerusuhan yang muncul secara sporadis di seantero pelosok tanah air.

Yang terjadi kemudian hanyalah gelombang pengungsian, eksodus besar-besaran, dan rasa dendam, iri hati, dengki, sinisme yang menggelayuti hati dan jiwa mereka. Tidak ada yang menang dan diuntungkan oleh apa yang dinamakan kerusuhan massal. Yang ada hanyalah rasa sedih, tangisan ibu dan anak, rasa sakit fisik dan psikis. Merebaknya kekerasan dan kerusuhan massal akhir-akhir ini menimbulkan pertanyaan. Apakah tujuan dan atau buha reformasi? Jawaban idealnya tentu bukan itu. Tapi kenyataan memang menunjukkan hal yang demikian. Rangkaian peristiwa amuk massa dan anarkhisme seolah-olah "menyertai" bergulirnya reformasi yang konon kabarnya bertujuan menciptakan demokrasi.

Meskipun demikian, apakah ada dan lazim upaya mewujudkan tatanan politik demokratisasi selalu dihadapkan pada anarkhisme semacam itu. Tulisan ini ingin menguraikan pola, karakteristik dan sebab-sebab munculnya tindak kekerasan yang selalu mengikuti dan membayangi perjalanan "panjang" reformasi yang dibawa oleh kapal yang bernama "Indonesia" di tengah samudra luas yang penuh dengan derasnya gelombang dan angin topan. Oleh karenanya, dibutuhkan strategi jitu dan solusi-solusi alternatif agar kapal itu bisa mendarat dengan selamat. Ibarat sebuah pelayaran, jangan sampai terjadi tragedi "titanic" menimpa Indonesia, hanya karena konflik politik dan kekerasan massal di antara sesama anak bangsa.

Reformasi dan Kekerasan

Jika kita tengok ke belakang, tindak kekerasan dan kerusuhan massal timbul tidak hanya di era reformasi ini saja. Dalam intensitas yang relatif tinggi, tindak kekerasan telah ada, paling tidak sejak 1996 dimana meletup kerusuhan 27 Juli (Kuda tuli), Irian Jaya, Timor-Timor sampai dengan kerusuhan Maluku, Kupang, Ketapang, dan Poso. Jauh sebelum itu, kita juga masih ingat kerusuhan Tasikmalaya, Pekalongan dan Situbondo dengan segala dimensi permasalahannya.

Eskalasi konflik dan kekerasan mengalami peningkatan signifikan ketika arus reformasi menggelinding. Gelombang reformasi "memungkinkannya" intensitas dan diversitas kekerasan semakin merajalela bak jamur di musim penghujan. Pola konflik tidak hanya bersifat vertikal (antara negara dengan masyarakat) tetapi telah merembet pada konflik horizontal (antara sesama warga/personal/komunal). Bahkan, konflik ini telah men-*trigger* sekelompok

Agus Subagyo*

etnis tertentu untuk melepaskan diri dari wilayah Indonesia. *Wal*hasil, ancaman disintegrasi menggerogoti nasionalisme seiring dengan menguatnya etnonasionalisme.

Kenyataan di atas telah menimbulkan "dilema reformasi" di masa transisi. Di satu sisi, reformasi ingin maju terus demi tercapai dan terciptanya demokrasi. Akan tetapi proses menuju ke arah ke sana diwarnai oleh kekerasan, kerusuhan dan anarkhisme. Di lain sisi, kekerasan dapat dipadamkan secara "mudah" dengan menggunakan sarana militer, sehingga perdamaian dapat terwujud meskipun sifatnya temporal. Namun demikian, tindakan itu adalah langkah mundur dan bertentangan dengan semangat reformasi, khususnya hak-hak asasi manusia. Militer masih banyak dinilai sebagai "biang kerok otoriterisme". Dilema semacam inilah yang membuat proses reformasi di persimpangan jalan. *Dus*, diperlukan pilihan yang rasional, efektif dan efisien. Pilihan yang baik adalah pilihan yang dapat meminimalkan kekerasan dan memaksimalkan sifat kompromisistik akomodatif.

Karakteristik dan Penyebab Kekerasan

Penelitian yang dilakukan oleh P3PK UGM (1997) menunjukkan bahwa karakteristik tindak kekerasan dalam masyarakat akhir-akhir ini sebagai proses yang berlangsung pada tiga aras: *negara, struktur sosial dan personal/komunal*. Dalam masing-masing aras, tindakan kekerasan itu dilakukan oleh aktor yang berbeda dengan dimensi, medium dan ruang lingkup yang berbeda. Pada aras negara, kekerasan dilakukan oleh aparat negara dan bersifat komprehensif. Artinya, bisa meliputi segala segi hidup manusia. Kerusuhan 27 Juli 1996, Aceh dan Irian Jaya adalah contoh kekerasan pada aras ini.

Kekerasan juga bisa terjadi pada tingkat struktur sosial seperti konflik buruh pemilik perusahaan dan sengketa eksploitasi sumber alam oleh perusahaan asing: Caltex dan Freeport. Kekerasan ini lebih bersifat ekonomi, sosial dan budaya di mana "kapital" adalah sumber masalahnya. Kekerasan yang lebih banyak diperhatikan adalah kekerasan pada tingkat komunal/personal. Padahal dibanding dua jenis yang lain, cakupannya sangat terbatas dan tidak didukung oleh pengorganisasian yang canggih. Namun, kekerasan terakhir inilah yang semakin merebak dan mengkhawatirkan. Agresivitas massa di tingkat *grass root* sangat sulit dikendalikan.

Paling tidak, empat penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam masyarakat: *Pertama*, bahwa kerusuhan massal lebih bersifat SARA (suku, ras, agama, dan antar golongan). Pendapat ini diperkuat oleh analisis Ted Robert Gurr (1993) yang mengatakan bahwa kekerasan muncul karena menguatnya identitas kelompok berbasis etnis, agama dan kultural yang merasa dikecewakan, sehingga timbul kristalisasi frustrasi. Kerusuhan Maluku, Sambas dan Kupang merupakan bukti dari analisis di atas. *Kedua*, bahwa akar persoalan itu ada di bidang sosial ekonomi, yaitu kesenjangan distribusi hasil pembangunan dan struktur sosial ekonomi yang timpang

sebagaimana dikatakan Johan Galtung (1980).

Ketiga, bahwa peristiwa penuh kekerasan seperti itu lazim terjadi dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang cepat, tetapi tanpa diikuti dengan pengembangan proses dan mekanisme politik dan ekonomi yang adil. Menurut Oksenberg dan Dickson (1991), ini terjadi karena ledakan partisipasi publik yang sebelumnya tersumbat dan disumbat. Terakhir, bahwa kerusuhan ini sekadar eksem dari pertikaian politik antar elite yang menemukan saluran dalam konflik lokal. Artinya, konflik adalah hasil dari kalkulasi politik elit seperti yang diramalkan oleh Charles Tilly (1978). Kerusuhan yang terjadi di Jawa Timur oleh pendukung Gus Dur adalah contoh relevan dalam konteks itu. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan budaya politik kita yang masih parokial dan berpola pada *patron-client*. Untuk itu, reformasi harus menyapu habis budaya semacam itu.

Resolusi dan Rekonsiliasi

Agar supaya proses reformasi berjalan di alam yang damai, upaya mencari resolusi dan rekonsiliasi terhadap berbagai permasalahan kekerasan dan kerusuhan adalah suatu hal yang krusial dan mendesak. Untuk keperluan itu, Lederach (1998) memperkenalkan resolusi konflik dan kekerasan multi level dan multi jalur. Menurutnya, kekerasan multi kompleks harus ditangani melalui tiga jalur. *Pertama*, lapisan atas yang dapat diselesaikan dengan mekanisme tingkat tinggi mengingat orang-orang yang ada di dalamnya adalah elite politik yang berasumsikan berpikir rasional. Terobosan untuk mempertemukan empat tokoh nasional akhir-akhir ini merupakan contoh konkret jalur ini yang tentunya mensyaratkan adanya "negoiator" ulung.

Kedua, lapisan tengah harus diberi "sentuhan" yang bersifat dialog pemecahan masalah. Lapisan menengah yang terdiri dari kelas menengah (*middle class*) harus didorong untuk mencari solusi mengingat sumber kapital dan manajemen antara lapisan atas dan lapisan bawah. *Ketiga*, lapisan bawah didesain untuk membangun komunitas dialogis. Rekonsiliasi di tingkat bawah diarahkan pada dialog-dialog informasi yang melibatkan seluruh potensi arus bawah dan menggunakan lembaga-lembaga sosial setempat. Selanjutnya, dibentuk wadah untuk mendialogkan segala permasalahan di tingkat *grass root* dan langkah penyadaran bahwa konflik dan kekerasan tidak akan dapat menyelesaikan masalah.

Tentunya, keberhasilan jalur rekonsiliasi ini sangat bergantung pada *good will* dan *political will* segenap elemen masyarakat. Agenda reformasi harus diarahkan pada resolusi dan rekonsiliasi konflik sehingga tercapai konsensus. Kita semua tentu tidak menginginkan pencapaian demokrasi melalui cara-cara kekerasan dan kerusuhan sebagaimana terjadi di India. Bukankah demokrasi itu intinya manajemen konflik politik dan kekerasan?

*Penulis adalah anggota Senior Forum for English, Social and International Studies (FELSIS) Yogyakarta dan Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Politik UGM.

Radikalisme Etnik dan Pudarnya Hegemoni Negara

MEREBAKNYA konflik etnik dengan intensitas luar biasa besarnya, terutama pasca menggelindingnya bola reformasi telah memalingkan perhatian semua pihak untuk melihat lebih mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat kita, khususnya jika dikaitkan dengan pola relasi etnik. Timbul semacam ketidakpercayaan terhadap berbagai rentetan kerusuhan massa dan anarkisme berbau SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) terjadi di negeri yang konon kabarnya sarat akan nilai-nilai ketimuran di mana penghormatan atas manusia merupakan karakteristik khususnya. Ketidakpercayaan ini menjadi memudar ketika meletus konflik etnis di Sampit, Kalimantan Tengah akhir Februari lalu antara suku Dayak dan suku Madura karena masalah (atau pemicu) yang trivial, namun berakibat sangat besar bagi kontinuitas dan eksistensi kehidupan etnis tertentu.

Satu hal yang dapat dicatat dari maraknya konflik etnis di sebagian pelosok tanah air ini adalah proses menguatnya fenomena etnisitas yang timbul karena keberhasilan mereka mengidentifikasi diri sebagai identitas dan entitas berbeda dengan yang lainnya. Ini merupakan tantangan "*Bhinneka Tunggal Ika*"nya negara yang telah dibangun secara gigih oleh para "*founding father*" lima puluh tahun yang lalu. Ketika itu, apa yang dinamakan dengan "Indonesia" ini tidak hanya merupakan kesepakatan politik, melainkan mencakup integrasi sosial, kultural, bahasa, etnik, dan agama. Keragaman, kemajemukan, dan kebhinnekaan inilah yang kemudian menjadi modal seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bersuara lantang: "Indonesia Merdeka!"

Akan tetapi, gelombang arus balik di penghujung abad ke-21 ini sangat mencengangkan dan mengkhawatirkan. Gelontoran reformasi, selain membawa angin segar perubahan dan kebebasan telah "memberikan ruang" bagi entitas tertentu untuk menggerogoti semangat nasionalisme. Proses menguatnya radikalisme etnik secara sporadis telah memudarkan hegemoni negara. Dikatakan demikian karena radikalisme etnik seperti kekerasan, kerusuhan, dan anarkisme berdasarkan etnik begitu saja meledak tanpa dapat dikendalikan, atau setidaknya dideteksi dini oleh negara sebagai institusi "*hegemon*" kekuasaan dan kekerasan yang sah. Apakah ini pertanda kegagalan negara dan kemenangan radikalisme etnik? Ataukah masih terjadi proses saling tarik-menarik antara keduanya dengan konflik etnis sebagai dampaknya? Lalu, solusi apa yang dapat ditawarkan dalam konteks ini?

Pola konflik sosial

Proses tarik-menarik antara berbagai etnik dengan negara telah nampak secara implisit pada tahun-tahun terakhir kekuasaan orde baru, di mana terjadi ledakan kerusuhan di Tasikmalaya, Situbondo, Aceh, Timor-Timur, dan Irian Jaya. Namun begitu, kerusuhan ini dapat "dilokalisasi" secara sistematis dengan dukungan instrumen negara, khususnya militer. "Pencapaian produktivitas" kekerasan dan kerusuhan dengan skala besar terjadi seiring dengan gelombang reformasi yang gaungnya membahana di seantero pelosok negeri. Secara tak dinyana, meletup kerusuhan yang berbau SARA seperti konflik Ambon, Sambas, dan terakhir Sampit.

Yang terjadi kemudian adalah transformasi konflik vertikal menjadi konflik horizontal. Horizontalitas konflik ini tidak dapat dilepaskan dari konflik vertikal. Keduanya memiliki

Agus Subagyo*

relasi kausalitas. Jika konflik vertikal telah berubah menjadi konflik horizontal, ancaman konflik, kekerasan, dan kerusuhan di tingkat akar rumput (*grass root*) sangat mudah menjadi kenyataan. Konsekuensi logisnya adalah timbul penguatan identitas etnik yang mengarah pada radikalisme etnik. Kondisi ini akan lebih cepat menumbuhkan komunalitas Sampit yang dapat "menantang" hegemoni negara sebagai instrumen pengikat nasionalisme.

Radikalisme etnik dan komunalitas sempit pada akhirnya akan membuka peluang bagi gerakan separatistis etnik untuk memisahkan diri. Gejala disintegrasi bangsa ini juga dilhami oleh lunturannya "memori kolektif" dan hilangnya "*imagined community*" sebagaimana yang dikatakan Ben Anderson (1992). Kuatnya tarikan disintegrasi akan melemahkan hegemoni negara. Dengan demikian, sintesa kekinian berupa "tergerogotinya" hegemoni dan legitimasi negara adalah muara dari konflik vertikal, horizontal, dan disintegrasi di mana radikalisme etnik berperan sebagai lokomotifnya

Tantangan Hegemoni Negara

Max Weber (Gerth & Mills:1962) mengatakan bahwa negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa selain negara, tidak ada satupun kelompok termasuk etnis dan agama dalam masyarakat memiliki dan menggunakan cara-cara kekerasan. Konflik etnik telah menunjukkan bahwa kekerasan bukan lagi "monopoli" negara, melainkan telah menjadi instrumen etnis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Celakanya, negara terkesan kecolongan dan tidak mampu meredam gejala tersebut. Ini artinya, pola manajemen konflik politik mengalami kegagalan. Pada dataran ini, radikalisme etnik telah menjadi penyakit arus yang sulit untuk disembuhkan.

Dalam menghadapi radikalisme etnik dan gejala sosial ini, negara dihadapkan pada kondisi dilematis. Di satu sisi, dengan pendekatan represif, negara dapat dengan mudah meredam berbagai gejala sosial dan konflik etnis melalui instrumen militer sehingga tidak mudah menjalar ke tempat lain, sebagaimana telah dipraktikkan oleh rezim orde baru. Namun, selain sifatnya yang temporal dan jangka pendek, pendekatan ini sangat berlawanan dengan semangat reformasi, melanggar HAM dan berbau ototerisme yang selanjutnya dapat memancing kecaman dunia internasional.

Di sisi lain, dengan pendekatan persuasif/humanis dan tanpa kekuatan militer sesuai semangat reformasi dan demokratisasi, berbagai konflik sosial sangat sulit dikendalikan dan cenderung menjalar ke tempat-tempat lain. Dan jika ini terus berlanjut, gejala disintegrasi akan semakin terbuka disertai dengan peristiwa pembersihan etnik (*ethnic cleansing*). **Tentunya, kita semua tidak mau tragedi di Rwanda, Bosnia, dan Somalia terjadi di negeri yang mempunyai lebih dari 495 etnis ini.** Dus, diperlukan suatu upaya untuk mengatasi kondisi dilematis yang dihadapi negara sebagai pengendali konflik. Terobosan sejarah dan prakarsa perdamaian harus terus dikumandangkan sebagaimana diisyaratkan oleh para bapak pendiri bangsa untuk membangun

dan memupuk semangat nasionalisme (nasionalisme spirit) dan pembentukan/pembangunan bangsa (*nation building*)

Redefinisi "Nation Building"

Terseok-seok dan sempoyongannya perjalanannya bangsa kita ini memerlukan berbagai "*treatment*" khusus, sehingga mampu keluar dari berbagai gejala sosial selama ini. Pendefinisian ulang *nation building* oleh seluruh komponen masyarakat adalah kebutuhan mendesak. Masalah *nation building* pada prinsipnya juga merupakan masalah konsolidasi (berasal dari kata kon-solid-asi, solid yang berarti utuh, kuat, sukar dipecah-pecah oleh unsur luar). Dengan kata lain, harus diciptakan ikatan emosional, agar hanya mempunyai satu identitas nasional.

Sebagai sebuah negeri yang beragam, terdiri dari penduduk yang berjumlah lebih dari 200 juta orang, 495 bahasa dan suku bangsa, dan minimal terbagi dalam lima agama yang dianut disamping ratusan aliran kepercayaan, dibutuhkan suatu identitas nasional yang disepakati oleh semuanya. *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai sebuah mozaik memerlukan pemupukan secara terus menerus, jangan sampai konsepsi dan substansinya berubah menjadi "*Bhinneka Tunggal Ika*". *Alhasil*, proses pendefinisian ulang dan reinterpretasi *nation building* mutlak dilakukan jika ingin fenomena radikalisme etnik tidak bangkit memudarkan semangat nasionalisme.

Selanjutnya, diupayakan penguatan *state building* sebagai penopang *nation building*. *State building* pada prinsipnya merupakan masalah kemampuan suatu bangsa untuk membangun dasar-dasar pemerintahan dan politik. Atau kemampuan suatu bangsa untuk membuat lembaga politik dan pemerintahan yang berfungsi menampung kepentingan rakyat. Hal ini penting agar supaya berbagai aspirasi dan partisipasi tidak diungkapkan melalui cara-cara kekerasan dan berbau radikalisme etnik. Untuk itu, diferensiasi struktural dan sekularisasi kultural menempati posisi yang krusial demi mekanisme *input* dan *output* yang mengarah pada integrasi sosial dan nasional.

Di samping itu, pembangunan ekonomi (*economic development*) pasca krisis ekonomi yang mengutamakan pada pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) perlu dirumuskan untuk mengatasi berbagai kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran. Sudah menjadi "rahasia umum" jika ketiga hal itu sangat dekat dan rawan akan kekerasan, kolektif dan radikalisme etnik. Fakta menunjukkan bahwa berbagai konflik etnis di negeri ini sebagian besar disebabkan oleh ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi kerakyatan adalah suatu solusi alternatif terhadap heterogenitas permasalahan yang melilit bangsa kita ini.

Dengan demikian, proses *nation building* sebagai pilihan alternatif terhadap fenomena radikalisme etnik dan mudarnya hegemoni dan legitimasi negara di tengah kondisi yang dilematis harus secara *kontinyu dan sustainable* ditopang oleh penggalangan *state building* dan *economic development*. Ketiganya harus dijadikan "satu paket" resolusi dan rekonsiliasi nasional. Tanpa itu, proses pemulihan masalah bangsa akan mengalami kesulitan serius.

*Penulis adalah anggota Senior Forum for English, Social and Internasional Studies (FELISIS) Yogyakarta dan Mahasiswa Pasca Sarjana Program Ilmu Politik UGM.

Demokrasi Substansial vs Demokrasi Prosedural

(Relevansinya untuk Indonesia)

Agus Subagyo*

SALAH satu topik yang memperoleh tempat utama dalam agenda kajian ilmu politik dalam satu dasa warsa terakhir adalah demokratisasi atau lebih tepatnya adalah proses transisi dari otoriterisme menuju demokrasi yang terjadi paling tidak sejak pertengahan dasa warsa 1970-an. Semenjak itu, apa yang dinamakan dengan "demokrasi" menjadi "tujuan" dan mungkin juga "alat" bagi setiap negara termasuk Indonesia, demi tercapainya penyelenggaraan *clean and good governance*. Meskipun upaya pelaksanaan sistem demokrasi tidak sedikit memakan biaya sosial (*high social cost*), namun sistem ini terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, merupakan pilihan terbaik di antara yang terjelek, dibandingkan dengan monarki, oligarki dan komunisme.

Rangkaian gelombang demokratisasi yang menyapu secara gradual wilayah-wilayah Eropa timur, Amerika Latin, Afrika dan Asia telah memalingkan perhatian semua orang untuk menelaah studi mengenai demokrasi. Di Indonesia, proses transisi menuju demokrasi ditandai dengan runtuhnya rezim militer orde baru pada tanggal 21 Mei 1998. Namun demikian, atribut demokrasi yang "diusung" kalangan yang menamakan dirinya "reformis" mengalami hambatan struktural maupun kultural. Tanpa diduga, mereka berbeda pendapat dan kepentingan di tengah jalan.

Ketika dihadapkan pada persimpangan jalan, mereka memilih "jalur" yang berbeda, padahal masing-masing jalur menuju pada satu tujuan: demokrasi. Kelompok yang satu memilih jalur "kanan" sedangkan yang lain memilih jalur "kiri". Terjadilah perdebatan sengit di persimpangan jalan itu yang kemudian mengarah pada konflik, kekerasan dan kerusuhan. Singkatnya, reformasi menuju demokrasi sedang mengalami stagnasi. Kemungkinan yang lebih kuat ini menyelenggarakan sistem politik yang demokratis, demokrasi ini hanya merupakan demokrasi pinjaman. Bilamana kemudian pemerintah merasa kurang berkenan dengan demokrasi yang diberikan, dengan mudah bisa menariknya kembali. (Budiman: 1992).

Mengkerangkai Demokrasi

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni "demos" yang berarti rakyat dan "kratos/kratein" berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian, demokrasi adalah "rakyat berkuasa" atau "government of rule by the people". Berdasarkan terminologi, demokrasi adalah mekanisme hubungan antara penguasa dengan rakyatnya. Hubungan antara dua pihak ini tentunya dilandasi oleh sebuah perjanjian atau "kontrak" yang disepakati masing-masing pihak melalui mekanisme pemilihan umum. Untuk menjaga hubungan itu tetap harmonis, seimbang dan bertanggung jawab (*responsibility*), perlu suatu ko-responsensi atau jembatan yang mengkatalisasi kehendak rakyat dengan penguasa. Korespondensi ini dapat berwujud sebuah lembaga yang berfungsi mengembangkan mekanisme "check and balance".

Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami tiga transformasi sosial yang sangat besar. *Pertama*, dari demokrasi langsung (*direct democracy*) bergeser menjadi demokrasi tidak langsung (*representative democracy*). *Kedua*, dari negara kota (*polis/city state*) menjadi negara bangsa (*nation state*). *Ketiga*, dari hak pilih laki diperluas mencakup wanita, budak dan penduduk asing. Inilah yang kemudian me-



munculkan istilah "one man one vote" atau satu orang satu suara, di mana semangat *liberty, equality, dan fraternity* menjadi jiwa dan karakter demokrasi.

Sistem politik yang demokratis didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dengan demikian, rakyat diasumsikan sedikit sama kuat, atau lebih kuat dari pada pemerintah. Bila pemerintah lebih kuat dari rakyat, biasanya yang terjadi adalah sistem otoriter. Kalau pemerintah yang lebih kuat ini menyelenggarakan sistem politik yang demokratis, demokrasi ini hanya merupakan demokrasi pinjaman. Bilamana kemudian pemerintah merasa kurang berkenan dengan demokrasi yang diberikan, dengan mudah bisa menariknya kembali. (Budiman: 1992).

Contoh tepat dari pernyataan di atas adalah pemerintahan orde baru yang berkuasa dengan mengatasnamakan kedaulatan rakyat tapi kenyataannya tidak lebih dari kedaulatan penguasa. Oleh karena itu, momentum reformasi ini harus dijadikan "persiapan" agar kejadian itu tidak berulang lagi. Bagaimana agar tidak berulang? Jawaban sementara yang dapat diutarakan adalah rekonsiliasi nasional antara berbagai kelompok reformis, termasuk penyamaan persepsi dan interpretasi akan hakekat demokrasi.

Substansial vs Prosedural

Dalam sejarah perkembangannya, demokrasi telah mengenal dua pendekatan: *substansial dan prosedural*. Yang di maksud dengan substansial adalah bahwa demokrasi tidak akan efektif dan lestari tanpa substansi yang berwujud jiwa, kultur, dan ideologi demokratis yang mewarnai pengorganisasian internal partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan. Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. (Lipset: 1963, Moore: 1996). Demokrasi yang kuat bersumber pada "kehendak rakyat" dan bertujuan mencapai "kemashlahatan bersama".

Demokrasi substansial lebih cenderung rasional, utopian, dan ideal. Artinya, ia lebih menekankan pada variabel ideologis, kultur serta internalisasi nilai-nilai dalam masyarakat. Sikap-sikap seperti cenderung akomodatif; toleran terhadap perbedaan, konsensual dan kompromistis merupakan prasyarat utama jika ingin mengembangkan

demokrasi. Berbeda dengan substansial, pemahaman prosedural cenderung melihat demokrasi sebagai sebuah proses penciptaan prosedural dan tata cara pemerintahan serta proses pelembagaannya. Menurut pemahaman ini, demokrasi adalah bagaimana mengelola dan melembagakan seluruh infra struktur dalam masyarakat dengan menggunakan mekanisme aturan main yang mengatur sistem pemilu, pembatasan kekuasaan dan proses pengambilan keputusan (Dahl: 1979).

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa: (1) jika konsepsi substansial lebih rasional, utopis dan idealis, maka konsepsi prosedural bersifat empirik, deskriptif dan institusional; (2) jika substansial menekankan aspek kualitas (kedalaman dan substansi) tentang demokrasi, maka prosedural lebih pada aspek kuantitas (keluasan dan jumlah) yang harus dipenuhi dalam demokrasi; (3) jika substansial cenderung melihat proses institusionalisasi nilai-nilai (jiwa, kultur, ideologi) yang melekat dalam masyarakat, maka prosedural banyak menaruh perhatian pada proses institusionalisasi infra struktur yang telah terbentuk dalam masyarakat, untuk selanjutnya dibuat aturan main dan prosedural.

Relevansinya Untuk Indonesia

Berkaca pada sketsa demokrasi di atas, setidaknya kita dapat merefleksikannya dalam proses reformasi yang tengah dilalui oleh bangsa Indonesia ini. Bergulirnya "bola" reformasi yang ditendang dengan kerasnya oleh kaum reformis seakan kehilangan kendali dan meluncur ke arah yang belum dapat dipastikan. Akibatnya, terjadi ketidakpastian dan kegalauan. Merebaknya konflik politik, kekerasan kolektif dan kerusuhan massa merupakan contoh dari ketidakpastian itu. Bahkan, kondisi ini mengarah pada munculnya gejala disintegrasi bangsa.

Ada pesimisme di sebagian kalangan masyarakat bahwa reformasi tidak menghasilkan apa-apa dan bahkan diwarnai pertikaian dan kerusuhan. Orang awam tentu banyak yang berpikiran bahwa reformasi sama saja dengan orde baru, yang beda hanya orang-orangnya saja. Agar supaya pendapat demikian tidak mengkrystal dalam masyarakat, perlu "pendefinisian ulang" makna reformasi dan "format ulang" tujuan demokrasi. Ada baiknya jika kita mengambil format demokrasi substansial dan prosedural secara bersamaan.

Artinya, selain diformulasikan institusionalisasi infra struktur masyarakat dengan aturan-aturan yang memadai (prosedural), perlu ditanamkan dalam masyarakat akan jiwa, kultur, ideologi, dan nilai-nilai demokrasi sehingga akan tercipta "kesadaran" dan budaya politik yang toleran terhadap perbedaan dan akomodatif. Kenyataan menunjukkan bahwa terjadinya kekerasan, kerusuhan, dan amuk massa akhir-akhir ini lebih disebabkan oleh "ketidaksiapan" masyarakat akan perbedaan pendapat, bukan karena tidak adanya aturan hukum.

Dengan demikian, jika orde lama lebih menekankan pada demokrasi substansial dan orde baru dengan demokrasi prosedural beserta kegagalan-kegagalan yang mengikutinya, maka (orde) reformasi ini harus mengambil "jalan tengah" dengan menerapkan kedua-duanya secara simultan dan berkesinambungan. Karenanya, upaya mensosialisasikan "mixed democracy" ini harus dilandasi dengan semangat rekonsiliasi antara berbagai komponen masyarakat, terutama pada keempat tokoh nasional yang saat ini mengalami "kebuntuan" komunikasi. Akhirnya, diperlukan "negotiator" ulang untuk memecahkan permasalahan bangsa yang kompleks dan beragam ini.

* Penulis adalah Tentor Sejarah pada Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) Milenium dan Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Politik UGM.

Korupsi: Kultural atau Struktural ?

Agus Subagyo*

MASALAH korupsi telah sekian lama menjadi penyakit akut dalam masyarakat Indonesia. Perilaku korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi negara, namun telah menjangkiti seluruh segmen birokrasi baik di pusat maupun di daerah-daerah. Proses reformasi yang mengusung tema pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sejak tiga tahun yang lalu tidak mampu menghapus berbagai tindak korupsi secara tuntas. Bahkan di era reformasi sekarang ini, muncul dan maraknya gejala korupsi dengan berbagai pola dan karakteristiknya. Muncul dan berlarut-larutnya kasus *Baligate*, *Bullogate*, dan *Bruneigate* merupakan bukti awal dari program reformasi korupsi penuh ironi.

Dikatakan sangat ironis karena di saat semua orang menggambar-gambarkan pemberantasan korupsi, ada saja pejabat negara yang tidak jera dengan tindakan ini di tengah arus reformasi yang penuh dengan transparansi dan tanggung jawab (*accountable*). Padahal, pemerintah telah membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) sebagai tindak lanjut dari amanat MPR RI yang tertuang dalam TAP MPR No XI/1998. Selain itu, juga ada lembaga negara seperti BPK dan BPKP yang bertugas memeriksa dan mengawasi sirkulasi keuangan negara. Ditambah lagi dengan pembentukan lembaga swadaya masyarakat seperti *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang mengkhususkan diri untuk memantau perkembangan korupsi.

Pendataan kekayaan pejabat negara yang akhir-akhir ini dilakukan oleh pemerintah perlu ditanggapi secara positif oleh masyarakat. Keseriusan pemerintah ini patut untuk mendapat simpati dan perhatian. Kendati demikian, langkah tersebut perlu ditindaklanjuti sampai dengan pendataan kekayaan pejabat di tingkat daerah-daerah. Berbagai kalangan mensinyalir bahwa seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, akan terjadi perpindahan koruptor-koruptor baru di daerah. Oleh karena itu, semua pihak harus terlibat dan dilibatkan dalam proses penanganan masalah korupsi, mengingat praktek korupsi telah menjangkiti masyarakat Indonesia lebih dari tiga dasa warsa. Alhasil, korupsi telah menjadi penyakit sosial akut dan membudaya di seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena Perburuan Rente

Pola dan karakteristik praktek korupsi yang terjadi di Indonesia lebih mencerminkan fenomena perburuan rente (*rent-seekers*). Fenomena ini diawali oleh apa yang dinamakan oleh Kunio (1990) dengan Kapitalisme Semu (*ersatz kapitalism*) yang kemudian dikuatkan oleh *state corporatism* (Robison, 1988). Dalam mekanisme ini digambarkan bahwa terjadi proses aliansi antara pengusaha, penguasa dan investor asing. Negara tidak lebih dari sekadar "state quo state". Pola dan mekanisme *triple aliansi* inilah yang memberikan ruang dan perlindungan dari praktek korupsi.

Di masa orde baru, praktek korupsi semakin merajalela di karenakan peranan militer yang selalu bertindak sebagai *pendung* (*Komprador*) dari aliansi ini. Ditambah lagi dengan budaya *patrimonialisme* (*patron-client system*) sebagaimana dikatakan oleh Yahya Muhaimin (1990). Terjadinya kasus korupsi Edy Tansil, kasus Freeport, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan lain-lainnya menunjukkan korupsi dengan pola dan karakteristik di atas. Variabel korupsi ini banyak disebut sebagai faktor yang menyebabkan inefisien dan inefektivitas perekonomian sehingga sangat rentan terhadap krisis ekonomi.

Runtuhnya orde baru tidak secara otomatis menghilangkan perburuan rente. Perburuan rente masih sangat kental menghinggapi para penguasa dan pengusaha. Mengapa demikian? karena reformasi hanyalah perubahan pada elit puncak (*top elite*), sedangkan posisi dan jabatan menengah ke bawah masih tetap ditempati orang yang sama. Lembaga birokrasi adalah sarang korupsi yang belum tersentuh oleh reformasi. Dan kalaupun dilaksanakan profesionalisasi birokrasi, maka

akan memakan waktu yang cukup lama, karena praktek korupsi di lembaga pelayanan publik ini telah mengakar sangat kuat. Mental pemburu *rente* inilah yang harus mendapat perhatian serius dan secara *gradual* harus dihapuskan.

Mengapa Terjadi Korupsi ?

Menurut Scott (1985) terdapat dua faktor yang menyebabkan timbulnya praktek korupsi. *Pertama*, faktor kultural yang terdiri dari aspek-aspek: (1) nilai-nilai tradisional; (2) tradisi atau kebiasaan pemberian hadiah, dan (3) ikatan keluarga atau kesetiaan *parokial* lainnya. *Kedua*, faktor struktural seperti: (1) posisi dominan birokrasi pemerintah, dan (2) pengendalian struktur kelas lain dalam masyarakat.

Secara kultural, maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia sampai dengan saat ini dapat dikatakan sebagai akibat dari kultur, nilai, tradisi, atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat. Adanya tradisi pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah merupakan awal atau cikal bakal terjadinya korupsi. Selain itu, dalam masyarakat kita, kewajiban seseorang pertama-tama adalah memperhatikan saudara terdekatnya, kemudian *trah* atau sesama etniknya. Konsekuensinya, seorang saudara yang mendatangi pejabat untuk minta perlakuan khusus sulit untuk ditolak. Penolakan bisa diartikan sebagai pengingkaran terhadap kewajiban tradisional. Karenanya, seringkali pertimbangan kepentingan keluarga mengalahkan kepentingan negara. Soeharto adalah salah satu contohnya dengan keluarga cendana sebagai porosnya.

Secara struktural, posisi dan mekanisme institusional seperti birokrasi turut andil dalam mendorong timbulnya korupsi. Fakta menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang dominan merupakan sumber atau sarang munculnya korupsi. Hal ini bisa terjadi karena birokrasi memiliki sumber-sumber kekuasaan penting, terutama penguasaan informasi dan pemilikan keahlian teknis untuk mengelola pemerintahan. Birokrat bisa mengeluarkan atau menyembunyikan informasi untuk keperluan mempengaruhi opini publik demi kepentingannya sendiri.

Lebih dari itu, posisi birokrasi dalam struktur negara yang sedang membangun juga sangat sentral karena dalam proses itu ia bukan saja bertanggung jawab merencanakan pembangunan, melainkan juga dalam mencari dana investasi, menetapkan arah investasi, bahkan ia sendiri menjadi investor atau *entrepreneur* dengan mendirikan perusahaan negara. Celakanya, menguatnya posisi birokrasi tidak dibarengi dengan dominannya lembaga politik lainnya. Partai politik dan kelompok kepentingan cenderung melemah dan kadang-kadang malah ikut terlibat dalam "proses" birokrasi.

Alhasil, faktor kultural dan struktural saling berjalan berkelindan dalam mendorong terjadinya korupsi. Sulit bagi kita untuk menentukan faktor mana yang paling berpengaruh sebagai variabel penjelas terjadinya praktek korupsi. Nampaknya, praktek korupsi di Indonesia mencerminkan kedua faktor tersebut dan inilah yang sangat sulit. Mengapa sulit? Karena jika yang menyebabkan hanya faktor struktural, maka hal ini lebih mudah untuk dihapuskan dengan jalan atau kebijakan pelemahan politik. Akan tetapi, jika faktor kultural juga berpengaruh kuat maka akan sulit bagi pemerintah untuk menghapuskannya karena sangat terkait dengan nilai dan tradisi. *Dus*, perlu proses untuk menanggulangnya.

Strategi Pencegahan

Karena praktek korupsi sangat terkait dengan aspek-aspek kultural dan struktural, maka strategi pencegahan yang harus ditempuh adalah melalui strategi kultural dan struktural. Strategi kultural ini dapat berupa pemberian sanksi sosial bagi setiap individu yang melakukan korupsi. Sanksi

sosial ini nantinya dapat berwujud budaya malu (*shame culture*) dan budaya salah (*guilt culture*) sebagaimana yang terjadi di Jepang di mana seorang pejabat negara akan mengundurkan diri bila diketahui melakukan korupsi sebagai ungkapan rasa malu dan bersalah.

Seyogyanya masyarakat kita memiliki budaya semacam ini, sehingga akan tercipta masyarakat yang bersih dan bertanggung jawab, bebas dari budaya *feodalistik-patrimonialistik*. Seringkali didapati seorang pejabat yang nyata-nyata melakukan korupsi melakukan segala cara agar terbebas dari jeratan hukum dan tanpa malu-malu melakukan pembelaan diri di depan publik, padahal opini publik men-stigma bahwa dirinyalah yang bersalah. Langkah lebih baiknya jika ditumbuhkan sanksi sosial berupa pengunduran diri sebagai bukti atas korupsi yang telah diperbuat.

Strategi struktural yang efektif untuk menangani korupsi adalah proses pelemahan politik (*political institutional*) dan nilai-nilai politik yang mampu menahan atau *check* kecenderungan sikap dan perilaku *korup*. Salah satunya adalah pemberian kesempatan pada rakyat untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan pemerintah atau birokrasi sehingga birokrasi akan selalu bertanggung jawab pada rakyat.

Dalam kaitan itu, ada dua mekanisme yang dapat ditempuh untuk mencegah praktek korupsi. *Pertama*, secara internal berupa desentralisasi proses pembuatan kebijakan, "waskat", dan pengasan etika profesi. *Kedua*, secara eksternal berupa pengawasan dan pengendalian politik oleh eksekutif puncak, legislatif, kelompok kepentingan dan pers. Diharapkan dengan mekanisme dan proses pelemahan politik semacam itu dapat meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Dengan kata lain, struktur pengawasan menempati posisi yang krusial. Logikanya, semakin efektif struktur pengawasan, semakin kecil peluang terjadinya korupsi. Sebaliknya, semakin lemah struktur pengawasan, semakin besar peluang terjadinya korupsi.

Keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan korupsi dilihat dari perspektif struktural memang patut dihargai. Proses pembuatan kebijakan dan pembentukan lembaga pengawasan baik oleh pemerintah maupun masyarakat akhir-akhir ini menunjukkan adanya proses pelemahan politik. Namun harus diingat bahwa proses struktural ini harus dibarengi dengan proses kultural. Keduanya harus berjalan secara simultan. Proses struktural yang dilaksanakan pemerintah sekarang ini akan mengalami kegagalan apabila tidak melakukan reformasi kultural dalam masyarakat.

Dan akan lebih baik lagi jika ditumbuh-kembangkan proses *law enforcement*. Realitas yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa proses penegakkan hukum selalu mengalami ganjalan. Terbangkalainya kasus pengadilan Soeharto, Tommy yang belum diketemukan, pemeriksaan terhadap Ginandjar yang mengalami kontroversi dan diskriminasi hukum atas tiga pengusaha memperlihatkan gambaran bahwa kepastian hukum sulit untuk ditetapkan. Agaknya, kita perlu belajar pada Cina dalam hal menangani kasus korupsi. Di Cina, tekad pemerintah untuk memberantas korupsi dilandasi dengan semangat tidak pandang bulu dan pilih kasih. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hukuman mati bagi siapa saja yang melakukan korupsi. Coba jika kebijakan seperti ini dilakukan di Indonesia. Tentunya ini akan menjadi *preseden* yang baik bagi proses penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

* Penulis adalah staf Peneliti pada Pusat Studi Perubahan Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PS-PSP UMY) dan Mahasiswa S-2 Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Mencari Format Ideal Birokrasi Publik

Agus Subagyo

SEMANGAT untuk melakukan restrukturisasi dan reposisi birokrasi publik mulai menguat seiring dengan berhembusnya angin reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Upaya untuk mereformasi birokrasi telah menjadi kebutuhan mendesak sehingga menempati posisi yang *krusial* dalam agenda reformasi pemerintahan guna mewujudkan *good governance*. Ada semacam keinginan dari semua pihak (*general need*) untuk mendesain sosok birokrasi publik yang berpihak pada rakyat, bukan sebagai pelayan penguasa. Rakyat masih trauma dengan penampilan yang dimainkan oleh birokrasi publik Orde Baru yang kaku, seram, dan menakutkan.

Setidaknya ada tiga faktor atau kondisi yang menyebabkan munculnya keinginan umum untuk mereformasi birokrasi publik. *Pertama*, kondisi birokrasi warisan Orde Baru yang penuh dengan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan menjadi alat kepentingan politik. *Kedua*, dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai implementasi dari UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 mendorong pemerintah untuk menata kembali birokrasi publik yang berfungsi sebagai manajemen pelayan publik. *Ketiga*, arus modernisasi dan globalisasi yang kian deras menjelang AFTA 2003 dan APEC 2010.

Berdasarkan atas beberapa kondisi dan kecenderungan itu, semakin disadari oleh berbagai pihak untuk melakukan reformasi sistem birokrasi publik. Diperlukan desain birokrasi publik yang netral, efektif dan efisien. Artinya, birokrasi yang dibutuhkan adalah birokrasi yang menempatkan dirinya pada posisi proporsional sebagai pelayan publik dan bukan alat penguasa yang melayani kepentingan penguasa. Dengan demikian, harus dicari format ideal bagi birokrasi Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan Birokrasi.

Dalam literatur ilmu politik dan administrasi negara, sejarah birokrasi Indonesia diklasifikasikan dalam tiga bagian atau fase perkembangan. *Pertama*, birokrasi masa pra kolonial (kerajaan-kerajaan, mengacu pada kerajaan di Jawa). *Kedua*, birokrasi masa kolonial (mengacu pada kolonialisme dan imperialisme Belanda selama tiga setengah abad). Dan *ketiga*, birokrasi Indonesia kontemporer (setelah merdeka yang terdiri dari birokrasi Orde Lama dan Orde Baru). Menurut Kuntowijoyo (1991), birokrasi dalam masa pra kolonial ini sangat diwarnai oleh nuansa hirarki dan struktur kekuasaan kerajaan. Raja sebagai penguasa mempunyai pembantu dalam menyelenggarakan kekuasaan. Pembantu ini disebut sebagai *abdi dalem*. Orang-orang yang duduk sebagai *abdi dalem* inilah yang berperan sebagai birokrasi. Mereka menjadi perantara antara Raja dengan *kawula*-nya. Dalam sistem ini, Soemarsaid Moertono (1985) mengatakan bahwa pada prinsipnya masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan para pejabat yang disebut *abdi dalem* atau punggawa dan golongan rakyat jelata atau *kawula/wong cilik*. Kedudukan dalam *abdi dalem* ini sangat ditentukan oleh status dan nilai-nilai sosial serta pertalian darah sebagaimana dikatakan oleh Sartono Kartodirdjo (1984).

Birokrasi kolonial ditandai dengan munculnya *priyayi*

sebagai *ambtenaar* atau *pangreh praja* yang berperan sebagai penghubung antara-penguasa kolonial Belanda - sebagai pengganti Raja - dengan rakyat pribumi atau *kawula*. Mekanisme pengangkatan *priyayi* ini tidak didasarkan pada pertimbangan atau kualifikasi *geneologis* tapi lebih berdasar pada pertimbangan rasional dan fungsional. Menurut Sutherland (1983), birokrasi pada masa kolonial ini masih banyak mengadopsi struktur kekuasaan tradisional, karena dinilai oleh kolonial Belanda masih sangat menguntungkan, khususnya dalam usaha mengukuhkan otoritasnya terhadap rakyat pribumi.

Pasca kemerdekaan, birokrasi Indonesia mengalami dua fase perkembangan. *Pertama*, pada masa Orde Lama di mana birokrasi, menurut Emerson (dalam Jackson dan Pye, 1978), masih sangat berorientasi pada model birokrasi kerajaan (*pangreh praja*). Lembaga birokrasi pada masa itu disebut sebagai *pamong praja*. *Kedua*, pada masa Orde Baru, birokrasi diidentifikasi dengan hubungan *patrimonial* (*patron-client relationship*), yang bersumber pada struktur kekuasaan Jawa (Robinson, 1981). Selain itu, Jackson mengatakan bahwa bentuk birokrasi Orde Baru adalah *Bureaucratic Polity*. Lebih lanjut, Masoed menyebut sebagai *Birokratik-Otoriter*.

Profesionalisasi Birokrasi dan E-Government.

Agar supaya birokrasi Indonesia tidak mengalami perulangan sejarah di masa lampau (*recurent history*), perlu dikembangkan proses dan mekanisme birokrasi yang profesional. Artinya, harus dilakukan profesionalisasi birokrasi-birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Birokrasi profesional adalah suatu bentuk birokrasi yang bersifat mandiri, efektif, responsif, dan efisien.

Menurut Weber (dalam Giddens, 1985), terdapat empat karakteristik tipe ideal birokrasi rasional/profesional, yaitu: (1) adanya struktur hierarki, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi, (2) adanya serangkaian posisi-posisi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas, (3) adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para anggotanya, (4) adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat yang dipertanyakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.

Dengan demikian, birokrasi rasional/profesional bersumber pada perangkat aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dijunjung tinggi. Jadi dominasi *legal rasional* bersumber pada pola-pola legal atas aturan-aturan normatif dan ketepatan dalam pengangkatan wewenang atas dasar berbagai peraturan resmi. Birokrasi seperti inilah yang dapat mengantisipasi perkembangan zaman dan bebas dari intervensi atau campur tangan kekuasaan politik.

Selain itu, dalam upaya memprofesionalkan birokrasi publik, pelaksanaan manajemen pelayanan publik yang dilakukan oleh negara-negara maju, seperti AS, seyogyanya menjadi *reference* atau kerangka acuan, karena mereka telah berhasil dalam menata lembaga pemerintahannya. Apalagi, keberhasilan ini diilhami oleh

buku "*Re-Inventing Government*" karya Osborne dan Gaebler yang terkenal itu.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan birokrasi publik dapat mengambil peluang dan manfaat dari perkembangan itu. Dalam kaitan itu, birokrasi publik haru harus menciptakan sistem manajemen pelayanan publik yang berbasis pada internet, yaitu dengan menerapkan *E-Government* (*Electronic Government*). *E-Government* adalah upaya meningkatkan produktifitas, efisiensi, dan transparansi manajemen pemerintahan melalui teknologi jaringan (*web*).

Keuntungan dari birokrasi publik yang menerapkan *E-Government* ini adalah: (1) peningkatan kualitas pelayanan. Artinya, waktu pelayanan publik berlangsung selama 24 jam penuh, berkat adanya teknologi internet, (2) mengurangi *paperwork* sehingga lebih efisien dan hemat, (3) *database* dan proses terintegrasi. Artinya, proses akurasi data lebih tinggi dan mengurangi kesalahan identitas, (4) semua proses layanan berjalan transparan dan *on line*. Namun, kendala diterapkannya *E-Government* ini sumber daya manusia yang terbatas pengetahuannya tentang teknologi informasi (*IT, information technology*) dan kurangnya kesadaran akan teknologi informasi dari aparat pemerintah.

Kontrol Birokrasi

Mengingat posisi birokrasi publik yang sangat rentan akan intervensi atau campur tangan politik dari berbagai kelompok politik, maka diupayakan suatu formula yang dapat membebaskan birokrasi dari pengaruh politik sehingga tidak mudah dijadikan sebagai ajang perebutan pengaruh (*sphere of influence*) sebagaimana birokrasi publik pada masa Orde Baru yang masuk dalam Korpri dan berafiliasi dengan "Ormas" Golkar (saat itu, Golkar mengaku sebagai Ormas tapi ikut Pemilu). Oleh karena itu, strategi pengendalian birokrasi dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

Secara internal, diperlukan mekanisme desentralisasi proses pembuatan keputusan atau kebijakan, *waskat*, penegakan etika profesi dan sanksi atau disiplin organisasi. Secara eksternal, pengendalian politik dilakukan oleh eksekutif, legislatif, kelompok kepentingan dan pers. Pengawasan dari dalam dan luar ini diharapkan dapat mendukung upaya pembentukan birokrasi profesional/rasional yang secara teknis mendasarkan pada formulasi *E-Government*.

Tentunya, "proyek" reformasi birokrasi publik ini mustahil akan berhasil tanpa partisipasi dan konsistensi dari semua pihak, khususnya dari birokrasi itu sendiri. Semua pihak tentu akan bangga bila birokrasi publik telah mengalami perubahan baik *hardware* maupun *software*-nya. Di samping perubahan pada aspek struktural ini, semua pihak harus menyadari bahwa aspek kultural juga penting untuk dibenahi mengingat praktek-praktek penyelewengan dan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh para aparat pemerintahan ini telah mendarah daging karena telah berlangsung lebih dari tiga dasawarsa pemerintahan Orde Baru. Perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme ini telah membudaya dalam belantara birokrasi publik kita. Oleh karena itu, pembenahan lembaga birokrasi publik harus mempertimbangkan aspek-aspek kultural dan struktural.

Penulis adalah staf peneliti pada Pusat Studi Perubahan Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PS-PSP UMY) dan Mahasiswa S-2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pemerintahan Baru dan Politik Luar Negeri (2-habis)

Prioritas Ekonomi dan Keamanan

Melihat kondisi perekonomian yang masih berada dalam suatu krisis ekonomi berkepanjangan dan stabilitas keamanan yang selalu goyah akibat adanya kerusuhan dan gerakan-gerakan disintegrasi, mau tidak mau harus menjadi pertimbangan utama bagi pemerintahan Mega-Hamzah dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Pemerintahan baru ini dihadapkan pada dilema sehingga sangat sulit baginya untuk mengambil keputusan, yakni antara tuntutan sebagian kelompok masyarakat yang menginginkan Indonesia tidak bergantung dan memutuskan hubungan dengan IMF dan tuntutan kondisi ekonomi yang membutuhkan uluran tangan berupa dana dari IMF.

Duet Mega-Hamzah dituntut untuk bersikap tegas terhadap IMF. Untuk itu, jalan tengah moderat yang seyogyanya diambil adalah meneruskan kerjasama dengan IMF karena secara riil perekonomian nasional masih sangat membutuhkan aliran dana dari IMF. Selain itu, IMF adalah pemegang legitimasi keuangan internasional sehingga apabila Indonesia telah berhasil mendapat *stampel* dari IMF, maka bantuan dana dari berbagai kelompok donatur seperti London Club, Paris Club, dan G8 akan mengalir cepat sehingga harapannya perekonomian kita bisa pulih kembali. Kendati demikian, harus ada batas waktu atau *dead line*-nya, sehingga ketika perekonomian nasional telah pulih, sedikit demi sedikit kita harus menghilangkan ketergantungan dengan IMF. Nampaknya, kita harus banyak belajar pada negara tetangga Malaysia, untuk masalah yang satu ini.

Agus Subagyo*

Di masa mendatang, politik luar negeri Indonesia juga harus diabdikan pada kepentingan keamanan wilayah dan integritas teritorial. Semua tentu tidak menginginkan lepasnya Aceh dan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagaimana telah menimpa Timor-Timor hanya gara-gara *blunder* politik Habibie dan ketumpulan strategi diplomasi Indonesia di fora internasional. Hendaknya hal ini dijadikan pelajaran berarti bagi para pengambil keputusan politik luar negeri Indonesia. Para diplomat dituntut untuk senantiasa meyakinkan masyarakat internasional bahwa gejala disintegrasi yang merebak di Indonesia adalah masalah domestik bangsa yang dapat ditangani secara internal.

Kerjasama dengan negara-negara timur tengah hendaknya menjadi prioritas hubungan luar negeri Indonesia. Antara Timor Tengah dan Indonesia memiliki kesamaan, yaitu persamaan dalam hal agama Islam. Keuntungan yang dapat diperoleh dari kerjasama ini adalah bantuan dana untuk mengatasi krisis ekonomi. Seperti diketahui, negara-negara Timur Tengah adalah negara yang kaya seperti Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Karena Indonesia sebelumnya kurang memiliki hubungan yang erat dengan kawasan ini, maka ketika Indonesia kesulitan dana di saat krisis ekonomi, negara-negara Timur Tengah ini enggan untuk membantu. Inilah salah satu jawaban mengapa negara-negara

petro dollar ini seolah-olah berpangku tangan dan menutup mata terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Dari aspek *leadership of regional*, politik luar negeri Indonesia harus dikembalikan pada posisi Indonesia sebagai pemimpin regional Asia Tenggara. Konsep "*the big brothers*" yang sangat terkenal di masa Soeharto perlu mendapat perhatian serius karena saat ini konsep tersebut sudah mulai hilang di kawasan ini. Konsekuensinya, negara-negara tetangga kita, seperti Singapura mulai kurang segan dan respek dengan Indonesia. Bahkan, menteri senior Singapura, Lee Kuan Yew, sempat bersitegang dengan Habibie dan Gus Dur. Padahal, kejadian ini tidak pernah terjadi di masa pemerintahan Soeharto. Dalam tradisi ASEAN, seorang kepala negara dan pemerintahan yang baru terpilih akan melakukan kunjungan atau "*sowan*" ke Indonesia, namun semua tradisi itu mulai meluntur.

Oleh karena itu, koalisi nasionalis-Islam pimpinan Mega-Hamzah ini diharapkan dapat meng-*handel* semua permasalahan yang berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia. Semua pihak tentu sudah bosan dengan tur keliling dunia Presiden Gus Dur yang secara signifikansi tidak menghasilkan apa-apa, kecuali hanya menimbulkan kontroversi politik dan pemborosan anggaran negara. *Al hasil*, Mega-Hamzah harus banyak belajar pada sejarah masa lalu dan menjadikannya sebagai pelajaran dalam merumuskan dan mengimplementasikan politik luar negeri Indonesia sehingga tidak digugat oleh anak cucu bangsa.

**Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana (S-2)
Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Politik
Internasional UGM.**

Pemerintahan Baru dan Politik Luar Negeri (1)

WILIAM D. COPLIN (1973), seorang ilmuwan hubungan internasional menyatakan bahwa politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh politik domestik, kondisi ekonomi dan militer, dan konteks internasional yang berkembang saat itu. Tidak peduli apakah negara itu besar, menengah, atau kecil, semua langkah dan kebijakan luar negerinya selalu dipengaruhi oleh (minimal) salah satu dari ketiga faktor tersebut, tidak terkecuali politik luar negeri Indonesia.

Setiap orang mengetahui bahwa politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Lama dibawah pimpinan Soekarno lebih condong ke blok Timur yang *notabene* adalah berideologikan Sosialis-Komunis Soviet. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya poros Jakarta-Pnompenh-Peking-Pyongyang. Persekutuan ini tidak hanya berhakikat anti barat, tetapi juga telah menyeret Indonesia untuk berangkul dengan Cina yang tengah bersitegang dengan Uni Soviet dan juga AS. Penampilan politik luar negeri yang "*high profile*" ini tentunya sangat dipengaruhi oleh politik domestik Indonesia di mana pengaruh komunisme sangat kental mewarnai dinamika politik saat itu.

Apa yang dilakukan di masa orde lama itu dianggap sebagai penyelewengan prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Oleh karena itu, ketika orde baru lahir, timbul semangat dan tekad untuk melakukan koreksi atas kebijakan-kebijakan luar negeri Orde Lama. Namun, dalam implementasinya kebijakan Orde Baru malah condong ke blok Barat dan mendekati negara-negara Barat seperti AS dan Eropa Barat meskipun tidak pula membenci negara-negara sosialis. Perubahan orientasi kebijakan luar negeri ini dapat dipahami mengingat ketika itu Indonesia tengah dilanda krisis ekonomi yang parah sebagai warisan dari Orde Lama. Mulailah kemudian digalakkan program diplomasi bantuan (*aid diplomacy*) dengan harapan dapat memperoleh bantuan dana untuk menopang pembangunan ekonomi. Singkatnya, kebijakan luar negeri Indonesia di masa orde baru lebih "*low profile*" dan diabdikan untuk kepentingan pembangunan ekonomi.

Lalu, bagaimana dengan politik luar negeri di era reformasi ini? Sulit untuk menjawab pertanyaan ini

Agus Subagyo*

secara jelas dan komprehensif mengingat masa pemerintahannya yang sangat pendek sehingga sukar untuk menilai kinerjanya. Kendati demikian, kita dapat melihat bahwa pada masa pemerintahan transisional, Habibie membuat dunia terperanjat dengan menawarkan referendum di Timor-Timor. Kegagalan dalam mempertahankan Timor-Timor inilah yang telah menjadi *trade mark* politik luar negeri ala Habibie. Sedangkan politik luar negeri yang ditampilkan oleh Abdurrahman Wahid banyak dipandang sebagai "*no profile*". Artinya, meskipun Abdurrahman Wahid melakukan tur keliling dunia, tapi apa hasil yang dapat dipetik dan ditagih dari hasil kunjungan itu?.

Terpilihnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dalam sidang istimewa MPR beberapa waktu yang lalu menimbulkan berbagai spekulasi tentang kemana arah dan orientasi politik luar negerinya. Apakah akan mengikuti dan melanjutkan kebijakan luar negeri sebagaimana yang telah ditampilkan oleh pendahulunya, Abdurrahman Wahid atau ada strategi baru yang dapat menajamkan kembali ketumpulan diplomasi Indonesia di dalam kanevas politik antar bangsa.

Masalah strategi diplomasi merupakan "pekerjaan rumah" yang sangat berat yang harus mendapat penanganan serius dari pemerintahan baru. Duet kepemimpinan Mega-Hamzah dituntut untuk memformulasikan strategi politik luar negeri Indonesia yang selama era reformasi ini tidak mempunyai konsep dan arah yang jelas. Untuk itu, perlu dilakukan program restrukturisasi dan reorientasi politik luar negeri Indonesia dan strategi diplomasi dengan tujuan dapat mencapai kepentingan nasional Indonesia, yaitu meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional dan dapat menyokong pada pembangunan ekonomi yang diterpa krisis ekonomi berkepanjangan.

Restrukturisasi Deplu

Langkah pertama dan utama yang seharusnya dilakukan

oleh pemerintahan Mega-Hamzah berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia adalah restrukturisasi Departemen Luar Negeri. Sebagai ujung tombak dalam melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain, Departemen Luar Negeri harus ditempati oleh orang-orang yang profesional dan mempunyai visi yang cemerlang. Fakta menunjukkan bahwa selama pemerintahan Orde Baru, Departemen Luar Negeri tidak mempunyai kekuatan apa-apa dalam memformulasikan strategi kebijakan luar negeri karena fungsi tersebut telah diambil alih oleh Departemen Pertahanan. Ketika itu, Departemen Luar Negeri hanya sebagai pelaksana saja.

Mekanisme pembagian kerja yang berjalan di Departemen Luar Negeri juga sudah ketinggalan jaman dan tumpang tindih dengan membagi fungsi pegawai Departemen Luar Negeri menjadi Pejabat Diplomat dan Konsuler ((PDK), Pejabat Administratif (PA), dan Pejabat Sandi (PS). Perubahan struktur juga mesti dilakukan guna melenyapkan dualisme dan kompetisi antara "orang-orang politik" melawan "orang-orang ekonomi" yang terjadi saat ini. Kompetisi ini menimbulkan kesan seolah-olah diplomasi politik dan ekonomi berjalan sendiri-sendiri. Yang satu di bawah koordinasi Dirjen Politik dan lainnya Dirjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri (HELN).

Di samping itu, harus dihilangkan *image* atau citra dalam masyarakat Indonesia bahwa jabatan duta besar adalah jabatan "buangan". Artinya, pemerintah selalu menempatkan orang-orang yang dianggap berlawanan dan beroposisi, pada jabatan duta besar sehingga masyarakat umum selalu mempunyai citra yang negatif terhadap jabatan itu. Padahal, dalam khasanah diplomasi dan hubungan internasional, jabatan duta besar adalah jabatan mulia karena berfungsi sebagai wakil dari suatu negara. Dengan demikian, restrukturisasi Departemen Luar Negeri seharusnya tidak hanya berkutat pada masalah aspek fungsionalisasi dan organisasi-administrasi. Lebih dari itu, harus mempertimbangkan juga aspek personel dan profesionalitas. Tanpa itu semua, sulit bagi Departemen Luar Negeri untuk bergerak secara bebas melaksanakan fungsi sebagai agen operasional politik luar negeri.

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana (S-2)
Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Politik
Internasional UGM.

Akar Masalah Konflik Aceh

Oleh: Agus Subagyo *

PEMERINTAHAN Megawati Soekarnoputri menghadapi tantangan yang sangat berat untuk menyelesaikan merebaknya berbagai gejala disintegrasi bangsa. Salah satunya adalah menangani beralur-larutnya permasalahan di Aceh. Semakin rumit dan alotnya konflik Aceh membuat Presiden Megawati menjadikannya sebagai agenda prioritas utama yang diwujudkan dengan pembagian tugas antara dirinya dengan Wakil Presiden Hamzah Haz, di mana Megawati bertugas menangani masalah Aceh. Kendati demikian, naiknya Megawati sebagai presiden dengan berbagai agenda yang akan diformulasikan dan diterapkan di Aceh kurang mendapat respon positif dari beberapa pihak ataupun kelompok di Aceh. Hal ini ditandai dengan masih maraknya berbagai kegiatan destruktif seperti pembakaran, penculikan, pengeboman, dan pembunuhan yang dilakukan oleh apa yang dinamakan oleh Gerakan Aceh Merdeka. Peristiwa terakhir yang tentunya sangat memprihatinkan adalah kerusuhan yang terjadi tepat pada hari kemerdekaan bangsa Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Berbagai peristiwa mengesankan dan kondisi memprihatinkan yang selalu mewarnai kehidupan rakyat Aceh akhir-akhir ini bermula pada satu keinginan, yaitu tuntutan untuk melepaskan diri dari bangsa Indonesia, dan itu berarti membentuk sebuah negara Aceh Merdeka. Kenyataan yang demikian menimbulkan pertanyaan tentang apa yang menyebabkan rakyat Aceh ingin merdeka lepas dari Indonesia? Dan bagaimana pula upaya-upaya yang harus ditempuh agar permasalahan konflik Aceh segera menemukan solusi yang terbaik.

Kilas Sejarah

Sebagai penyanggah atribut "serambi mekah", secara historis, Aceh adalah sebuah kesultanan besar pada tiga abad lalu. Kesultanan yang dipimpin oleh Iskandar Muda ini mengklaim wilayahnya meliputi Jazirah yang membentang mulai dari Sabang, Riau Kepulauan, Belahan Timur Sumatra, Bangka, Belitung, hingga Bengkulu. Pada masa perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme, Aceh secara gigih melakukan perlawanan hingga melahirkan pejuang dan pahlawan nasional, seperti Teuku Umar dan Cut Nyak Dien.

• **Pengorbanan dan jasa rakyat Aceh dalam membentuk negeri ini sangat besar. Oleh karena itu, melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan yang matang, rakyat Aceh sepakat untuk menjadi bagian dari negeri ini.** Begitu besar jasa rakyat Aceh dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, para "founding father" negeri ini memberikan status khusus pada Aceh sebagai Daerah Istimewa, sama dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian bangsa Indonesia kala itu pada masyarakat Aceh. Akan tetapi, perhatian yang begitu besar ini pada perkembangannya telah dinodai dan dikoyak-koyak oleh apa yang dinamakan dengan Orde Baru. Dengan sistem sentralistik yang dibungkus dalam mekanisme korporatisme negara, Orde Baru menerapkan kebijakan yang sangat ketat dan represif terhadap daerah, terutama Aceh yang ketika itu dituntut ingin mendirikan negara Islam. Sindrom *Islamophobia* inilah yang kemudian menghasilkan keputusan untuk diberlakukannya DOM (Daerah Operasi Militer) selama kurang lebih 10 tahun (1989-1998). Represifitas militer dalam DOM inilah yang menimbulkan perasaan "traumatis" mendalam bagi rakyat Aceh.

Baru setelah arus reformasi bergulir dan rezim militer Orde Baru tumbang, kebijakan anti hak asasi manusia ini dicabut. Namun, nasi telah menjadi bubur, rakyat Aceh terlanjur merasakan trauma akibat keganasan militer yang membasmi secara kejam sanak saudara mereka. Sekarang, pemerintahan di era reformasi *ketuban* dosa-dosa Orde Baru. Ia digugat oleh sebagian besar rakyat Aceh untuk bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan oleh DOM. Terjadilah kemudian tarik ulur yang tak jarang menimbulkan kekerasan dan gejala sosial. Gejala sosial ini semakin mengkristal dan bermuara pada satu kata referendum alias keinginan untuk menentukan masa depan sendiri.

Mengapa Ingin Merdeka?

Tuntutan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri



cewan terhadap pemerintah pusat di masa lalu, baik selama Orde Lama, dan terutama sekali dalam masa Orde Baru. Secara sederhana, ada beberapa sebab mengapa rakyat Aceh ingin merdeka.

Pertama, fakta ketidakadilan dalam membagi harta kekayaan yang digali sangat banyak di daerah tersebut oleh pemerintah pusat dan sedikit sekali yang bisa dinikmati oleh rakyat Aceh. Industri di Aceh tumbuh pesat sejak Mobil Oil menemukan gas alam di Arun, Aceh Utara. Sejak saat itu, industri lain segera menyusul: PT Aceh Asean Fertilizer, Pupuk Iskandar Muda dan Kertas Kraft Aceh. Data pada tahun 1981, misalnya menunjukkan bagaimana Aceh dengan nilai US\$ 865 miliar berada pada peringkat ketiga dalam hal sumbuhan terhadap nilai total ekspor nasional yang berbasis pada sumber alam (Poot, et. al.: 1992). Tetapi menurut data 1997, anggaran pusat untuk Aceh hanya Rp 102 miliar atau hanya 0,05% dibandingkan dengan kekayaan alamnya. Maka Ibrahim Hassan, bekas gubernur Aceh dalam sebuah wawancara televisi mengatakan dengan getir, "Aceh menyumbang 11% dari pemasukan negara. Tolong berilah kami sedikit lebih banyak dari selama ini. Kalau tak mau melihat kami dengan dua mata, sebelah mata pun jadilah".

Kedua, diberlakukannya DOM di Aceh. Akibat pelaksanaan DOM ini rakyat Aceh menjadi antipati terhadap militer (TNI). Betapa tidak, dua tahun sejak diberlakukannya, diduga sudah 2000 penduduk sipil Aceh, termasuk wanita dan anak-anak hilang, dibunuh atau ditahan tanpa persidangan. Amnesti Internasional yang mencatat data tadi juga melaporkan soal kekerasan yang dialami mereka yang dituduh pengikut Gerakan Aceh Merdeka di penjara. Kesultanan Islam pertama di Indonesia yang kini punya 3,4 juta jiwa penduduk itu pada tahun 1992 dilaporkan mempunyai 134.000 janda. 75% akibat suami mereka hilang atau dibunuh.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Agustus 1998 mengeluarkan data yang "seram": 781 orang telah tewas di Aceh, 163 orang hilang, 100 orang perempuan diperkosa, sejak menjadi DOM. Komnas HAM punya angka bahwa janda akibat suami terbunuh atau hilang sekitar 3.000 orang (Tempo, 25 Januari 1999, hlm 15-16). Selain itu, selama DOM diberlakukan, tentara praktis tak kenal hukum lagi. Tak ada organisasi politik di desa, tak ada sarana untuk menyampaikan pendapat dan mengoreksi keadaan. Segala bentuk kebebasan dan partisipasi politik diberangus secara menyedihkan. Bisa dibayangkan betapa sakitnya hati rakyat Aceh atas kejadian-kejadian yang dialaminya selama kurang lebih sepuluh tahun.

Ketiga, bangkitnya kembali Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM). Bagii Hasan Tiro, salah satu pemimpinnya, Aceh merdeka adalah gerakan meminta

tiga abad lalu. Oleh GAM, Aceh merdeka diproklamlirkan tanggal 4 desember 1976. Dalam perkembangannya, AGAM banyak memperoleh simpati dan dukungan baik oleh rakyat Aceh maupun dunia internasional. Menurut Daud Raja, AGAM mencita-citakan Aceh yang berdasarkan ideologi Islam dan berdasar dari Indonesia, yang dianggapnya berideologi sekuler.

Keempat, keinginan untuk menumbuhkan kembali struktur sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang sebelumnya telah diabaikan oleh pemerintah Orde Baru. Rakyat menginginkan syariat Islam diterapkan secara penuh dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan dan perkawinan. Realitas yang berkembang selama ini adalah bahwa syariat Islam belum diterapkan secara "total" sehingga menimbulkan frustrasi mendalam yang klimaksnya adalah tuntutan untuk merdeka, lepas dari Indonesia.

Rakyat Aceh dengan tegas menolak segala bentuk ideologi yang berbau sekuler. Ideologi sekuler yang dijejakkan Orde Baru dimasa DOM justru membangkitkan fanatisme yang kuat terhadap Islam. Perlawanan demi perlawanan dilakukan, meskipun banyak mengalami kegagalan karena kuatnya represifitas rezim Soeharto. Baru setelah rezim Soeharto jatuh, gerakan perlawanan ini menemukan momentumnya, dengan dicabutnya DOM dan bendera bergambar bulan bintang tak lagi sungkan dikibarkan bersanding dengan merah putih.

Langkah Penyelesaian

Berbagai strategi dan upaya untuk mencari penyelesaian terbaik telah ditempuh oleh pemerintah di era reformasi ini. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dilaksanakan pendekatan-pendekatan personal dan negosiasi, mulai dari diutusnya Bondan Gunawan untuk mendekati tokoh-tokoh GAM secara personal sampai dengan perjanjian kesepakatan jeda kemanusiaan (*humanitarian paused*) tahap I dan II. Urus terakhir yang dilakukan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah dengan mengeluarkan Inpres no. 4 tahun 2001 yang merupakan langkah dan kebijakan komprehensif dalam menangani konflik Aceh. Dalam Inpres tersebut, berbagai jajaran dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai krisis Aceh, mulai dari Wakil Presiden, 17 Menteri, Panglima TNI, Gubernur Aceh, dan Bupati-Bupati seluruh Aceh. Namun demikian, aksi-aksi politik dan kekerasan terus saja berlangsung. Bahkan, untuk menunjukkan eksistensinya pada pemerintah pusat dan dunia internasional, seluruh elemen rakyat Aceh menggelar Kongres Rakyat Aceh dibawah koordinasi Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA).

Oleh karena itu, saat ini semua pihak menanti langkah kongkret Presiden Megawati dalam menangani konflik Aceh yang berkepanjangan. Langkah kongkret ini tentunya harus selalu mengedepankan pendekatan-pendekatan dialogis terhadap pihak yang terlibat dan bukan pendekatan militer. Upaya-upaya dialog ini tentunya juga dibarengi dengan proses penegakkan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi selama ini.

Pemberlakuan UU Nanggroe Aceh Darussalam (UU NAD) yang mengatur berbagai masalah menyangkut otonomi khusus bagi Aceh harus direspons secara positif oleh seluruh elemen rakyat Aceh sebagai bagian dari solusi penyelesaian konflik. Karena, UU ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari seluruh rakyat Aceh itu sendiri. Selain itu, diharapkan kelompok-kelompok bersenjata seperti GAM segera menghentikan tindakan kekerasan dan mengedepankan upaya dialog dan negosiasi. Sampai disini dapat dikatakan bahwa semua pihak, khususnya pemerintah telah berupaya secara optimal dalam menyelesaikan krisis Aceh. Tanpa meragukan dan menyangsikan setiap langkah yang diambil oleh pemerintah, ada satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat, yakni kondisi sosiologis, antropologis, psikologis, kultural dan struktural dari masyarakat Aceh. Pemerintah diharapkan dapat "menyelami" terlebih dahulu apa yang terjadi dalam masyarakat Aceh yang sebenarnya dan seutuhnya.

Mungkin ada baiknya jika kita meniru pola "Snouck Hurgronje", seorang orientalis kontroversial, dalam artian yang positif. Dengan cerdas, ia berusaha lebih dekat memahami dan menyelami kultur dan struktur sosial rakyat Aceh sebelum mengambil keputusan. Nampaknya, pemerintah bisa belajar dari peristiwa itu.

Penulis adalah Mahasiswa S-2 Ilmu Politik UGM dan Pendiri Center for Democracy and Conflict

Amerika Serikat dan Ideologi "Politik Realis" (1)

Oleh : Agus Subagyo*

SELAMA kurang lebih delapan pekan terakhir ini, perhatian dunia internasional tersedot pada isu seputar aksi terorisme. Peristiwa penghancuran gedung World Trade Center di New York dan gedung Pentagon, Kantor Departemen Pertahanan AS, di Washington, oleh pesawat komersial yang diduga dibajak kelompok terorisme pada tanggal 11 September yang lalu, membalak mata setiap orang. Dua gedung yang merupakan "icon-icon" penting AS ini telah rata dengan tanah dalam waktu yang relatif singkat. AS pun panik dan cemas sembari mencari tahu siapa yang berada di belakang aksi teror tersebut. Kemarahan AS semakin menjadi-jadi ketika melihat kenyataan bahwa korban meninggal mencapai 5.700 orang penduduk sipil.

Di tengah suasana kekalutan dan berkabung atas tragedi bersejarah itu, Presiden AS, George W. Bush, membuat pernyataan kontroversial bahwa yang menjadi "dalang" atas tragedi WTC dan Pentagon adalah Osama Bin Laden beserta jaringan Al Qaeda yang saat ini bermarkas di Afghanistan. Dalam perkembangannya, AS dibantu dengan Inggris mulai melakukan serangan udara atas basis-basis militer dan instalasi persenjataan tentara Taliban yang dianggap melindungi Osama Bin Laden. Sebelum menyerang, Presiden Bush menggalang dukungan internasional untuk memerangi aksi terorisme dan mencanangkan slogan gerakan anti terorisme. Serangan AS ke Afghanistan adalah bagian dari gerakan anti terorisme. Serangan udara AS yang dimulai sejak 7 Oktober lalu inipun, kontan saja mengalihkan perhatian dunia internasional dari AS ke Afghanistan.

Pengeboman bertalu-talu militer AS terhadap basis-basis kekuatan Taliban dan Al Qaeda baik yang ada di Kabul maupun Kandahar dan Masar I Sharif menimbulkan reaksi *pro kontra* dari berbagai negara di dunia. Di sebagian besar negara-negara Islam, muncul gerakan dan aksi demonstrasi anti Amerika yang kemudian bermuara pada isu sensitif, yaitu jihad Islam. Di Amerika Serikat pun, muncul demonstrasi yang menolak serangan AS terhadap Afghanistan. Tapi, berbeda dengan rakyatnya, pemerintahan Pakistan, Tajikistan, dan Uzbekistan setuju atau mendukung serangan AS tersebut. Bahkan, ketiga negara ini memperbolehkan wilayahnya digunakan sebagai pangkalan militer untuk pasukan AS.

Kendati demikian, sebagian besar negara-negara di dunia sepakat bahwa perlu suatu kesepakatan untuk membentuk suatu gerakan dalam memerangi terorisme. Semua menyetujui bahwa gerakan terorisme adalah bertentangan dengan hak asasi manusia dan kemanusiaan. Semua juga mendukung upaya AS dalam memerangi terorisme. Namun, banyak negara yang

tidak setuju cara-cara yang dilakukan AS menghancurkan terorisme dengan menyerang Afghanistan sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Tindakan serangan membabi buta pasukan AS yang pada kenyataannya kerap kali salah sasaran, melukai dan menghujami sasaran-sasaran sipil, sehingga menimbulkan korban jiwa di kalangan rakyat biasa, dinilai oleh sebagian besar kalangan tidak memperhatikan dan mengindahkan beberapa pertanyaan berikut: *Apakah benar sudah terbukti secara hukum bahwa Osama Bin Laden dan jaringan Al Qaedanya terlibat atas hancurnya gedung WTC dan Pentagon? Mengapa AS lebih memilih pendekatan militer ketimbang upaya-upaya diplomasi dan negosiasi? Apa ada motif lain, AS menyerang Afghanistan selain menangkap dan menghukum Osama Bin Laden? Bagaimana pula dengan perlunya mediator untuk menengahi dan mencari jalan keluar terhadap konflik AS-Afghanistan tersebut?*

Praduga Tak Bersalah

Pandangan dan tindakan AS yang positivistik dalam menangani permasalahan-permasalahan internasional telah mengabaikan nilai-nilai hukum dan aturan-aturan demokratis yang selama ini ia junjung tinggi. Betapa tidak, belum ada bukti-bukti kuat dan konkret mengenai keterlibatan Osama Bin Laden dalam tragedi WTC dan Pentagon, AS sudah buru-buru menegcam, menuduh, dan menetapkan Osama Bin Laden sebagai tersangka. Tatkala ditanya bukti-bukti konkret, Presiden Bush tidak pernah mau memberikan dan membeberkan bukti-bukti atau data-data keterlibatan Osama Bin Laden, dengan alasan informasi itu sangat rahasia (*top secret*) dan bisa membahayakan cara kerja dinas intelijen AS.

Yang justru sangat berbahaya sebenarnya adalah bagaimana kalau kelak diketahui bahwa yang menabrakan pesawat ke WTC dan Pentagon itu ternyata kelompok teroris lain, bukan Osama Bin Laden dan jaringan Al Qaedanya. Banyak kalangan menilai bahwa serangan yang dilancarkan AS ke Afghanistan tidak lebih dari tindakan balas dendam dan ambisi pribadi Presiden Bush terhadap pemerintahan atau rezim Taliban. Sebagaimana diketahui, rezim Taliban selalu melindungi Osama Bin Laden ketika terjadi peristiwa pengeboman Kedutaan Besar AS di Kenya dan Tanzania tahun 1998 lalu yang menewaskan 250 orang penduduk. Atas hancurnya Kedutaan Besar AS tersebut, AS menuduh dan berusaha menangkap Osama Bin Laden, tapi berkat perlindungan rezim Taliban, AS tidak berhasil menghukumnya.

Sejak saat itu, AS pun melakukan "black list" terhadap rezim Taliban dan menjadikannya sebagai sasaran gerakan anti terorisme. Tragedi 11 September lalu kemudian dijadikan momentum bagi AS untuk menangkap dan menghukum Osama Bin Laden hidup atau mati. Nampaknya, penetapan Osama Bin Laden sebagai tersangka dan dalang aksi terorisme 11 September lalu didasari oleh motivasi subyektif, tendensius dan balas dendam, bukan atas dasar asas praduga tak bersalah. AS lebih mengedepankan asas praduga bersalah sehingga dapat menurunkan citranya sebagai negara yang menjunjung tinggi aturan-aturan hukum dan demokrasi.

Realisme Politik AS

Hans J. Morgenthau (1978), seorang pelopor realisme politik internasional, mengatakan bahwa salah satu asumsi realisme politik adalah kemampuannya mempengaruhi negara lain melalui penggunaan kekuasaan, kekuatan, dan kekerasan tanpa mengindahkan nilai-nilai moral dan etika. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa politik luar negeri AS selalu bernaftaskan ideologi "realisme politik". Berbagai tindakan AS, khususnya pada masa perang Dingin sangat kental akan nuansa realisme politik. Dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional, AS cenderung senang menggunakan kekuatan militer ketimbang negosiasi dan diplomasi.

Inilah yang merupakan jawaban sekaligus penjelasan atas tindakan AS melakukan pengeboman terhadap Afghanistan. AS tidak mau melakukan negosiasi untuk mencapai kompromi. Negosiasi dilakukan setelah upaya penyerangan berhasil dilakukan. Dengan kata lain, AS lebih mengedepankan *diplomacy of violence*. Upaya penyelesaian masalah secara realistis, praktis, cepat dan mudah ini selalu menjadi kebiasaan buruk militer AS sejak dahulu. Secara historis, ini dapat dilihat mulai dari penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, invasinya terhadap Haiti, operasi "carpet bombing" di Vietnam dan Kamboja, pengeboman AS terhadap Libya tahun 1998, serangan dan embargo atas Irak sampai dengan penyerangan AS atas Afghanistan "hanya" untuk menangkap seorang yang bernama Osama Bin Laden.

Realisme politik yang selalu ditampilkan oleh AS ini sebenarnya tidak dapat menyelesaikan persoalan secara komprehensif dan tuntas. Bahkan, penggunaan kekuatan dan daya paksa semacam itu hanya akan menimbulkan resistensi dan perlawanan yang keras dari rezim Taliban. Dan yang dikhawatirkan lagi adalah timbulnya solidaritas dari umat Islam di seluruh dunia yang mengancam akan melakukan jihad Islam, meskipun hal itu bukan dalam konteks perang agama.

Penulis adalah staf peneliti Center for Democracy and Conflict Management Studies (CDCMS) Jogjakarta dan Mahasiswa S-2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Amerika Serikat dan Ideologi "Politik Realis" (2-Habis)

Oleh : Agus Subagyo*

AS seharusnya mulai menghapuskan realisme politik yang selama ini dipraktekkan pada negara-negara yang dianggap sebagai "pembangkang dan teroris". Para pengambil keputusan AS seyogyanya mengedepankan manajemen konflik yang proporsional dalam mengatasi rezim Taliban dan menangkap Osama Bin Laden. Sebagai negara yang mengaku *campiun* demokrasi, AS harus memprakarsai sendiri upaya-upaya penyelesaian konflik dengan rezim Taliban melalui prosedur-prosedur demokratis dan mekanisme negosiasi untuk mencapai kompromi. Semua tentu sependapat dan yakin apabila para pemimpin Taliban diajak bernegosiasi dan saling memberikan konsesi-konsesi, kompromi akan tercapai dan konflik AS-Afghanistan akan cepat berakhir. Namun, semua juga tidak tahu apa maksud lain AS menyerang Afghanistan.

Motif Geografis-Ekonomis

Presiden AS, George W. Bush, mengatakan bahwa serangan dan pemboman yang dilakukan oleh pasukan militer AS dan dibantu dengan Inggris mempunyai tiga tujuan utama. *Pertama*, untuk menangkap Osama Bin Laden sebagai otak dari tragedi 11 September atau Selasa kelabu yang dianggap berada di negeri "orang bersorban" ini. *Kedua*, untuk menghancurkan jaringan Al Qaeda beserta jaringan-jaringan terorisnya di seluruh dunia. *Ketiga*, untuk menggulingkan rezim Taliban yang dia anggap melindungi Osama Bin Laden.

Namun, beberapa kalangan mensinyalir bahwa selain ketiga tujuan di atas, AS mempunyai motivasi lain dalam menyerang Afghanistan. Motivasi itu adalah motivasi geografis dan ekonomis. Secara geografis, serangan balasan militer AS atas Afghanistan saat ini yang dilakukan secara sepihak, memunculkan kecurigaan akan kemungkinan adanya ambisi AS ingin menguasai kawasan Asia Tengah dan Laut Kaspia yang merupakan wilayah yang sangat strategis bagi sistem pertahanan globalnya. Letak dan posisi Afghanistan yang berada di sebelah timur Iran sangat kondusif untuk "mematai-matai" setiap perkembangan yang terjadi di Iran, Irak, dan negara-negara dikawasan Timur Tengah lainnya. Apabila AS dapat mendudukkan pemerintahan yang *pro* Washington di Afghanistan, hegemoninya atas Asia Tengah dan Timur Tengah akan semakin kuat dan besar.

Secara ekonomis, disinyalir bahwa kawasan Asia Tengah dan Laut Kaspia dikenal menyimpan cadangan minyak bumi terbesar kedua setelah kawasan Arab Teluk. Jika AS berhasil menancapkan kukunya di Afghanistan, negara adidaya ini akan dengan mudah menguasai sumber-sumber ekonomi dan potensi mineral yang sangat melimpah dan belum tergarap di kawasan ini. Selama ini, kepentingan-kepentingan ekonomi AS di Asia Tengah hanya berfokus pada India dan Pakistan. Kepentingan-kepentingan ekonomi AS di Afghanistan terganggu sejak naiknya rezim Taliban men-

duki pemerintahan dengan menggulingkan Presiden Burhanudin Rabbani tahun 1996. Oleh karena itu, jika serangan udara yang kemudian dilanjutkan dengan serangan darat AS terhadap Afghanistan ini berhasil menggulingkan rezim Taliban, secara otomatis hegemoni ekonomi AS di kawasan ini akan berjalan dengan mulus tanpa tantangan.

Indikasi adanya motif geografis-ekonomis ini tentunya membuat gerah negeri kaum Mullah, Iran. Sebagai negara yang berpengaruh di kawasan ini dan adanya kepentingan Iran atas Afghanistan, membuat Iran mempunyai kecurigaan yang besar atas motivasi lain AS dibalik penyerangannya terhadap Afghanistan. Kepentingan Iran akan terancam jika AS hadir secara dominan di kawasan Asia Tengah dan Laut Kaspia. Memang, Iran bermusuhan dengan rezim Taliban semenjak peristiwa penyanderaan dan pembunuhan 8 diplomat Iran oleh orang-orang Taliban tahun 1998. Namun, Iran juga tidak menginginkan adanya intervensi dan hegemoni AS atas Afghanistan.

Solusi Multilateral

Serangan udara dengan membombardir basis-basis kekuatan rezim Taliban dan instalasi militernya sejak 7 Oktober lalu yang dilakukan oleh Aliansi Internasional pimpinan AS membuat rezim Taliban semakin terjepit. Dikatakan demikian karena rezim Taliban juga menghadapi serangan domestik oposisi yang tergabung dalam Aliansi Utara. Aliansi Utara ini terdiri dari etnis minoritas Tajik dan Uzbek. AS pun secara diam-diam juga mendukung dan membiayai perlawanan yang dilakukan oleh Aliansi Utara ini menggulingkan rezim Taliban.

Dampak destruktif dari konflik dan peperangan ini tentunya sangat dirasakan oleh penduduk sipil Afghanistan yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa. Lebih dari 2 juta pengungsi Afghanistan membanjiri perbatasan Pakistan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Belum lagi yang ada di kota-kota Afghanistan seperti Kabul, Kandahar dan Masar I Sharif di mana mereka telah menjadi korban dari serangan salah sasaran rudal-rudal pasukan militer AS. Kaum perempuan, ibu-ibu dan anak-anak kecil telah menjadi korban dari sebuah tragedi perang yang tidak adil.

Melihat kondisi warga sipil yang terlunta-lunta menjadi korban perang dan adanya kekhawatiran akan serangan darat pasukan AS terhadap Afghanistan, seharusnya mendorong setiap negara dan organisasi internasional untuk mencari jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi konflik AS-Afghanistan. Diperlukan suatu mekanisme mediasi yang dapat mempertemukan dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan AS dan Afghanistan. Mekanisme militer yang dilakukan AS saat ini tentunya tidak dapat menuntaskan permasalahan

pelik ini.

Permasalahannya, siapa dan dalam kerangka apa mekanisme mediasi itu dilaksanakan? Jawaban atas pertanyaan ini tentu sulit untuk dijawab dan walaupun dijawab tentu akan sangat beragam jawabannya. Meski begitu, konflik AS-Afghanistan yang dipandang dari perspektif hubungan internasional melibatkan *nation state*, maka alangkah lebih baiknya jika PBB mengambil peran strategis untuk menyelesaikan dan menghentikan serangan AS atas Afghanistan melalui mekanisme mediasi multilateral. Resolusi DK PBB No. 1373 yang mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk mencari, menghukum, atau mengekstradisi teroris merupakan resolusi yang dapat dijadikan batu pijakan untuk menghadapi terorisme global.

Sebagai sebuah organisasi internasional dengan jumlah anggota 189 negara, PBB harus memprakarsai dan mengambil terobosan-terobosan guna mendudukkan pihak-pihak yang bertikai dalam meja perundingan di bawah naungan multilateral PBB. Pihak-pihak yang seharusnya diundang dalam perundingan untuk mencari solusi damai itu adalah AS, Afghanistan, Al Qaeda, dan Pakistan. Alasan melibatkan Pakistan dalam mediasi multilateral ini adalah bahwa Pakistan merupakan satu-satunya negara di dunia yang masih mempunyai hubungan diplomatik dengan Afghanistan.

Sekjen PBB, Kofi Annan, seyogyanya dapat bersikap cepat, lugas, cekatan, responsif, fleksibel dan obyektif menyakinkan AS dan Afghanistan bahwa cara-cara militer tidak akan menyelesaikan masalah. Mungkin saja, cara-cara militer dengan membombardir wilayah Afghanistan dapat berhasil menangkap Osama Bin Laden. Tapi, dampak sosial ekonomisnya sangat besar bagi Afghanistan dan Asia Tengah. Dengan terselenggaranya mekanisme mediasi multilateral melalui wadah PBB akan tercipta suatu kesepakatan dan kompromi yang pada akhirnya dapat melahirkan konsesi-konsesi dan solusi komprehensif secara damai. Sampai di sini, peran PBB untuk memainkan posisi strategisnya sangat ditunggu-tunggu.

Dengan demikian, yang patut dijadikan catatan di sini adalah semua sepakat bahwa aksi-aksi terorisme harus dihancurkan. Tapi, cara-cara militer dengan menyerang negara berdaulat untuk mencari tokoh dan kelompok terorisme global patut disesalkan karena melanggar kedaulatan sebuah negara. Cara-cara militer yang merupakan bagian besar dari praktek-praktek ideologi "politik realis" politik luar negeri AS sebaiknya diubah. Sebagai *campiun* demokrasi, AS seharusnya menerapkan ideologi "humanisme dan moralisme politik" dalam mempraktekkan politik luar negerinya. Tragedi WTC dan Pentagon merupakan momentum yang tepat untuk mentransformasi dan merevisinya politik luar negeri AS.

Penulis adalah staf peneliti Center for Democracy and Conflict Management Studies (CDCMS) Jogjakarta dan Mahasiswa S-2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Materialisme Pembangunan v Humanisasi Pembangunan

Oleh : Agus Subagyo*

KATA pembangunan merupakan sebuah konsep yang sangat familiar di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru. Ketika itu, pembangunan selalu diidentikkan dengan sesuatu yang sifatnya materiil seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional dan besarnya cadangan devisa. Atas nama pembangunan, negara melakukan tindakan represif terhadap kekuatan-kekuatan politik oposisi yang mengancam kekuasaan penguasa. Penciptaan stabilitas politik-keamanan dan pembentukan unit kekuatan politik tunggal-dominan yang berasal dari tiga pilar ABRI, birokrasi, dan Golkar yang diformulasikan dan diimplementasikan dalam kerangka demi keberhasilan pembangunan. Pembangunan telah menjadi sebuah ideologi (*ideology of development*), sehingga sulit untuk mengidentifikasi pembangunan sebagai sebuah alat (*means*) dan pembangunan sebagai suatu tujuan (*goals*). Namun, yang jelas paket pembangunan yang diterapkan oleh rezim Orde Baru selama lebih dari tiga dasawarsa ini telah menimbulkan ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran di segala sektor kehidupan. Klimaksnya adalah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 yang telah menjalar pada krisis politik yang ditandai dengan berakhirnya kepemimpinan Soeharto.

Ironisnya, meskipun sampai saat ini telah berganti pemimpin tiga kali, masa kepemimpinan Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga masa awal pemerintahan Megawati krisis pun belum berakhir. Krisis ekonomi yang meluluhlantakan fundamental perekonomian Indonesia membuktikan adanya "*something wrong*" dalam merumuskan dan mengimplementasikan konsep pembangunan. Mungkin saja ini disebabkan oleh minimal atau terbatasnya pemahaman akan konsep pembangunan dan keaburan dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Pembangunan yang *value-loaded* sebagai sebuah konsep yang muncul dan menguat pada era pasca perang dunia II, pembangunan bukanlah konsep yang bebas nilai (*value free*). Pembangunan adalah suatu konsep yang sarat nilai (*value loaded*). Artinya, pembangunan terkait dengan apa yang dianggap baik dan buruk menurut pengalaman sejarah suatu bangsa. Karena itu, pembangunan memiliki dua karakteristik. *Pertama, karakteristik culture specific*. Artinya, pembangunan dapat didefinisikan secara berbeda oleh dua negara yang lingkungan kulturalnya berlainan. Misalnya, pembangunan menurut Myanmar yang ingin mewujudkan "*road to socialism of Myanmar*" dengan cara membatasi hubungannya dengan negara lain dan cenderung berorientasi ke dalam. Ini berbeda sekali dengan pembangunan menurut Singapura yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar-besarnya dengan cara membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi asing.

Kedua, karakteristik time specific. Artinya, dalam satu negara pun pembangunan dapat didefinisikan secara berbeda dalam kurun waktu yang berlainan. Misalnya, pembangunan menurut Orde Lama yang menekankan pada pembangunan politik berbeda dengan pembangunan menurut Orba yang menekankan pada pembangunan ekonomi.

Dalam masyarakat pun terjadi keaburan yang mengarah pada kebingungan terhadap perbedaan antara pembangunan dengan pertumbuhan. Mungkin saja, logika pemikiran yang dibangun oleh rezim Orde Baru menyamakan akan kedua konsep tersebut. Padahal, berdasarkan literatur ekonomi-politik pembangunan, antara pembangunan dan pertumbuhan merupakan dua konsep yang berlainan.

Pertumbuhan (*growth*) merupakan sebuah proses transformasi kuantitatif dalam kerangka sistem atau struktur yang ada. Pertumbuhan terkait dengan pengertian-pengertian yang sifatnya kuantitas seperti kenaikan angka pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan perkapita. Sedangkan pembangunan (*development*) merupakan suatu proses transformasi kualitatif yang seringkali berkait dengan perubahan struktur atau sistem yang ada. Misalnya, terjadinya perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dengan demikian, pembangunan merupakan sebuah fenomena yang bermuka jamak (*multifaceted*). Pembahasan dan pengkajian terhadap pembangunan harus dilakukan dengan menerapkan pendekatan multidisipliner. Artinya, pembangunan harus dilihat tidak hanya dari perspektif ekonomi saja, melainkan harus memasukkan perspektif politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ekologi dan religi. Mengukur pembangunan keberhasilan dan kegagalan pembangunan dapat diukur dengan menggunakan indikator, parameter, atau tolok ukur tertentu. Tolok ukur ini dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan pergeseran. Pada mulanya, pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya tolok ukur untuk mengukur keberhasilan suatu negara menyelenggarakan pembangunan. Secara teknis-ekonomi, produktivitas negara diukur melalui Produk Nasional Bruto (PNB, Gross National Product, GNP) dan Produk Domestik Bruto (PDB, Gross Domestic Product, GDP). Bahkan, PBB dalam Dasawarsa Pembangunan I atau Development Decade I (1960-1970) menetapkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun untuk jangka waktu yang lama, dipandang sebagai parameter keberhasilan pembangunan.

Adanya kenyataan merebaknya kemiskinan di negara-negara yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi mendorong untuk dimasukkannya indikator pemerataan sebagai unit eksplanasi fenomena kemiskinan. Logika yang mendasari dimasukkannya indikator pemerataan ini adalah bahwa kekayaan yang dimiliki dan diproduksi oleh suatu negara tidak berarti kekayaan itu merata dimiliki oleh semua rakyatnya. Fakta menunjukkan bahwa hanya segelintir konglomerat dan elit politik yang menikmati kekayaan. Sedangkan sebagian besar rakyat bawah mengalami kemiskinan. Secara teknis-ekonomi, pemerataan ini dapat diukur dengan cara menetapkan perhitungan indeks gini dan kalkulasi prosentase penduduk termiskin dan terkaya.

Pada perkembangan selanjutnya, diperkenalkan tolok ukur PQLI (*Physical Quality of Life Index*, indeks kualitas hidup fisik) - yang terdiri dari tiga indikator : (1) angka kematian bayi; (2) harapan hidup bayi berumur satu tahun;

(3) tingkat kemampuan membaca dan menulis - untuk mengukur pembangunan yang dapat menyejahterakan rakyatnya. Begitu kompleksnya permasalahan pembangunan mendorong semua pihak untuk memperluas kriteria keberhasilan pembangunan dengan menetapkan kelestarian lingkungan sebagai tolok ukur berikutnya. Perluasan kriteria ini dilatarbelakangi oleh kenyataan merebaknya polusi udara, polusi laut, kerusakan lingkungan, efek rumah kaca, hujan asam, limbah nuklir, dan gejala baru lainnya yang dulu tidak dikenal. Proyek pembangunan yang mensyaratkan industrialisasi telah menyebabkan krisis keragaman hayati. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang berkesinambungan dengan alam, bukannya merusak alam.

Dalam konteks internasional, proses globalisasi pembangunan di dunia ini telah membelah dunia menjadi dua bagian yang saling kontradiktif. Belahan Dunia Utara yang penuh dengan kemajuan, kekayaan, dan kemakmuran dan belahan dunia Selatan yang akrab dengan kemunduran, kemiskinan, dan kekurangan. Dikotomi yang menimbulkan kesenjangan dan ketergantungan ini memunculkan tolok ukur baru pembangunan, yakni keadilan dan kesejahteraan yang diwujudkan dengan tuntutan negara-negara Dunia Ketiga menuntut terciptanya tata ekonomi Internasional Baru.

Humanisme Pembangunan

Dari berbagai tolok ukur pembangunan yang telah dipaparkan di atas dapat dikatakan masih bersifat materialistis. Yang dipersoalkan terbatas pada persoalan materi yang mau dihasilkan dan yang mau dibagi. Padahal, jika dilihat lebih mendalam, faktor manusia merupakan variabel yang sangat utama sebagai pengambil inisiatif atau pelaku (subyek) pembangunan. Gejala saat ini menunjukkan bahwa dampak pembangunan telah mendehumanisasikan manusia dan mendegradasikan nilai-nilai kemanusiaan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada mulanya ditujukan untuk sarana alat bantu bagi manusia dalam aktifitas sehari-hari telah memperbudak manusia itu sendiri. Dengan makin meningkatnya kekuasaan mesin, semakin menurunlah peranan manusia menjadi konsumen dan budak teknologi semata-mata. Fungsi mesin telah berubah dari *means* (alat) menjadi *end's* (tujuan).

Karenanya, pembangunan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah kemanusiaan. Keberhasilan pembangunan sangat terkait dengan *life sustenance* (penopang hidup), *self esteem* (kehormatan/harga diri) dan *liberations* (kebebasan dari penindasan dan paksaan). Kenyataan yang terjadi saat ini kebanyakan menunjukkan bahwa pembangunan telah menempatkan manusia pada keterasingan kultural (*cultural alienation*), menjadi penonton passif (*passive spectator*), dan obyek masifikasi.

Dengan demikian, pembangunan yang berhasil baik secara materiil maupun spiritual adalah pembangunan yang memfokuskan pada faktor manusia. Proses pembangunan harus diarahkan pada upaya pembebasan manusia dari belenggu belenggu ekonomi, sosial dan politik. Pembangunan yang membebaskan manusia merupakan tolok ukur ideal bagi setiap negara, khususnya Indonesia dalam upayanya keluar dari krisis ekonomi dan memformat ulang konsep pembangunannya.

Penulis adalah mahasiswa S-2 ilmu politik UGM, peneliti pada Pusat Studi Perubahan Sosial dan Politik (PS-PSP) UMY, CDCMS Jogjakarta.

Korupsi dan Rent-Seeking Society (2-Habis)

Rent-seeking Behaviour

Sangat sulit untuk mengatakan bahwa tindak korupsi disebabkan oleh faktor kultural atau struktural saja. Gejala korupsi harus dilihat secara hati-hati dengan mempertimbangkan kultur dan struktur yang berkembang saat itu. Salah satu analisis yang menggabungkan kedua faktor tersebut sebagai sarana eksplanasi adalah analisis *rent-seeking behaviour* (tingkah laku masyarakat yang hanya dipenuhi oleh upaya memburu rente atau keuntungan).

Dalam masyarakat atau struktur sosial seperti itu para pembuat kebijakan publik cenderung berorientasi pada rente ekonomi. Asumsi yang melandasinya adalah semakin besar rente yang bisa diciptakan oleh suatu jabatan pemerintahan, semakin besar peluang terjadinya korupsi. Bagaimana ini berlangsung?

Banyak perusahaan mempengaruhi kebijakan ekonomi melalui hubungan dengan para pejabat atau politisi. Salah satu contoh adalah mempengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri, yakni membuat kebijakan perdagangan yang bisa memberi keuntungan pada suatu perusahaan atau bidang industri tertentu dengan memproteksi pasar produk, mengurangi ongkos produksi, dan mengurangi persaingan yang dihadapi.

Perusahaan ini bisa "mendorong" para pejabat dan politisi untuk mendukung penerapan bea masuk yang bisa melindungi pasar produk mereka atau subsidi untuk menurunkan ongkos produksi mereka. Dorongan ini bisa berujud misalnya, sumbangan dana kampanye para politisi tersebut. Perusahaan itu bersedia menyumbang karena kebijakan-kebijakan seperti itu bisa meningkatkan keuntungan mereka. Inilah contoh perilaku memburu rente (*rent seeking behaviour*).

Oleh: Agus Subagyo*

Dalam istilah ilmu ekonomi, rente adalah keuntungan finansial yang diperoleh akibat kelangkaan sumber daya. Perilaku memburu rente adalah upaya menciptakan "kelangkaan buatan" melalui kebijakan pemerintah dengan tujuan memperoleh lebih banyak keuntungan. Perburuan rente bisa berujud upaya yang dilakukan oleh pengusaha untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pemerintah dengan cara melobi pejabat publik sehingga kebijakan yang diberlakukan memungkinkan perusahaannya memonopoli pasar. Perburuan rente juga dilakukan dengan cara mendorong pemerintah melakukan intervensi yang berakibat memberi keuntungan kepada perusahaan tertentu.

Para pejabat dan politisi bersedia membuat kebijakan seperti itu karena berdasar pada kepentingan pribadi, yaitu memaksimalkan keuntungan pribadi dan berkepentingan untuk memperoleh dana guna memperpanjang masa berkuasanya. Pola dan karakteristik praktek korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya di lembaga eksekutif pada masa Orba sangat kental akan nuansa *rent seeking behaviour*. Ini dibuktikan dengan munculnya kasus Mobnas, Freeport, Bob Hasan dan Apkindo, dan proyek jalan tol yang dikelola oleh Tutut. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang melibatkan kelompok militer yang sebenarnya juga mencerminkan fenomena perburuan rente.

Mekanisme Good Governance

Strategi yang harus dilakukan untuk mencegah tindak korupsi dan peluang terjadinya korupsi adalah mengembangkan mekanisme *good governance* atau tata pemerintahan yang baik. *Good governance* merupakan

suatu perangkat yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen, yakni pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society*, dan usahawan (*bussiness*) yang berada di sektor swasta.

Praktek korupsi dapat ditekan ke titik minimal dengan melakukan pembaruan struktural yang disemangati oleh *good governance*, seperti pembuatan aturan main yang independen, kebebasan pers, kebebasan ekonomi, kemajemukan politik, partisipasi, desentralisasi dan akuntabilitas (tanggung gugat) proses pemerintahan. Di samping itu, harus diberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan manajemen sektor publik seperti meningkatkan efektifitas manajemen dan transparansi/akuntabilitas sektor publik, dan strategi anti korupsi untuk mengurangi peluang korupsi dan mengumumkan perkara korupsi secara luas, termasuk oleh media massa. Pengurangan peran dan belanja militer dengan menjamin transparansi dan kontrol anggaran belanja militer mutlak dilakukan.

Mekanisme *check and balances* antara tiga komponen *good governance* - pemerintah, rakyat, dan swasta - didesain agar supaya peluang dan kondisi yang memungkinkan terjadinya praktek korupsi dapat dihilangkan. Jika salah satu komponen tidak mampu memainkan peran untuk menjamin adanya kongruensi dan kohesifitas, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang mengarah pada kerusakan sistem tersebut. Pendek kata, *good governance* merupakan sistem yang dirancang untuk mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi.

Penulis adalah mahasiswa S-2 Ilmu Politik UGM, peneliti pada Pusat Studi Perubahan Sosial dan Politik (PS-PSP) UMY, CDCMS Jogjakarta.

Korupsi dan Rent-Seeking Society (1)

MARAKNYA praktek korupsi di era reformasi saat ini menimbulkan pertanyaan besar : Mengapa tindak korupsi semakin meningkat di tengah arus reformasi yang mengusung tema pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)? Jawabannya tentu sangat sulit, tapi satu ungkapan untuk melukiskan gejala ini adalah "paradoks reformasi". Pemberantasan KKN yang merupakan *platform* utama reformasi dilaksanakan setengah hati dan seringkali menjadi komoditi politik antar kekuatan politik guna memperoleh kekuasaan yang lebih besar. Kesan yang muncul pada benak masyarakat kemudian adalah bahwa reformasi atau tidak sama saja. Sama-sama terjadi tindak korupsi.

Anggapan umum di sebagian kalangan ilmuwan politik yang mengatakan bahwa tindak korupsi biasanya terjadi di dalam sistem politik yang tertutup dan otoriter perlu dikaji ulang. Kenyataan menunjukkan dengan jelas bahwa tindak korupsi juga terjadi di dalam sistem politik terbuka dan (menuju pada tahapan) demokratis, setidaknya itu terjadi di Indonesia. Ketika reformasi bergulir dan kebebasan pers serta partisipasi politik mengalami perubahan luar biasa, tindak korupsi bukannya berhenti atau minimal berkurang, tapi malah mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Sederetan kasus korupsi yang sampai saat ini masih menimbulkan teka-teki alias ketidakpastian seperti kasus BLBI, BMPK, *Baligate*, dan terakhir *Bulogate* jilid I & II merupakan realitas memalukan sekaligus memprihatinkan. Dikatakan demikian karena orang-orang yang disinyalir terlibat kasus korupsi itu memiliki kadar intelektual tinggi dan mengaku reformis. Namun, yang jadi masalah adalah bahwa korupsi tidak terkait langsung dengan kadar intelektual. Ia sangat terkait dengan nilai-

Oleh: Agus Subagyo*

nilai moral dan etika. Para pejabat negara yang terlibat dalam kasus korupsi sudah sepatutnya dipertanyakan integritas dan pengabdianya pada rakyat dan negara.

Locus Korupsi

Proses demokratisasi pasca-pemerintahan rezim otoriter Orde Baru (Orba) boleh dikatakan relatif baik. Lembaga legislatif bersifat independen, partai politik lebih mandiri, organisasi masyarakat bebas bergerak, dan kebebasan pers yang luar biasa. Hanya saja, perubahan-perubahan demokratis ini tidak banyak pengaruhnya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Perubahan struktural-pemerintahan tidak menjamin jalannya roda pemerintahan yang baik dan bersih. Padahal, telah dibentuk pula lembaga-lembaga pengawasan yang khusus menangani perkembangan dan peluang terjadinya tindak korupsi.

Lembaga-lembaga tersebut adalah BPK (Badan Pengawas Keuangan) KPKPN (Komisi Penyelidik Kekayaan Pejabat Negara) – yang merupakan lembaga formal pemerintah - dan ICW (*Indonesian Corruption Watch*) sebagai lembaga swadaya masyarakat. Di samping itu, sebenarnya DPR, Partai Politik, dan Kejaksaan Agung juga dapat memainkan peran kontrol dan pengawasan terhadap tindak korupsi yang terjadi di dalam struktur pemerintahan dari pusat sampai daerah. Namun celakanya, aktor korupsi tidak hanya berpusat pada *inner cycle* kekuasaan di sekitar istana presiden, tetapi telah menyebar keseluruh kekuatan politik baik di legislatif, partai politik, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Terjadilah kemudian apa yang dinamakan dengan transformasi pola dan dimensi korupsi dari *authoritarian corruption* menjadi *democratic corruption*. Saat ini, sasaran empuk bagi peluang terjadinya tindak korupsi adalah di sekitar BUMN (Badan Usaha Milik Negara), departemen-departemen "basah", dan birokrasi, selain pula di lembaga legislatif, eksekutif, peradilan dan partai politik. BUMN yang saat ini sedang getol-getolnya dipasarkan alias diprivatisasi oleh pemerintah sesuai kebijakan struktural (*structural adjustment*) IMF sangat rawan akan korupsi. Oleh karena itu, kontrol dari seluruh elemen masyarakat harus dilakukan untuk mengantisipasi adanya "kongkalikong".

Jangan sampai pengalaman buruk korupsi Orba terulang kembali di era reformasi saat ini. Semua tentu masih ingat dengan skandal Pertamina. Perusahaan besar milik negara ini sangat dikenal menjadi sarang KKN yang diduga melibatkan keluarga cendana dan kelompok militer. Hal yang sama juga terjadi di Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Pantas saja kalau sekarang perusahaan yang sangat penting bagi rakyat ini selalu merugi meskipun mendapat subsidi.

Upaya parlemen (DPR) yang sekarang ini sedang memproses kasus Bulogate jilid II dengan dugaan keterlibatan ketua DPR, Akbar Tanjung, melalui panitia khusus (pansus) DPR patut mendapat dukungan. Komitmen DPR untuk segera menuntaskan kasus ini didorong oleh usaha memperbaiki citra buruk (*bad image*) DPR di masa lalu yang hanya berfungsi sebagai stempel formal dan sarana justifikasi legitimasi. Harapannya, semoga komitmen ini dibarengi oleh landasan untuk menegakkan hukum, bukan atas dasar motif politis dan balas dendam politik.

Penulis adalah mahasiswa S-2 Ilmu Politik UGM, peneliti pada Pusat Studi Perubahan Sosial dan Politik (PS-PSP) UMY, CDCMS Jogjakarta.

Perpecahan Partai Politik : Siapa yang Diuntungkan? (2-habis)

KASUS ini telah membuka kembali konflik klasik di tubuh partai berlambang pohon beringin antara kelompok pendukung Akbar Tanjung dan kelompok Iramasuka. Oleh karenanya, sebuah tim penyelamat partai dibentuk dengan tujuan memberikan masukan agar Golkar tidak mengalami perpecahan.

Sementara itu, partai-partai besar lainnya pun seperti PDI Perjuangan dan PBB juga terdapat potensi konflik yang bisa mengarah pada perpecahan. Tidak seiramanya sutara atau pendapat masing-masing elit politik PDI Perjuangan menanggapi usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bulog II di DPR bisa menjadi titik picu konflik internal di tubuh partai pemenang pemilu 1999 ini. Ditambah lagi dengan perilaku kader-kader PDI Perjuangan yang ada di daerah yang disinyalir banyak terlibat dalam praktek politik uang ketika terjadi perhelatan pemilihan kepala daerah.

Namun, potensi konflik internal PDI Perjuangan tidak sampai meluas karena figur Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum sekaligus simbol perekat persatuan partai. Friksi yang melahirkan rivalitas antara Yusril Iha Mahendra dan Hartono Mardjono dalam tubuh PBB juga menjadi bumerang bagi munculnya konflik yang lebih luas di tubuh partai berlambang Bulan Sabit dan Bintang tersebut. PDKB pun mengalami sedikit masalah terbukti dari pemecatan Astrid Sutanto dari keanggotaan partai tersebut.

Pembusukan Politik Sipil

Gejala disintegrasi yang muncul disebagian besar partai-partai pemenang pemilu 1999 merupakan wujud nyata dari proses pembusukan politik sipil (*political decay*). Ini sangat ironis, karena ketika reformasi bergulir dan demokratisasi menempatkan kekuatan-kekuatan sipil sebagai pihak yang dominan, elit politik sipil telah menodai sendiri supremasi sipil yang selama ini mereka agung-agungkan. Disintegrasi partai politik telah merusak dan menjadikan supremasi sipil sebagai "bangkai" akibat proses pembusukan elit politik sipil.

Ibarat orang sedang mengikuti balapan rally,

Oleh : Agus Subagyo

kendaraan yang dijadikan ajang balapan mengalami kerusakan teknis-mesin yang jika ditelusuri, kerusakan itu sebenarnya akibat *human error* dari pembalap tersebut. Kerusakan inilah yang membuat si pembalap tidak mampu lagi melanjutkan balapan alias kalah. Begitulah kira-kira gambaran kerusakan yang saat ini menimpa kendaraan yang bernama partai politik. Para elit politik sipil akan mengalami kesulitan dalam ajang balapan pemilu 2004 karena partai politik yang dikendarainya saat ini mengalami kerusakan dan keterpecahan akibat ulah mereka sendiri. Dan jika hal ini tidak diperbaiki dari sekarang, niscaya mereka akan menjadi pihak yang kalah dalam pemilu 2004 mendatang.

Para politisi sipil yang saat ini sedang cakar-cakaran demi kepentingan yang bias, jangka pendek, dan bersifat pribadi, seharusnya malu pada rakyat yang selama ini hanya dijadikan obyek pasif partai politik. Perpecahan yang dialami partai politik menandakan kegagalan kekuatan-kekuatan sipil dalam melaksanakan "proyek" pembangunan politik sipil demi terwujudnya supremasi sipil. Jargon-jargon manis politik seperti mengutamakan bangsa, mengemban amanat rakyat, dan menerapkan nilai-nilai demokrasi terbukti hanya sampai pada dataran wacana. Dalam prakteknya, partai politik mengalami proses pembusukan oleh elit politik sipil.

Siapa yang Diuntungkan?

Amos Perlmutter, ilmuwan politik-militer yang banyak mengkaji hubungan sipil-militer di negara-negara Dunia Ketiga, mengatakan bahwa konflik politik antar elit politik sipil dalam suatu negara yang sedang mengalami transisi menuju demokrasi akan memancing masuknya kembali kekuatan-kekuatan militer dalam politik. Kegagalan kekuatan sipil dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis merupakan kondisi yang kondusif bagi militer mengambil alih kekuasaan.

Konflik dan perpecahan yang saat ini menimpa partai politik bisa jadi mengundang intervensi

militer. Kekuatan militer akan memanfaatkan sisi kelemahan dari kekuatan sipil sebagaimana disinyalir oleh Amos Perlmutter.

Memang, diakui bahwa perpecahan partai politik lebih disebabkan oleh faktor internal, berkait dengan kepentingan-kepentingan individu sehingga tipis kemungkinan adanya skenario besar dari luar partai. Tapi dalam politik, tentu ada yang diuntungkan oleh perpecahan itu. Siapa yang diuntungkan? Militer adalah institusi formal-strategis yang bisa meneguk keuntungan dari konflik elit sipil dalam partai politik. Atas nama stabilitas politik dan keamanan, bisa saja militer keluar dari barak dan kembali terjun dalam kancah politik sipil.

Gejala menguatnya konsolidasi TNI ini ditandai dengan rencana pemerintahan Megawati Soekarnoputri menghidupkan kembali Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda di Aceh yang kemudian disusul dengan rencana-rencana membangun kekuatan-kekuatan teritorial militer di daerah-daerah konflik. Meskipun tujuan pembentukan kekuatan teritorial militer ini adalah mengatasi gerakan-gerakan separatisme, namun hal itu merupakan pintu masuk paling awal bagi TNI untuk berperan kembali dalam panggung politik. Apalagi, saat ini elit politik sipil sedang disibukkan oleh perpecahan partai politik. Perubahan politik internasional berkaitan dengan isu terorisme dan penancangan gerakan anti terorisme juga membuka peluang masuknya TNI dalam kehidupan politik.

Oleh karena itu, kalangan elit politik sipil yang saat ini sedang mengalami pertikaian memperebutkan kendaraan yang bernama partai politik seyogyanya sadar bahwa konflik internal partai politik hanya akan melemahkan posisi tawar (*bargaining position*) mereka terhadap TNI.

Mereka harus tahu bahwa ketika terjadi proses pembusukan sipil dalam partai politik, TNI melakukan langkah-langkah konsolidasi. Dan apabila ini terjadi secara terus menerus, rakyat sebagai penonton akan menilai bahwa kekuatan TNI-lah yang dapat memberikan rasa aman-tentram, bukan lagi kekuatan-kekuatan sipil yang sibuk dengan kepentingan-kepentingan pribadi jangka pendek.

Penulis adalah mahasiswa S-2 Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Internasional UGM.

Perpecahan Partai Politik : Siapa yang Diuntungkan? (1)

CITA-CITA untuk mewujudkan tatanan politik yang demokratis di mana peran besar kekuatan-kekuatan sipil dalam pemerintahan sangat dibutuhkan, akan mendapat ancaman serius dengan merebaknya gejala perpecahan partai politik akhir-akhir ini. Terbelahnya Partai Kebangkitan bangsa (PKB) menjadi dua : PKB versi Alwi Shihab dan PKB versi Matori Abdul Jalil, yang diikuti pula oleh pendeklarasian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reformasi pimpinan KH Zainuddin MZ memisahkan diri dari PPP pimpinan Hamzah Haz merupakan pertanda awal melemahnya proses konsolidasi partai politik oleh kalangan elit politik sipil. Jauh sebelum itu, sebenarnya telah terjadi pula friksi di dalam tubuh Partai Bulan Bintang (PBB) yang kemudian melahirkan rivalitas antar Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Mardjono.

Partai Golkar pun tidak luput dari pusaran konflik internal partai politik. Melambungnya kasus penyalahgunaan dana nonbudgeter Bulog yang melibatkan Akbar Tanjung, telah memicu kembali friksi yang tajam di antara para elit partai tersebut. PDI Perjuangan juga saat ini dihadapkan pada problem loyalitas kader-kadernya di daerah yang banyak tersangkut dengan praktek "money politics" berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, pengunduran diri Sopan Sopian dari keanggotaannya di DPR/MPR dan pernyataan Alex Litaay yang menggambarkan bahwa para kader partai berlambang banteng ini yang lebih mementingkan

kepentingan pribadi. Karena itu, sangat wajar apabila beberapa waktu yang lalu, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi agar para kader-kader PDI Perjuangan yang tidak loyal untuk ditindak secara tegas.

Jika dicermati secara seksama, perpecahan di dalam tubuh partai politik merupakan resultan dari pergulatan kepentingan para elit partai itu sendiri guna memperebutkan porsi kekuasaan. Adanya tesis yang mengatakan bahwa perpecahan partai politik merupakan skenario besar yang akan menjadikan sebuah partai politik menang pada pemilu 2004 merupakan analisa yang jauh dari relevansi dan kenyataan. Melihat pusaran konflik secara kronologis, perpecahan itu memang hanya konflik kepentingan di dalam tubuh partai, bukan dari luar atau oleh skenario besar.

Perpecahan di tubuh PKB misalnya, merupakan konsekuensi dari mata rantai konflik kepentingan antara Gus Dur dengan Matori Abdul Jalil pasca pemilihan umum 1999. Sebagai Ketua Umum PKB, Matori merasa kecewa terhadap Gus Dur yang tidak menempatkannya pada posisi strategis di pemerintahan ketika Gus Dur menjadi presiden. Padahal, semua ketua umum partai pemenang pemilu mendapatkan kedudukan yang layak dan strategis. Namun, Matori hanya ditempatkan di dalam posisi sebagai Wakil Ketua MPR dan tidak

dimasukan pada "inner cycle" Gus Dur. Kekecewaan ini kemudian diwujudkan dengan "pembangkangan"nya mendukung SI MPR yang berusaha memecat Gus Dur dari kursi kepresidenan. Klimaksnya, Matori yang juga menjabat menteri pertahanan ini menggelar Musyawarah Luar Biasa (MLB) PKB di Jakarta, 14 - 16 Januari lalu yang mendahului MLB PKB versi Alwi Shihab di Jogjakarta. Kepentingan politis sempit telah melahirkan PKB kembar.

Hampir dalam waktu yang bersamaan, pada tanggal 20 Januari 2002, KH. Zainuddin MZ bersama rekan-rekannya mendeklarasikan PPP Reformasi menandai putusannya hubungan formal-politik dengan PPP pimpinan Hamzah Haz. Proses terbelahnya PPP menjadi dua ini merupakan klimaks dari rentetan tarik ulur konflik internal PPP antara kelompok muda *vis a vis* kelompok inapan berkaitan dengan waktu atau *timing* penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP. Kegototan masing-masing pihak dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan jangka pendek telah menjadikan partai berlambang Ka'bah ini tercabik-cabik.

Drama konflik internal di dalam tubuh PKB dan PPP yang kemudian melahirkan partai kembar atau partai tambahan ini juga menular ke tubuh partai Golkar. Partai warisan Orde Baru ini mengalami gonjang-ganjing menyusul meletusnya kasus dana nonbudgeter Bulog yang menimpa ketua umumnya, Akbar Tanjung.

Penulis adalah mahasiswa S-2 Ilmu Politik,
Konsentrasi Politik Internasional UGM.

RADAR JOGJA, SELASA 19 FEBRUARI 2002

Modernitas, Humanisme dan Krisis Kemanusiaan

Oleh: Agus Subagyo

MODERNITAS sebagai fajar baru dan manifesto perubahan sosial dalam sejarah kebudayaan modern Barat pasca *renaissance*, reformasi, dan *aufklarung* (pencerahan, *enlightenment*) telah menjadi mitos laksana sebuah agama baru dalam kehidupan umat sejagat dewasa ini. Modernitas peradaban Barat pasca abad tengah ini memiliki mata rantai persentuhan dengan kebudayaan di Italia abad ke-14 dan kemudian Inggris, Perancis dan Jerman pada abad ke-17 dan ke-18. Persembungan budaya ini telah menjadikan modernitas hadir sebagai hegemoni baru yang merambah ke seluruh penjuru dunia hingga akhir abad ke-20 dan menjadi kiblat peradaban dunia (*core civilization*).

Pengaruh proyek modernitas peradaban Barat yang dibalut oleh temali kapitalisme global dan mengangkut nilai-nilai individual-liberal serta dikemas dalam tema globalisasi sangat terasa dan kentara dalam kehidupan sosial masyarakat ketimuran. Arus modernisasi telah menggeser, dan mungkin juga melenyapkan, budaya lokal yang saat ini berkembang dan dianut oleh masyarakat lokal setempat dan umumnya berada di negara berkembang yang dikenal dengan struktur masyarakat pinggir.

Begitu kuat tarikan modernitas telah menciptakan kristalisasi ungkapan yang bisa dibilang naif bahwa jika tidak mengikuti modernisasi ala Barat, maka dapat dikatakan tidak modern alias tradisional. Padahal, jika disimak lebih mendalam dan seksama, kebanyakan orang memahami dan meniru modernitas Barat baru pada dataran "kulit" nya saja, belum sampai pada "daging" dan "hati" nya. Karena itu, gejala *demonstration effect* ini menjadi aneh, lucu, janggal dan sekaligus menggelikan. Mereka tidak sadar bahwa lokalitas budaya dan identitas ketimurannya telah dinafikan sendiri. Pergulatan antara tradisi dan modernisasi ini menciptakan dikotomi realitas kehidupan, seperti *center-periferi*, pusat-pinggiran, kota-desa, pengusaha-buruh dan kaya-miskin.

Grand Narrative Modernitas

Mitos modernitas yang lahir dan mengalami dinamika percepatan sejak revolusi industri dan revolusi Perancis telah melahirkan sederetan kisah-kisah atau cerita-cerita agung (*grand narrative*) tentang kemajuan kehidupan umat manusia di dunia. Kisah-kisah agung ini berkisar pada kemajuan peradaban Barat yang lebih unggul dari peradaban-peradaban lainnya. Demokrasi liberal, kapitalisme global, dan hak asasi manusia ala barat yang merupakan produk-produk modernitas telah menjadi manifesto politik-ekonomi dunia akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.

Dalam dataran alam pemikiran, modernitas yang dibingkai oleh faham *humanisme-antroposentris* (manusia sebagai pusat alam pemikiran dan manusia menjadi pusat titik alam), telah melakukan pembongkaran radikal atas alam pikiran *teosentrisme* (Tuhan sebagai titik pusat alam) yang berkiabat pada faham ketuhanan, khususnya pada filsafat skolastik dan agama Kristen abad tengah yang didominasi oleh hegemoni kekuasaan gereja. Di samping itu, modernitas telah pula menggeser pusat peradaban dari peradaban Islam yang mengalami masa keruntuhan pada 1258 di Bagdad beralih ke peradaban Barat pasca abad tengah. Modernitas telah menjadi suatu mazhab kemajuan

yang berlaku umum dan kerap kali beralih fungsi sebagai alat kategorisasi sosial yang ekstrem atas struktur sosial yang masih tradisionalitas. Bahkan, modernitas telah dijadikan alat verifikasi atau pengujian atas kebenaran universal dan obat mujarab dalam mengatasi keterbelakangan, kemiskinan, dan kekerasan massal yang seringkali terjadi di negara Dunia Ketiga.

Kisah-kisah agung modernitas yang dirajut oleh para ilmuwan Barat tentang kemajuan zaman modern telah melahirkan faham humanisme. Hal ini ditandai dengan pergeseran perkembangan manusia dari makhluk spiritual menjadi makhluk materialis. Lewat corong modernitas, humanisme mempromosikan potensi manusia melebihi batas-batas fitrahnya. Manusia sebagai *superman* yang merasa dirinya unggul karena penemuan sains dan teknologi lewat otaknya. Mereka menganggap alam sebagai obyek yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk kepentingan manusia tanpa mengindahkan rambu-rambu yang ada. Mereka tidak sadar bahwa dirinya adalah makhluk budaya yang tidak terlepas dari lingkungan alam dan manusia lain di sekitarnya. Akibatnya, terjadi krisis identitas manusia itu sendiri.

Humanisme dalam Krisis

Menurut Frans Magnis-Suseno, humanisme modern yang berkembang saat ini sebenarnya telah ada sejak zaman Antik yang berpusat di Romawi dua ribu tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, humanisme modern terbelah ke dalam dua semplan. *Pertama*, humanisme seimbang atau moderat yang menjunjung tinggi keluhuran manusia, keterbukaan nilai, toleransi, universalisme dan religiositas yang dekat dengan alam. *Kedua*, humanisme sekular atau anti agama. Artinya, agama difahami sebagai takhayul, ilusi, candu, bentuk keterasingan manusia, dan keterikatan manusia pada irasionalitas sehingga manusia hanya dapat menemukan dirinya apabila membebaskan diri dari agama.

Saat ini, humanisme yang dominan dalam alam pikiran manusia adalah humanisme sekular atau anti agama. Akibatnya, manusia mengalami kekosongan nilai sehingga sangat rawan jika melakukan interaksi dengan manusia lain. Gejala ingin menguasai orang lain, ancaman terorisme, munculnya kekerasan massal, dan kerusuhan sosial yang berbau primordialisme merupakan bentuk dan sekaligus konsekuensi dari merebaknya humanisme sekular. Modernitas, nihilisme, dan humanisme sekular telah mengalahkan humanisme moderat yang penuh dengan nilai-nilai moral-keagamaan. Menipisnya nilai-nilai moral-keagamaan inilah yang menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan. Artinya, manusia telah kehilangan identitas dan jati dirinya.

Kecenderungan krisis kemanusiaan ini sebenarnya telah disinyalir oleh Erich Fromm, tokoh psikoanalisa yang banyak merefleksikan kehidupan manusia modern. Menurut Fromm, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah mengantarkan manusia pada periode "bebas dari", tetapi pada saat yang sama manusia tidak "bebas untuk". Artinya, ilmu pengetahuan dan teknologi memang telah membebaskan manusia dari kemiskinan dan kebodohan. Tetapi, pada sisi yang

lain telah membelenggu manusia itu sendiri dan ketergantungan manusia pada teknologi.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa kehidupan umat manusia selalu diliputi oleh ancaman dan krisis kemanusiaan. Perang Dunia I dan II, Perang Dingin, Perang Vietnam, dan Perang Teluk adalah sederetan contoh krisis kemanusiaan dunia yang memakan banyak korban. Akankah peristiwa mengerikan ini terulang lagi di abad ke-21 ini? Sulit untuk menjawabnya. Tetapi, yang jelas tragedi WTC dan Pentagon, 11 september lalu merupakan awal yang buruk dalam menata kemanusiaan abad ini. Nampaknya, tema terorisme akan muncul ke permukaan dan menjadi musuh bersama (*common enemy*) bagi seluruh bangsa yang cinta perdamaian dan kemanusiaan.

Membangun Etos Kemanusiaan Baru

Ciri dan karakteristik modernitas yang lahir dari rahim peradaban Barat dan menjadi model perilaku umat manusia sebenarnya memiliki tiga dimensi kecenderungan. *Pertama*, dimensi kemanusiaan yang tidak bertuhan (humanisme) yang mengandung gagasan dikotomis untuk memisahkan dunia dari akherat. *Kedua*, dimensi materi yang tidak bertuhan (materialisme) yang menganggap realitas kehidupan ini hanya materi. *Ketiga*, dimensi perilaku yang tidak bertuhan (atheisme). Artinya, manusia tidak punya waktu sedikitpun untuk merenungkan, menghayati dan menuruti perintah Tuhan.

Ketiga dimensi kecenderungan inilah yang telah menyebabkan bangsa Indonesia dihantam oleh badai krisis multidimensional dan terancam dalam jurang kebangkrutan. Meletusnya kerusuhan etnis di Sambas, Sampit, Poso, dan Ambon adalah wujud dari krisis kemanusiaan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Bahkan, gejala separatisme dan disintegrasi semakin kuat gemanya di wilayah Aceh dan Papua. Celakanya, para pejabat dan elit politik banyak yang terlibat dalam perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan kepentingan meraih kekuasaan sehingga lupa terhadap tanggung jawab kemanusiaannya.

Kompleksitas permasalahan bangsa Indonesia ini harus ditanggulangi secara cepat dan tepat dengan berpegang teguh pada moralitas yang tinggi (*hi-mo, high morality*), bukan teknologi tinggi (*hi-tech, high tecnology*). Oleh karena itu, perlu pengembangan sebuah etos kemanusiaan baru yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Cita-cita humanistik ini tidak mesti menjauhkan diri dari norma ketuhanan. Adalah panggilan orang-orang beragama untuk membuktikan dengan sikap dan kelakuan nyata bahwa keagamaan bukan halangan bagi sikap yang menghormati martabat manusia dan melihat perbedaan, pluralitas, dan keragaman sebagai sesuatu yang harus diakui dan dihormati.

Pengembangan etos kemanusiaan baru diharapkan dapat menjadi obat mujarab bagi maraknya aksi kekerasan, kerusuhan, dan terorisme anti kemanusiaan-keagamaan yang selama ini mewarnai dinamika kehidupan masyarakat Indonesia pasca-reformasi. Masyarakat yang memiliki etos kemanusiaan baru bercirikan kemanusiaan yang adil dan beradab di mana secara struktural-institusional, norma-norma hukum, adat istiadat serta moralitas keagamaan ditunjung tinggi oleh individu-individu dalam masyarakat.

*Penulis adalah mahasiswa S-2 Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Internasional UGM, peneliti pada Pusat Studi Perubahan Sosial dan Politik (PSP) UMY, CDCMS Jogjakarta.

Konflik Politik dan Kekerasan Kolektif

OLEH AGUS SUBAGYO

SEJAK reformasi, kondisi sosial politik di Indonesia ditandai dua gejala yang amat mencolok dalam tingkah laku politik, yaitu konflik politik (*political conflict*) dan kekerasan kolektif (*political violence*). Proses tarik-menarik kepentingan antara berbagai kelompok dan kekuatan dalam masyarakat selain memberi kontribusi positif terhadap demokratisasi, juga cenderung mengarahkan elite politik berperilaku *konflikual*. Ada argumentasi dan "perang" pernyataan dari berbagai tokoh politik, ditengarai sebagai proses perebutan kekuasaan dengan kepentingan berbeda. Melongok pendapat Hans J. Morgenthau (1978), "konflik politik sebenarnya adalah wujud perjuangan untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbesar kekuasaan (*struggle for power*)," tampak jelas, manuver politik yang ditunjukkan para politisi akhir-akhir ini dalam rangka itu.

Perilaku *konflikual* ini lalu berkembang di tingkat bawah (*grass root*), ditunjukkan dengan pengerahan massa sebagai sarana unjuk kekuatan dan dukungan pada patronnya. Entah mengapa perbedaan pendapat di tingkat elite cenderung disikapi arus bawah dengan tindakan berlebihan, seakan-akan mereka belum faham akan makna demokrasi yang toleran terhadap perbedaan dalam kerangka sistem (*frame of system*) yang ada. Apakah ini murni merupakan reaksi hati nurani rakyat yang menginginkan demokrasi, atau merupakan mobilisasi massa di tingkat elite? Ini memerlukan kajian lebih lanjut.

Namun yang jelas, adegan-adegan konflikual di kalangan elite politik telah menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Aksi saling mendukung terhadap panutan masing-masing telah menimbulkan pengkotak-kotakan dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan cenderung menimbulkan kekerasan kolektif sebagai akibat dari pola dan karakteristik itu. Pembani-

taan dan pembakaran manusia hidup-hidup di tengah keramaian kota, tawuran dan saling tikam antara anak-anak sekolah tanpa perkara yang jelas, ledakan bom yang meluluhlantakan tubuh manusia yang tidak berdosa, dan perang antarkampung yang mengingatkan kita pada suku-suku primitif adalah *start point* dari fenomena kekerasan kolektif dan merupakan representasi dan cerminan perilaku politik yang *konflikual*. Dari sini muncul pertanyaan besar tentang keruntuhan keteraturan dan tertib sosial yang selama ini dianggap-agungkan masyarakat Indonesia.

Hasil kalkulasi politik

Charles Tilly, ilmuwan politik yang mempelajari berbagai revolusi dalam sejarah Eropa menunjukkan, "perilaku konflik dan tindak kekerasan merupakan hasil dari kalkulasi politik para pemimpin yang memobilisasi sumber daya kelompoknya untuk menanggapi peluang politik yang berubah." Dari sini dapat dikatakan, konflik dan kekerasan merupakan hasil kalkulasi strategis dan keputusan taktis. Jika hipotesa ini diterapkan dalam kondisi merbaknya konflik politik di Indonesia kini akan terlihat, terjadi kalkulasi politik di antara mereka yang terlibat konflik. Konkretnya, kini ada dua kelompok besar yang saling tarik menarik, yaitu kelompok pendukung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang diwakili Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama (NU), dengan kelompok anti-Gus Dur.

Kedua kelompok ini saling melakukan mobilisasi sumber daya yang dimiliki (terutama "massa") guna menanggapi dan mengantisipasi perubahan politik yang terjadi. Ini jelas terlihat dari kelompok pendukung Gus Dur yang kerap melakukan an-

caman kepada semua pihak yang berani mendongkel kekuasaan Gus Dur. Rencana massa NU dan Banser yang akan *menggerudug* Jakarta guna *memback up* kekuasaan Gus Dur dan sebagai reaksi atas isu demonstrasi massa besar-besaran pada 15 Januari 2001 telah mencerminkan politisasi massa untuk kepentingan penguasa.

Jika dilihat dari aspek kalkulasi politik, tindakan pengerahan massa sebagai wujud dukungan politik merupakan pilihan alternatif yang kerap kali efektif untuk mencapai tujuan tertentu, setidaknya itu terjadi di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang sarat akan nuansa politik aliran, politisasi massa untuk mendukung sang patron sering dilakukan guna menekan lawan demi keuntungan politik. Memang dalam demokrasi bentuk partisipasi politik semacam itu dapat dianggap sah-sah saja, namun efek samping dari kegiatan ini perlu diwaspadai. Karena cara-cara seperti ini amat rawan dan risikan mengundang kekerasan kolektif dan pertumpahan darah. Serangkaian benturan massa yang mewarnai Sidang Istimewa MPR tahun 1999 merupakan bukti meledaknya kekerasan kolektif.

Konfigurasi pemilahan sosial

Karakter konfigurasi pemilahan sosial dalam masyarakat yang majemuk—yang bisa dipilah berdasar parameter agama, suku, ras atau kelas sosial—menentukan tinggi rendahnya kesadaran konflik di kalangan anggota masyarakat itu, yang selanjutnya akan menentukan besar kecilnya kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan kolektif. Jika konfigurasi pemilahan itu bersifat *intersected*, maka kesadaran konflik di kalangan anggota masyarakat itu akan cenderung rendah; dan

akibatnya, perilaku kekerasan kolektif akan mudah terjadi.

Sebaliknya, jika dalam masyarakat berkembang kondisi struktural yang menghasilkan konfigurasi pemilahan *consolidated*, maka kesadaran konflik di kalangan anggota masyarakat cenderung tinggi. Dalam kesadaran ini, peristiwa sepele bisa memicu terjadinya tindak kekerasan kolektif, apalagi kalau diikuti mobilisasi konflik di kalangan anggota masyarakat itu. Berlarut-larutnya konflik sosial di Ambon, Aceh, dan Irian Jaya, merupakan konsekuensi logis dari pola dan karakter konfigurasi pemilahan sosial yang amat dipengaruhi proses akumulasi kapital dan pembinaan kekuasaan negara yang menyertainya, karakteristik pengorganisasian kelompok terbelakang, dan tingkat militansi beragama.

Perubahan konfigurasi pemilahan sosial yang ada pada gilirannya akan mendorong peningkatan kesadaran konflik dan perluasan frustrasi di kalangan masyarakat. Namun, kondisi itu sendiri tidak akan menimbulkan kekerasan kolektif yang membakar kalau tidak ada api yang meletupnya. Mobilisasi konflik senantiasa dimanfaatkan elite politik untuk menggalang dukungan. Fenomena inilah yang selalu mewarnai dinamik perpolitikan Indonesia. Selain konflik elite politik, perubahan konfigurasi pemilahan sosial ikut andil dalam menghasilkan kekerasan kolektif yang akhir-akhir ini terjadi. Konfigurasi pemilahan sosial adalah "rumpuk kering" yang sedang menunggu jilatan api berupa mobilisasi konflik antar-elite.

Belajar pada Filipina

Konflik elite politik yang dapat menimbulkan kekerasan kolektif di tingkat massa merupakan cerminan ketidakdewasaan budaya politik di negeri kita ini. Seharusnya elite politik menyadari sepenuhnya, mereka mempunyai "ekor" yang dapat bergerak kesana kemari demi mem-

bela diri yang dianggap sebagai "kepala". Alangkah lebih baiknya jika para "koboi" politik kita bermain di tengah lapangan yang bersih dan adanya wasi yang jujur dan adil demi terseleenggaranya pertandingan yang enak ditonton. Jangan sampai para pemain itu bertindak tidak sportif sehingga mengundang dan memancing penonton untuk terjun ke tengah lapangan. Jika penonton sudah masuk ke arena pertandingan, akan terjadi keributan, kekacauan, kekerasan dan anarkisme, di mana aturan main dilanggar begitu saja.

Seyogianya kita harus menengok ke Filipina, yang saat ini juga sedang mengalami krisis politik. Di Filipina, meski terjadi demonstrasi besar-besaran antara dua kubu yang bertikai pro dan anti-Estrada, namun kegiatan "kolosal" ini berjalan tertib dan lancar. Kendati jarak antara kedua kelompok yang sedang melalukan unjuk rasa dan pembelaan amat dekat—hanya dibatasi tali pembatas—mereka tidak saling bentrok dan bahkan menghormati, sebagai sikap partisipasi politik. Bayangkan jika itu terjadi di Indonesia.

Karena itu, tingkat kematangan dan kedewasaan elite politik adalah suatu keharusan. Mereka harus menjadi panutan yang baik bagi pengikut-pengikutnya; dan jangan sekali-kali memobilisasi massa demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Selain itu, perlu ditumbuhkan kesadaran di tingkat massa bahwa konflik di tingkat elite politik bukan berarti konflik dan kekerasan di tingkat massa. Semua pihak harus menyadari, jika terjadi benturan massa, yang akan mengalami kerugian paling besar adalah massa itu sendiri, sementara pimpinan yang mereka bela mati-matian enak-enak duduk di kursi kekuasaan.

♦ Agus Subagyo, staf peneliti Lembaga Kajian Strategis Komunikasi Indonesia (LKsKI) Yogyakarta dan mahasiswa S-1 Ilmu Politik UGM.

PERKEMBANGAN dan kemajuan ilmu ekonomi semenjak memisahkan diri dari disiplin ilmu politik pada awal abad ke-20 telah menapak ke dataran intelektualitas baru. Ilmu ekonomi yang memfokuskan diri pada persoalan kelangkaan "nilai" dalam masyarakat dan menganalisisnya dengan menggunakan teknik-teknik statistik-kuantitatif dari ilmu alam, telah menciptakan kajian ilmu ekonometrik yang penuh dengan angka-angka dan strategi kalkulatif.

ILMU ekonomi, pada perkembangan selanjutnya, mengonstruksi sebuah pendekatan logika positivisme-empirik. Artinya, pendekatan ini hanya menekankan pada fenomena yang riil dan dapat diukur/dikuantifikasikan dalam bentuk angka-angka.

Faktor yang abstrak dan tidak dapat diukur/dikuantifikasikan dianggap bukan sebagai variabel eksplanasi. Konsekuensinya, terbentuklah suatu disiplin ilmu ekonomi yang bebas nilai (*value free*) dan tidak memperdulikan etika-moral individu. Padahal, ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai etika dan moral.

Oleh karenanya, pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an, muncul ketidakpuasan dari beberapa ilmuwan ekonomi terhadap kerangka analisa yang jauh dari aspek etika-moral.

Salah satu ilmuwan ekonomi itu adalah Amartya Sen, berkebangsaan India, pemenang hadiah Nobel ekonomi tahun 1988. Dalam bukunya yang berjudul "*On Ethics and Economics*" (Terjemahan: *Masih Adakah Harapan bagi Kaum Miskin? Sebuah Perbincangan tentang Etika dan Ilmu Ekonomi di Fajar Milenium Baru*) ini, Sen

Memasukkan Etika dalam Ilmu Ekonomi

Judul:
Masih Adakah Harapan bagi Kaum Miskin?
Judul asli:
On Ethics and Economics,
Pengarang:
Amartya Sen,
Penerjemah:
Rahmani Astuti,
Kata Pengantar:
M Dawam Rahardjo dan John M Letich,
Penerbit:
Mizan, Bandung,
Cetakan Pertama Maret 2001,
Tebal: (xxxi + 139) halaman.

ingin mengkaji kembali perlunya ada kontak antara etika dan ilmu ekonomi sehingga kerangka analisa ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar ekonom "*mainstream*" (arus utama) tidak mengalami *biased*.

♦♦♦
SECARA teoritik-metodologis, apa yang diusulkan Sen tentang perkembangan ilmu ekonomi dalam buku ini dapat dikatakan keluar dan menantang pemikiran ekonom *mainstream*. Usulan Sen agar ilmu ekonomi memasukkan nilai-nilai etika-moral tentu saja mengejutkan dan membukakan mata semua pihak akan betapa "kering"-nya ilmu ekonomi saat ini terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

Dalam buku ini, Sen ingin menunjukkan bahwa ilmu ekonomi *mainstream* tidak mampu menjelaskan fenomena kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, di negara-negara sedang berkembang. Dan bahkan tidak peka atau sensitif akan ketiga fenomena tersebut.

Berangkat dari logika pemikiran macam itu tadi buku ini diterbitkan dan memperoleh perhatian besar dari berbagai kalangan, khususnya para ekonom di negara-negara sedang

berkembang.

Sebuah karya dari sekian banyak karya Sen ini terdiri dari tiga bagian pokok. Bagian pertama diberi judul "*Perilaku Ekonomi dan Sentimen-sentimen Moral*". Bagian kedua, berjudul "*Penilaian-penilaian Ekonomi dan Filsafat Moral*".

Sedangkan di bagian akhir atau ketiga mengambil tema "kebebasan dan konsekuensi". Pemahaman akan antarbagian dalam buku ini sangat mudah karena ditulis dengan gaya bahasa yang jelas, lugas, renyah dan menggaibahkan.

Di bagian pertama buku ini, dikupas secara gamblang tentang apa yang dinamakan perilaku ekonomi.

Perilaku ekonomi ini dapat dipandang dari dua perspektif. Pertama, *self-interested* (kepentingan individu/diri sendiri) dan kedua *rationality behaviour* (perilaku rasionalitas: mementingkan keuntungan dan meminimalkan risiko/biaya). Kepentingan individu dan perilaku rasionalitas akan membawa masyarakat pada materialisme-konsumerisme yang kemudian akan menimbulkan ketimpangan bagi si lemah dalam sebuah kompetisi bebas di mana *invisible hand* memainkan peran dominan.

Bagian kedua buku ini, menguraikan perdebatan menarik antara kemakmuran (*welfare*), keagenan (*agency*), dan kemanfaatan (*utilitarianisme*). Menurut Sen, keagenan dan kemakmuran adalah dua konsep yang berbeda, tetapi mengalami kesalingtergantungan.

Perbincangan tentang kesalingtergantungan ini kemudian membawa konsekuensi pada kebebasan, hak, dan ilmu ekonomi kesejahteraan. Kata Sen, ilmu ekonomi kesejahteraan telah mengalami "kemiskinan" metodologis-teoretis akibat dari semakin jauhnya jarak antara etika dan ekonomi.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Sen menawarkan pembebasan nilai-nilai etika-moral sebagai salah satu bagian dari ekonomi.

Bagian ketiga atau akhir buku ini mencoba menelusuri secara lebih mendalam hakikat dan makna pembangunan. Pembangunan yang berhasil adalah yang dapat membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan dan kelaparan. Konsep *utilitarianisme* tidak mampu lagi menjelaskan fenomena kemiskinan dan kelaparan sehingga harus direkonstruksi agar lebih sempurna dan sesuai dengan ekonomi kesejahteraan modern.

♦♦♦
YANG menarik dari buku ini, Sen tidak terjebak pada perdebatan dua pemikiran yang berlawanan: John Rawls dengan teori keadilan yang kekiri-kiri-an dan Robert Nozick dengan konsep kebebasan yang libertarian. Sen mampu mentransformasikan kedua gagasan itu dan keluar dengan pemikiran yang orisinal dan merangsang wacana keilmuan.

Kebebasan adalah nilai dasar pembangunan. Namun, menurut Sen, kebebasan itu hanya dapat diterima sepanjang dapat meningkatkan kesejahteraan lapisan masyarakat bawah. Untuk mencapai keadilan, diperlukan pengaturan masyarakat

yang mendasari proses menuju keadilan.

Sumbangan berharga dari buah karya Sen itu adalah anjurannya agar ilmu ekonomi kembali memasukkan faktor nilai-nilai etika-moral sebagai bagian dari pisau analisisnya. Sen mengingatkan pada kita bahwa antara etika dan ekonomi sebenarnya tidak ada batas atau sekat yang memisahkannya.

Etika dan ekonomi diibaratkan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Apabila salah satunya hilang, pengaruhnya adalah "ketumpulan" pisau analisa ekonomi dalam memahami perilaku sosial-tidak hanya ekonomi.

Dengan demikian, kehadiran buku ini punya arti banyak, khususnya jika dikaitkan dalam konteks kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini sangat kentel akan nuansa pelanggaran etika-moral dalam praktik-praktik ekonomi, seperti perilaku KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Penyimpangan-penyimpangan ini ternyata merupakan sumber utama krisis perbankan maupun krisis di sektor riil. Padahal, praktik-praktik semacam itu melibatkan masalah etis dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, upaya untuk memasukkan etika dalam ekonomi mutlak dilakukan.

Para pelaku ekonomi memang sebaiknya memahami gagasan Sen ini. Dengan pemahaman yang mendalam, kiranya para pelaku ekonomi bisa berbuat banyak dengan tulus ikhlas bagi kaum miskin. Mereka yang beranggapan bahwa ekonomi itu terlepas dari etika moral, memang pantas dipersoalkan moralnya.

Buku ini akan menambah pengetahuan tentang keterkaitan ekonomi dan moral bagi kaum awam.

(Agus Subagyo, staf peneliti Pusat Studi Perubahan Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mahasiswa S-2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada)

Fundamentalisme Pasar Versus Masyarakat Terbuka

PARA penganut teori modernisasi percaya bahwa perjalanan sejarah manusia yang bersifat linier ini akan mencapai pada satu tahap akhir di mana nilai-nilai kapitalisme dan demokrasi liberal akan menjadi ideologi hegemonik tanpa tanding. Digambarkan pula bahwa seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik ekonomi, politik, maupun sosial akan sangat kental diwarnai oleh norma-norma kapitalisme sebagai konsekuensi dari terintegrasinya ekonomi nasional dalam kapitalisme global.

NAMUN, terjadinya krisis ekonomi Asia, khususnya di Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan beberapa tahun lalu menimbulkan keraguan akan argumentasi teori modernisasi tersebut.

Dari sini timbul pertanyaan, apakah benar sistem kapitalisme global sedang mengalami krisis? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya? Bagaimana pula langkah dan cara untuk mengatasi krisis kapitalisme global tersebut?

Buku *Krisis Kapitalisme Global: Masyarakat Terbuka dan Ancaman Terhadapnya* buah karya George Soros, praktisi dan pialang pasar modal, ini berusaha menjawab persoalan di atas. Dalam buku itu juga diperkenalkan konsep reflektivitas sebagai kerangka konseptual untuk memahami perkembangan kapitalisme global, sekaligus sebagai pengganti konsep ekuilibrium dalam ekonomi pasar konvensional.

◆◆◆

MENURUT penulisnya, buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kapitalisme global sedang mengalami ujian dan ancaman yang sangat berat. Apabila hal ini tidak ditangani secara serius maka suasana krisis akan menghantui perjalanan kapitalisme global.

Ada dua indikasi yang menyebabkan kapitalisme berada dalam situasi krisis. Pertama, berkaitan dengan kerusakan pada mekanisme pasar yang dapat mengarah pada guncangan dan instabilitas pasar uang. Kedua, berkaitan dengan kekurangan-kekurangan pada sektor nonpasar. Artinya, kegagalan-kegagalan politik dan erosi nilai-nilai moral, baik pada tingkat nasional maupun internasional (hlm 5).

Para penganut fundamen-

talisme pasar memiliki konsepsi yang cacat mengenai cara pasar uang beroperasi. Mereka percaya bahwa pasar uang mengarah pada ekuilibrium. Padahal, pasar uang tidak mengenal ekuilibrium, tetapi lebih dekat dengan reflektivitas. Reflektivitas dinilai dapat merefleksikan realitas yang terjadi dalam mekanisme pasar. Logika pasar yang salah akan menyebabkan terjadinya instabilitas inheren kapitalisme global (hlm 6).

Sedangkan apa yang dimaksud sektor nonpasar adalah kepentingan kolektif masyarakat, dan nilai-nilai sosial yang tidak mengemuka dalam pasar. Lebih lanjut, terdapat perbedaan antara membuat aturan main dan memainkan aturan main.

Pembuatan aturan main melibatkan keputusan kolektif atau politik. Bermain dengan aturan main melibatkan keputusan individual. Sayang, perbedaan tersebut jarang disadari (hlm 8).

Anggapan pokok buku ini adalah bahwa fundamentalisme pasar merupakan sebuah ancaman yang besar bagi keberlangsungan sistem kapitalisme. Menurut penulisnya, saat ini sistem kapitalisme telah mengalami distorsi dan penyimpangan sehingga sulit mewujudkan sebuah masyarakat terbuka (*open society*). Jadi, fundamentalisme atau ideologi pasar sangat bertentangan dengan masyarakat terbuka.

Masyarakat terbuka sendiri di sini diartikan sebagai suatu sistem yang mengedepankan kebebasan, demokrasi, dan penegakan hukum, tanpa ada konsesi-konsesi ekonomi.

Fundamentalisme pasar berupaya menghapus pengambilan keputusan kolektif, dan menerapkan supremasi nilai-nilai pasar atas seluruh nilai politik dan sosial. Padahal, apa yang

Judul: *The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered*
Terjemahan: *Krisis Kapitalisme Global: Masyarakat Terbuka dan Ancaman Terhadapnya*
Penulis: **George Soros**
Penerjemah: Dindin Solahudin
Penerbit: Qalam, Yogyakarta
Cetakan I, Juni 2001
Tebal:
(xxv + 293) halaman

dibutuhkan adalah suatu keseimbangan antara politik dan pasar, antara membuat aturan main dan bermain dengan aturan main (hlm 10-11).

Kendati demikian, sampai saat ini sistem kapitalisme masih memiliki kekuatan. Memang ia terancam oleh bahaya krisis global saat ini, tetapi supremasi ideologisnya tidak mengenal batas (hlm 10).

Dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain, kapitalisme global adalah alternatif yang lebih baik. Obat yang dianjurkan oleh kaum marxis untuk menerapkan komunisme dalam kegiatan perekonomian terbukti tidak manjur dan mengalami kegagalan. Dengan demikian, sistem kapitalisme global adalah pilihan terbaik dari yang terburuk.

Menurut Soros, upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan seperti itu bukanlah dengan mencampurkan kapitalisme global, melainkan menciptakan suatu tatanan kelembagaan yang memiliki mekanisme koreksi-kesalahan.

Mekanisme itu meliputi pola hubungan antara pasar dan demokrasi. Oleh karenanya, untuk pengambilan keputusan global yang stabil diperlukan semacam sistem politik pengambilan keputusan global. Pendeknya, diperlukan masyarakat global untuk mendukung ekonomi global (hlm 12-13).

◆◆◆

SECARA garis besar, buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama terdiri dari lima bab. Bab satu mengulas tentang falibilitas dan reflektivitas sebagai kerangka analisa.

Bab dua menguraikan kritik-kritik yang dialamatkan pada ilmu ekonomi. Bab tiga mengungkap penerapan reflektivitas dalam pasar uang. Bab empat



menjelaskan betapa pentingnya kajian reflektivitas dalam pasar uang. Juga menjelaskan betapa pentingnya kajian reflektivitas dalam sejarah. Sedangkan upaya untuk membedakan konsepsi dan teorisi masyarakat terbuka dipaparkan dalam bab lima.

Bagian kedua buku ini terdiri dari enam bab. Bab enam memaparkan asumsi, logika, dan prinsip-prinsip sistem kapitalisme global. Bab tujuh menggambarkan latar belakang krisis moneter global yang dimulai dari kawasan Asia, dan peranan IMF di dalamnya.

Bab delapan mencoba mencari cara untuk keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan itu. Bab sembilan menguraikan kontradiksi nilai pasar versus nilai sosial dalam kerangka menuju masyarakat terbuka. Bab sepuluh melihat persoalan dalam konteks yang lebih luas, yakni dari perspektif konteks internasional yang berkembang saat itu. Sedangkan langkah dan agenda bagi terwujudnya suatu tatanan masyarakat terbuka dipaparkan dalam bab terakhir.

Sebagai sebuah karya yang mengajukan argumen hipotesis,

buku ini tidak dapat terlepas dari kelemahan dan kritik. Salah satu kelemahannya adalah argumen yang menyatakan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Asia pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan negara-negara di kawasan ini "meninggalkan" kapitalisme yang pada akhirnya menimbulkan krisis kapitalisme global. Argumen ini ternyata tidak didukung oleh bukti sejarah.

Fakta menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Asia justru membuat kawasan ini sangat membutuhkan dan tergantung pada Bank Dunia dan IMF sebagai agen-agen kapitalisme global. Hal ini setidaknya terjadi di Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan.

Meskipun demikian, buku ini sangat bagus dijadikan sebagai wacana dan kerangka analisa untuk memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ekonomi politik internasional.

(Agus Subagyo, staf peneliti pada Pusat Studi Perubahan Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mahasiswa S2 Ilmu Politik Konsentrasi Politik Internasional UGM)

Multikulturalisme di Tengah Kultur Monolitik dan Uniformitas Global

OLEH AGUS SUBAGYO

WACANA tentang multikulturalisme mulai menguat dan memperoleh tempat utama dalam kajian perubahan sosial dan budaya saat realitas kehidupan di pengujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 menunjukkan keanekaragaman budaya dengan berbagai corak budayanya yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Multikulturalisme dipakai sebagai perangkat analisa atau perspektif guna memahami dinamika keanekaragaman latar belakang budaya, perbedaan sejarah, suku, bangsa, rasial, golongan, dan agama.

Masyarakat multikultural tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antarindividu di masyarakat bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai (*peace coexistence*) satu sama lain dengan perbedaan-perbedaan yang melekat pada tiap entitas sosial dan politik. Secara mudah dapat dikatakan, multikulturalisme merupakan suatu konsep yang ingin membawa masyarakat dalam kerukunan dan perdamaian, tanpa ada konflik dan kekerasan, meski di dalamnya ada kompleksitas perbedaan.

Sebagai sebuah formula dan format baru dalam agenda perubahan sosial, multikulturalisme dihadapkan pada kenyataan adanya arus globalisasi yang menjangkiti seluruh segmen kehidupan masyarakat, baik pada level primordialisme (kedaerahan), *nation state* (negara bangsa), maupun pada level dunia internasional (*world system*). Proses menggabalkannya nilai-nilai budaya, *life style*, falsafah, kebiasaan, dan institusi-institusi yang berasal dari Barat—sebagai asal mula dan sumber globalisasi—ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial-budaya, hiburan, pendidikan, sampai urusan selera "perut" dan "aurat" harus dipahami sebagai proses penyeragaman dan pembauran budaya.

Globalisasi yang membawa misi homogenisasi, westernisasi, dan uniformitas budaya ini amat bertentangan dengan gagasan multikulturalisme yang berplatform pluralis, humanis, dan menjaga heterogenitas budaya sebagai sesuatu yang alamiah (*nature*). Padahal, globalisasi adalah fenomena yang tidak bisa diingkari dan dihindari hadir di

tengah kehidupan masyarakat yang saat ini sedang mengalami krisis kebudayaan. Globalisasi telah berubah dari sebuah mitos menjadi realitas yang bersifat konkret dan empirik.

Penetrasi globalisasi

Dalam sejarah perkembangannya, globalisasi merupakan suatu mata rantai dan mempunyai persentuhan proses dengan kolonialisme dan imperialisisme di abad ke-16 sampai ke-19, modernisasi di abad ke-20, dan kapitalisme global di pengujung abad ke-20. Kecanggihan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi mendorong globalisasi mengalami percepatan yang luar biasa pesat.

Menurut Anthony Giddens (1999), globalisasi telah melahirkan ruang sosio-kultural yang spektakuler dalam hubungan antarbangsa dan interkoneksi yang melampaui batas-batas geografis dan kedaulatan negara. Dalam kaitan ini, penetrasi globalisasi membawa tiga dampak signifikan. Pertama, mulai meluntur dan mengendurnya ikatan-ikatan negara bangsa sebagai hasil dari pergulatan antara kedaulatan negara versus kapitalisme global. Pola "tekanan ke atas" penetrasi globalisasi ini cenderung mengarah pada integrasi sosial-budaya di bawah naungan kultur Barat sebagai kultur yang dominan.

Kedua, pola "tekanan ke bawah". Artinya, globalisasi telah membuka katup-katup peluang bagi bangkitnya identitas budaya lokal (*local culture*) yang selama ini sedang terbuai kemasan ikatan nasionalisme budaya yang didasarkan pada negara bangsa. Lokalitas dan kultur monolitik yang mendasarkan diri pada etnisitas, kesukuan, dan primordialisme ini mulai meneguhkan diri *vis a vis* identitas nasional yang saat ini mengalami pengenduran. Secara politis, gejala ini diindikasikan dengan merebaknya tuntutan dari berbagai daerah atau wilayah yang ingin melepaskan diri ikatan negara bangsa. Gerakan separatisme dan disintegrasi bangsa, khususnya yang saat ini melanda Indonesia merupakan salah satu contoh penetrasi globalisasi jenis ini.

Ketiga, pola "desakan ke sam-

ping". Artinya, kecenderungan penetrasi globalisasi telah menciptakan domain ekonomi dan kultural baru yang melintasi batas-batas negara bangsa yang selama ini ada. Penetrasi globalisasi yang membawa slogan-slogan liberalisme pasar dan perdagangan bebas telah membawa dunia pada blok-blok perdagangan dan aliansi-aliansi ekonomi yang terbungkus dalam kapitalisme global. Lahirnya Uni Eropa merupakan contoh konkret dari gelombang sentrifugal globalisasi.

Jika dilihat lebih mendalam, pola-pola penetrasi globalisasi ini menimbulkan suatu paradoks. Di satu sisi, globalisasi melakukan gerak meluas ke wilayah global melalui teknologi komunikasi dan informasi. Namun, di sisi lain, globalisasi telah menstimulasi tumbuhnya identitas-identitas lokal yang primordial. Meski begitu, yang perlu diwaspadai adalah proses uniformitas nilai yang mengarah pada hegemoni budaya.

Uniformitas

dan hegemoni budaya

Banyak kalangan awam di masyarakat, khususnya yang tidak peduli dengan masalah sosial budaya, tidak menyadari, pola kehidupannya sehari-hari telah didominasi oleh kultur asing yang pada tahap-tahap tertentu tidak sesuai budaya lokal. Mereka tidak sadar, di lingkungan sekitarnya telah terjadi proses uniformitas budaya. Mereka larut dan terbius arus budaya pop dan *life style* yang lagi *ngetren*. Padahal, mereka tidak memahami makna dan substansi dari penampilan budaya yang demikian.

Ancaman hegemoni budaya (*culture hegemony*) yang tersembunyi di balik gelombang globalisasi makin kuat terasa di era modern sekarang ini. Pada hakikatnya, hegemoni budaya ini amat berlawanan dengan multikulturalisme yang lebih menekankan pluralitas dan heterogenitas budaya sebagai sebuah mozaik dan kekayaan bangsa. Hegemoni budaya ingin melakukan proses pendominasian budaya yang beraneka ragam itu dalam kendalinya. Tentunya, gejala yang demikian amat membahayakan eksistensi budaya-budaya yang lain.

Secara historis, hegemoni budaya yang kini sedang gencar dipropagandakan oleh Barat melalui media globalisasi telah ada sejak masa kolonialisme dan imperialisme. Jika pada abad ke-19, kedatangan bangsa-bangsa Barat membawa modernisasi hadir bersamaan perluasan kapitalisme dan kolonialisme politik dan ekonomi, maka di pengujung abad ke-20 dan awal abad ke-21, kehadiran budaya universal juga ikut membawa muatan budaya dan peradaban Barat. Gejala seperti ini, menurut Huntington, akan menimbulkan titik picu bagi konflik atau benturan peradaban dengan kebudayaan-kebudayaan lain.

Saat ini, proses hegemoni budaya sebenarnya telah melanda kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara baik yang berdimensi politik, ekonomi, maupun sosial. Secara politis, demokrasi liberal Barat telah menjadi model yang didambakan setiap negara dalam sistem kenegaraannya. Secara ekonomi, kapitalisme global Barat selalu menjadi referensi negara yang ingin maju pertumbuhan ekonominya. Dan secara sosial, masyarakat telah terkooptasi nilai-nilai individualisme Barat, hedonisme, dan konsumerisme. Ini semua tentu amat berlawanan dengan budaya mereka sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran. Ketidakberdayaan melawan gempuran luar dan ketidakberanian menampilkan identitas budaya sendiri akan mengakibatkan suatu entitas sosial menjadi korban hegemoni budaya.

Multikulturalisme sebagai paradigma

Saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi arus ganda persoalan seputar identitas nasional kebudayaannya. Di satu sisi, harus menghadapi gempuran gelombang globalisasi yang membawa peradaban universal (*universal civilization*) beserta dampak ikutan lainnya, seperti uniformitas, homogenisasi, westernisasi, dan hegemoni budaya. Di sisi lain, tengah berhadapan dengan masalah-masalah internal dalam kebudayaannya sendiri, baik yang muncul sebagai akibat dinamika nasional maupun persentuhannya dengan penetrasi globalisasi. Contoh dari gejala ini, munculnya radikalisme etnik yang cenderung mengarah pada disintegrasi bangsa.

Melihat dua kenyataan dile-

matas ini, diperlukan suatu format baru dalam menata kembali konstelasi budaya lokal Indonesia yang terbungkus dalam mozaik kebudayaan nasional, yang sebenarnya saat ini telah mengalami carut-marut dan tercerabai oleh konflik etnik dan kekerasan kolektif. Karena itu, multikulturalisme (*plural culture*) seharusnya dijadikan paradigma baru menggantikan konsep masyarakat majemuk (*plural society*) yang selama ini diterapkan rezim militer Orde Baru. Masyarakat majemuk yang menekankan keanekaragaman suku bangsa tidak akan mungkin mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis dan sudah saatnya digeser menjadi ideologi keanekaragaman budaya atau multikulturalisme yang mempunyai cakupan tidak hanya budaya etnik, tetapi juga berbagai budaya lokal yang diposisikan secara sederajat.

Multikulturalisme merupakan suatu strategi dari integrasi sosial di mana keanekaragaman budaya benar-benar diakui dan dihormati, sehingga dapat difungsikan secara efektif dalam menengarai setiap isu separatisme dan disintegrasi sosial. Pengalaman mengajarkan, bukan semangat kemanunggalan atau ketunggalan ("tunggal ika") yang paling potensial akan melahirkan persatuan kuat, tetapi pengakuan adanya pluralitas ("bhinneka") budaya bangsa inilah yang lebih menjamin persatuan bangsa menuju pembauran sosial yang demokratis.

Dengan demikian, perlu proses penyadaran di antara masing-masing budaya lokal untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman identitas budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamaian. Keanekaragaman budaya ini dapat diilustrasikan bagai bintang-bintang di langit yang berbaran bak mutiara mengahiasi jagat raya. Dalam konteks ini, peranan negara sebaiknya hanya memfasilitasi bagi terciptanya toleransi antar-entitas sosial budaya, dan bukan memainkan peran intervensi-represif yang dapat menimbulkan resistensi dan radikalisme kultural sebagaimana terjadi pada rezim korporatis Orde Baru.

♦ Agus Subagyo, mahasiswa S-2 Ilmu Politik UGM, Peneliti pada Pusat Studi Perubahan Sosial dan Politik (PS-PSP) UMY, CDCMS Yogyakarta.

Mengurai Gagalnya Negara Pembangunan

DALAM konstruk teoritis modernisasi, ada anggapan dalam pembangunan yang murni mengambil jalur kapitalis, peran negara harus dikurangi sampai seminimal mungkin. Pelaku pembangunan adalah para pengusaha, industriawan, borjuasi, disokong petani dan buruh. Melalui mekanisme permintaan dan penawaran dalam sistem pasar bebas, mereka saling berinteraksi dan melakukan transaksi. Negara, dalam pandangan ini, hanya berperan sebagai pengawas dan fasilitator guna menjamin mekanisme pasar berjalan lancar. Campur tangan negara yang terlalu besar hanya akan mengganggu beroperasinya pasar.

Modernisasi sosial-ekonomi kapitalis ini sering dikaitkan sistem politik yang demokratis. Selain melahirkan kelas menengah (*middle class*) yang mandiri, model ekonomi kapitalis telah menciptakan kondisi munculnya kekuatan-kekuatan politik di masyarakat sehingga negara tidak bisa begitu saja memaksakan kehendaknya pada masyarakat. Menurut penganut teori modernisasi, kapitalisme akan mendorong proses liberalisasi dan demokratisasi. Argumen itu didukung kenyataan sejarah. Bukankah AS dan Eropa Barat yang kapitalis adalah negara-negara yang relatif demokratis.

Kenyataan sejarah tentang keberhasilan pembangunan ekonomi-industri di AS dan negara-negara Eropa Barat inilah yang dijadikan semacam "resep" bagi negara-negara sedang berkembang yang baru merdeka, termasuk Indonesia untuk

OLEH AGUS SUBAGYO

melakukan proses pembangunan. Namun, di Indonesia, kenyataan menunjukkan hal yang berlawanan. Resep modernisasi sosial ekonomi menimbulkan sistem politik otoriter, bukan demokratis sebagaimana resep teoritis modernisasi. Bagaimana menjelaskan kenyataan ini?

Logika negara pembangunan

Menurut Gerschenkron (1962), makin terlambat suatu negara melakukan proses industrialisasi, makin diperlukan campur tangan negara. Artinya, jalan yang ditempuh negara industri generasi pertama (AS dan Eropa Barat) yang melakukan industrialisasi berbeda dengan negara-negara yang menyusul belakangan (Jerman, Jepang, Rusia, dan Asia Timur). Selain peran negara yang makin besar, jumlah modal yang harus dikumpulkan juga makin besar guna melakukan industrialisasi. Pada negara industri generasi pertama, proses industrialisasi membutuhkan modal relatif kecil sehingga dapat dijalankan oleh swasta, tanpa campur tangan negara. Pada negara industri generasi berikutnya, modal yang dibutuhkan makin besar sehingga negara terlibat proses industrialisasi. Keterlibatan negara dalam proses pembangunan ekonomi industri inilah yang disebut dengan model negara pembangunan (*model of Developmental State*).

Negara lalu terjun langsung

dalam proses-proses ekonomi, seperti melakukan akumulasi modal baik domestik maupun asing, mendirikan perusahaan-perusahaan negara, mendorong terciptanya kelas pengusaha, dan melakukan regulasi aktif di sektor fiskal, finansial, moneter, dan perdagangan. Inilah yang membedakan antara lahirnya kapitalisme di Eropa Barat dengan kapitalisme di Indonesia. Jika kapitalisme yang tumbuh di Eropa Barat murni dari swasta (*pure capitalism*), maka kapitalisme di Indonesia berasal dari bentukan dan sokongan negara (*state-sponsored capitalism*).

Konsekuensinya, kelas menengah yang amat diperlukan bagi tumbuhnya demokrasi tidak pernah lahir. Yang terbentuk adalah hanya sekumpulan konglomerat yang amat tergantung pada proteksi, patronase, dan subsidi negara. Oleh Yoshihara Kunio (1990), gejala yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di sebagian besar negara-negara Asia Tenggara ini, dinamakan dengan kapitalisme semu alias *ersatz capitalism*.

Dalam konteks kapitalisme semu, terjadi persekutuan segitiga antara modal asing, negara, pengusaha domestik, dan serta di *back-up* kelompok militer. Persekutuan yang oleh Peter Evans (1986) dinamakan *triple alliance* ini diwujudkan dengan proyek-proyek kontrak karya seperti FreePort, Caltex, dan proyek-proyek industri strategis lain. Pada gilirannya aliansi segitiga

ini amat merugikan rakyat karena sarat praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, suntikan modal asing hanya dialokasikan pada industri-industri yang tidak mempunyai keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*).

"Rentier Capitalism"

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa aliansi segitiga ini berlangsung mulus, tanpa gejolak politik kelompok elite? Menurut Walden Bello (1998)

ada tiga alasan.

Pertama, para investor asing yang membawa modal besar dan mencari lahan untuk produksi menciptakan lapangan dan kesempatan kerja.

Kedua, para teknokrat negara bersikap represif terhadap rakyat demi stabilitas politik.

Ketiga, elite ekonomi menganggap, akumulasi modal secara cepat merupakan strategi yang bisa menciptakan kemakmuran dan pertumbuhan

(Bersambung ke hlm 5 kol 5-9)

POJOK KOMPAS

Serahkan saja beda pendapat TNI dengan KPP HAM kepada Mahkamah Agung, kata Wapres.

Hukum kan bukan menang-menangan, tapi soal kebenaran.



Transparansi dan *fairness* kunci sukses transaksi BCA, kata seorang pengamat perbankan.

Itulah yang langka di negeri ini.



Menurut sejumlah warga Bekasi, ribut-ribut soal duit antara anggota DPRD Bekasi sebagai sesuatu yang memalukan.

Malu itu kalau untuk orang yang bermoral.

Mang Uiril

Mengurai Gagalnya Negara Pembangunan

(Sambungan dari halaman 4)

secara cepat.

Represivitas negara terhadap tekanan-tekanan ekonomi politik masyarakatnya inilah yang disebut O'Donnell (1978) sebagai karakteristik negara otoriter birokratis. Dalam negara otoriter birokratis, para elite negara melalui kekuasaan birokratisnya memberi fasilitas bagi para pengusaha. Untuk jasanya ini, para elite negara meminta imbalan, meminta rente atau ongkos sewa. Para elite negara yang memiliki kekuasaan birokratis "menyewakan" jabatannya untuk kepentingan kaum pengusaha. Dengan demikian, jabatan birokratis bagi elite negara hanya menjadi semacam "alat produksi" untuk melakukan akumulasi kapital, melalui sistem rente.

Di Indonesia, praktik-praktik kapitalisme memburu rente ini amat mewarnai aktivitas-aktivitas ekonomi. Munculnya kasus Pertamina, Aplindo, Golden Key Group, dan kasus-kasus lain yang melibatkan para pe-

ngusaha dan pengusaha pada masa pemerintahan Orde Baru merupakan serangkaian contoh praktik-praktik kapitalisme rente yang amat merugikan rakyat. Perilaku *rent seeking* yang mendominasi pola pikir pelaku-pelaku ekonomi dan pemain-pemain politik ini telah menghasilkan *bubble economy* alias ekonomi yang menggelembung. Sekilas tampak besar, tetapi di dalamnya kosong, tidak menciptakan kegiatan ekonomi nyata yang produktif. Akhirnya, pada pertengahan tahun 1997, gelembung itu meledak. Krisis ekonomi telah menimbulkan stagnasi ekonomi dan inflasi tinggi. *Dus*, gagal dan hancurlah model negara pembangunan ini membawa rakyat pada kemakmuran dan kesejahteraan.

Mengulang dari nol?

Cerita gagalnya model negara pembangunan yang diterapkan para perumus kebijakan ekonomi dan politik akibat hantaman dan serangan hebat krisis ekonomi seharusnya dijadikan ba-

han pelajaran yang bagus untuk merenungkan kembali kesalahan apa yang telah kita lakukan. Terlebih, Indonesia adalah negara yang paling sulit keluar dari belenggu krisis ekonomi dibanding Thailand dan Korea Selatan yang saat ini telah berhasil memulihkan perekonomian nasionalnya. Pembangunan dengan ideologi developmentalisme yang amat dominatif yang diperagakan pemerintah Orde Baru terbukti telah gagal mengatasi krisis ekonomi.

Para teknokrat ekonomi dan elite politik harus segera mencari jawaban tentang apa yang terjadi dan yang salah pada model negara pembangunan. Kegagalan model negara pembangunan ini seyogyanya menyadarkan semua pihak bahwa paket-paket pemulihan ekonomi yang dirumuskan pemerintah dan lembaga keuangan internasional tidak akan berhasil tanpa melihat akar ideologis dari persoalan ini. Dalam kaitan ini, proses pemulihan ekonomi seharusnya dimulai dari nol. Artinya, proses pemba-

ngunan harus mengulang kembali dari tingkat yang paling mendasar berkait aspek konsepsi dan ideologi.

Menurut Grindle (1996), model negara pembangunan yang sedang mengalami krisis sebaiknya melakukan langkah perkuatan dengan mengefektifkan empat kapasitas yang dimiliki negara.

Pertama, kapasitas institusional.

Kedua, kapasitas teknis.

Ketiga, kapasitas administratif.

Keempat, kapasitas politik. Dengan keempat kapasitas ini, terbukti dapat memulihkan krisis ekonomi yang terjadi di Meksiko dan Kenya.

Bagi Indonesia, sebaiknya pemerintah dalam melakukan restrukturisasi ekonomi mengefek-

tifkan kembali kapasitas-kapasitas yang dimilikinya sehingga pemerintah memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat dalam menindak tegas para konglomerat yang tidak kooperatif dan menjadi modal kuat dalam melakukan negosiasi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan begitu, legitimasi pemerintah dengan sendirinya akan menguat, karena rakyat melihat adanya komitmen dan ketegasan pemerintah dalam melakukan restrukturisasi ekonomi dari nol.

◆ Agus Subagyo, mahasiswa S2 Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Internasional UGM, peneliti pada Pusat Studi Perubahan Sosial dan Politik (PS-PSP) UMY, CDCMS Yogyakarta.

Republik Bulog

AGUS SUBAGYO

GEDUNG MPR/DPR adalah tempat sentral yang menjadi perhatian publik pada hari Senin, 18 Maret 2002. Di tempat ini, berlangsung perhelatan akbar sidang paripurna DPR dengan agenda tunggal pembahasan tentang jadi tidaknya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Badan Urusan Logistik (Bulog) II berkaitan kasus penyelewengan dana non budgeter Bulog sebesar 40 miliar rupiah dengan tersangka utama Akbar Tanjung, ketua umum Partai Golkar sekaligus ketua DPR RI. Seperti yang diperkirakan banyak pihak, DPR belum berhasil membentuk Pansus Bulog II. Dalam rapat paripurna yang berlangsung alot dan dipenuhi lobi-lobi politik itu, wakil-wakil rakyat sepakat untuk menunda pengambilan keputusan pembentukan Pansus Bulog II hingga masa sidang IV tahun 2001-2002, sekitar bulan Mei 2002.

Sementara itu, kondisi di luar gedung MPR/DPR tampak menarik sekaligus menegangkan. Massa baik yang pro maupun yang kontra pembentukan Pansus Bulog II saling berhadapan-hadapan dan hanya dibatasi oleh barikade aparat kepolisian sambil saling meneriakkan yel-yel dan ejekan-ejekan yang sempat membuat suasana tegang, namun tidak menimbulkan bentrokan fisik.

Aksi massa yang berupaya memberi dukungan moral ini merepresentasikan refleksi pertarungan partai politik yang berada di dalam gedung parlemen tersebut.

Meski demikian, massa pendukung pembentukan Pansus Bulog II harus mengakui rasa kecewa karena mayoritas fraksi-fraksi di DPR, melalui rentetan lobi-lobi yang sangat alot, menyetujui penundaan pembentukan Pansus Bulog II. PDIP yang merupakan partai politik kunci atau penentu mengalami keraguan dalam menindaklanjuti masalah pembentukan Pansus Bulog II ini.

Ibarat sepakbola, bola saat ini sedang dipegang oleh PDIP sehingga tinggal mau ditendang kemana, terserah pada PDIP. Namun, fraksi terbesar di DPR ini "bingung" mau dikemanakan bola ini.

Yang jelas, penundaan pembentukan Pansus Bulog II ini mengandung muatan politis yang sangat besar dan melukiskan tarik menarik kepentingan jangka pendek masing-masing partai politik menyangkut aliansi strategis, upaya mempertahankan kekuasaan, dan kepercayaan publik.

MENCERMATI perkembangan yang ada, terdapat empat kendala yang menjadi atmosfer negatif pembentukan Pansus Bulog II.

Pertama, dilihat dari fraksi yang mendukung dan mendukung Pansus Bulog II ini adalah fraksi yang secara kuantitas kecil suaranya. FPKB, Fraksi Reformasi,

FKKI, FPKB merupakan fraksi-fraksi kecil suaranya di parlemen. Padahal, fraksi yang menolak adalah fraksi besar, yakni FPG ditambah dengan DPP, FBB, FTNI/POLRI, dan FPDU.

Kedua, FPDIP yang merupakan fraksi penentu sekaligus fraksi terbesar di DPR, belum bersikap transparan alias abu-abu, belum hitam putih, sehingga yang terjadi adalah berlatur-larutnya masalah ini terbukti dari kedua kali penundaan pembentukan Pansus Bulog II.

Ketiga, adanya kekhawatiran dari masing-masing partai politik terhadap terjadinya efek domino pembentukan Pansus Bulog II.

Seperti diberitakan, mantan presiden Abdurrahman Wahid, mengatakan bahwa ada 10 partai politik yang menerima kucuran dana Bulog. Jadi, yang "kecipratan" tidak hanya Golkar saja, melainkan partai-partai besar lainnya. Apabila sinyalemen Gus Dur ini benar, maka elit partai politik akan merasa khawatir dan berpikir seribu kali untuk mendukung pembentukan Pansus Bulog II. Namun, publik telanjur punya penilaian bahwa yang menolak pembentukan Pansus Bulog II adalah partai yang "kecipratan" aliran dana Bulog.

Keempat, proses hukum terhadap Akbar Tanjung yang akan disidangkan di Pengadilan tanggal 25 Maret mendatang dijadikan argumentasi bagi partai yang menolak Pansus Bulog II bahwa proses hukum telah berjalan dengan cepat dan lancar sehingga tidak diperlukan lagi proses politik di parlemen. Selain itu, muncul pula argumentasi bahwa pembentukan Pansus Bulog II merupakan ajang balas dendam dan hanya akan menimbulkan instabilitas politik-keamanan.

Kekhawatiran terhadap timbulnya gejala sosial inilah yang menjadi atmosfer negatif pembentukan Pansus Bulog II.

Beberapa kondisi obyektif dan subyektif ini yang membuat partai-partai pendukung Pansus Bulog II merasa pesimis Pansus Bulog II akan terbentuk. FPKB yang paling getol menyuarakan pembentukan Pansus Bulog II harus memeras otak agar supaya dapat menggolkan usulannya ini. Mulai saat ini, fraksi-fraksi yang mendukung pembentukan Pansus Bulog II harus mengaktifkan lobi-lobi politik untuk mengcounter lobi-lobi politik fraksi Partai Golkar yang sangat gencar.

TERLEPAS dari tuduhan bahwa PDIP terkesan plin-plan dan mencla-mencle, langkah partai berlambang Kepala Banteng ini, yang tetap ngotot agar proses

pembentukan Pansus Bulog ini ditunda sampai bulan Mei mendatang sambil menunggu proses hukum yang tengah berjalan, mencerminkan sikap kehati-hatian.

Kehati-hatian ini didorong oleh posisi PDIP yang berada pada ruang dilematis sehingga sangat sulit untuk mengambil langkah tegas.

Di satu sisi, jika PDIP mendukung pembentukan Pansus Bulog II, maka kekhawatiran yang timbul adalah rusaknya aliansi strategis PDIP-Partai Golkar yang dibangun sejak pembentukan Pansus Bulog I yang berhasil menaikkan Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid.

Oleh karena itu, apabila PDIP mendukung pembentukan Pansus Bulog II, kelangsungan hidup pemerintahan Mega-Hamzah akan terancam karena partai Golkar akan melakukan kritik tajam terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan berencana "buka kartu" praktik korupsi partai-partai besar, termasuk PDIP. Padahal, PDIP adalah juru kunci jadi tidaknya pembentukan Pansus Bulog II.

Disisi lain, jika PDIP mengambil sikap tegas menolak pembentukan Pansus Bulog II, taruhannya adalah bahwa publik akan menilai sikap PDIP itu sebagai pengkhianatan agenda reformasi yang dapat berbuntut pada krisis kepercayaan publik. Selain itu, mahasiswa sebagai lokomotif arus reformasi total akan merasa dikecewakan terhadap keputusan itu yang pada akhirnya akan bermuara pada merosotnya popularitas Megawati sebagai presiden.

Kekhawatiran akan timbulnya krisis legitimasi publik sangat menghantu langka anggota PDIP di DPR.

Posisi dilematis ini kian menjerit ketika Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP secara diam-diam menolak tegas pembentukan Pansus Bulog II dan akan mengancam menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PDIP apabila instruksi ini tidak diindahkan oleh fraksi PDIP di Parlemen.

Oleh karena itu, sikap PDIP yang dua kali menunda pembentukan Pansus Bulog II dapat dibaca dan dipahami dari logika pemikiran ini.

KESEPAKATAN semua fraksi di DPR untuk menunda pembentukan Pansus Bulog II hingga bulan Mei mendatang akan dapat menimbulkan implikasi politik yang dalam di lapisan rakyat bawah atau grass root.

Meletusnya konflik horizontal di

tingkat akar rumput antara massa pendukung dan penolak pembentukan Pansus Bulog II sangat mungkin terjadi di berbagai daerah. Hal ini sudah terbukti dari bentrokan massa di Makassar, Sulawesi Selatan, berkaitan rencana pembentukan Pansus Bulog II.

Di samping itu, penundaan pembentukan Pansus Bulog II ini dapat dijadikan momen yang tepat bagi para provokator untuk memprovokasi pihak-pihak yang berkepentingan guna melakukan tindakan-tindakan destruktif. Apabila ini terjadi, yang akan menanggung kerugian secara langsung adalah rakyat sendiri. Padahal, meledaknya gejolak sosial di masyarakat akan dijadikan alibi oleh elit-elit politik untuk menggagalkan pembentukan Pansus Bulog II.

Oleh karena itu, semua pihak perlu mewaspadai gejala ini sehingga kejadian menegangkan dan kerusuhan sosial yang mewarnai perjalanan Pansus Bulog I tidak terulang lagi pada pembentukan Pansus Bulog II kali ini.

Kita semua tentu yakin bahwa dalam hati nurani sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan pembentukan Pansus Bulog II sebagai instrumen politik untuk memback up proses hukum guna memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merupakan bagian dari agenda reformasi total. Pansus Bulog II apabila terbentuk dapat dijadikan "entry point" dalam mengungkap praktik korupsi partai politik besar lainnya.

Jika ini terwujud, Bulog akan menjadi sentral sejarah pemberantasan korupsi di negeri paling korup se Asia ini. Betapa tidak, sebagai sebuah lembaga pangan yang jauh dari kehidupan politik, namun sangat potensial dijadikan ajang bisnis kepentingan sehingga menimbulkan praktik korupsi, mulai dari kasus tukar guling (*ruilslag*) Goro Batara Sakti dengan Bulog yang melibatkan Tommy Soeharto dan Ricardo Gelael, kasus dana Yanatera Bulog sebesar 35 miliar rupiah oleh Sapuan dan melengserkan Gus Dur dari kursi kepresidenan dihantam Pansus Bulog I, sampai dengan kasus dana nonbudgeter Bulog yang melibatkan mantan menteri Sekretaris Negara, Akbar Tanjung.

Bulog telah menorehkan sejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai lembaga non politik tapi jadi ajang politik dan "sapi perahan" elit partai politik dan para pejabat pemegang kekuasaan.

Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan apabila negeri ini kita namakan dengan "Republik Bulog". (*)

Agus Subagyo, mahasiswa S-2 Ilmu Politik UGM, peneliti pada pusat Studi Perubahan Sosial dan Politik (PS-PSP) UMY, CDMS Yogyakarta

Etos Kerja, Korsel dan Piala Dunia 2002

AGUS SUBAGYO

BERBICARA mengenai etos kerja, kita semua harus memberikan perhatian serius dan mendalam pada Korea Selatan.

Negara yang terletak di kawasan Asia Timur ini telah membuktikan diri pada dunia luar bahwa kunci keberhasilan pembangunan yang digalakkan oleh negara manapun adalah etos kerja. Sumber daya manusia yang didasarkan pada etos kerja tinggi merupakan karakteristik utama yang melekat pada Korea Selatan.

Dengan etos kerja tinggi itu, negeri Ginseng ini berhasil menjadi tuan rumah perhelatan akbar pesta olahraga dunia selama dua kali. Pertama, Korea Selatan berhasil ditunjuk menjadi penyelenggara Olimpiade olahraga dunia tahun 1988 yang dipusatkan di kota Seoul. Padahal, jika ditengok dari klasifikasi atau peringkatnya, Korea Selatan merupakan bagian dari negara sedang berkembang. Tapi, Korea Selatan mampu dan sukses menyelenggarakan event olahraga berskala global itu.

Kedua, Korea Selatan berhasil ditunjuk dan dipercaya oleh masyarakat sepakbola dunia untuk menjadi tuan rumah dan penyelenggara Piala Dunia (World Cup) 2002 bersama-sama dengan Jepang. Padahal, secara ekonomi Korea Selatan baru saja didera oleh krisis moneter Asia. Tapi, dengan semangat kerja yang tinggi, Korea Selatan berhasil memulihkan itu semua dengan cepat. Mulai tanggal 31 Mei 2002, seluruh mata dunia tertuju pada Korea Selatan dan Jepang untuk menyaksikan event sepakbola akbar empat tahunan ini.

DITUNJUKNYA Korea Selatan sebagai penyelenggara Piala Dunia 2002 bersama dengan Jepang bukan merupakan kejadian yang tiba-tiba.

Kualifikasi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia sangat ketat, khususnya ekonomi yang kuat. Keberhasilan pembangunan ekonomi Korea Selatan bukan datang secara tiba-tiba dari langit, tapi merupakan buah kerja keras dan perjuangan yang gigih.

Dalam waktu kurang dari empat dasawarsa, Korea Selatan berhasil mengikis

dampak penjajahan Jepang yang destruktif serta penghancuran pada masa perang Korea 1950-1953. Meskipun dalam kondisi yang sangat miskin dengan sumber daya terbatas, Korea Selatan telah berhasil menunjukkan diri sebagai negara industri baru (NICs, *Newly Industrializing Countries*) pada pertengahan tahun 1980-an.

Selain itu, sejak 30 September 1986, Korea Selatan telah masuk menjadi salah satu anggota OECD, organisasi ekonomi maju. Prestasi ekonomi ini telah menempatkan Korea Selatan pada urutan ke-12 negara maju di dunia.

Pada tahun 1995, GNP perkapita Korea Selatan telah melewati batas 10.000 dolar AS, yang berarti meningkat drastis 122 kali lipat dibandingkan level tahun 1961 yang hanya 82 dolar AS. Di sektor pendapatan, GNP Korea Selatan pada tahun 1995 telah melampaui 440 miliar dolar AS yang berarti meningkat hampir 220 kali dari sekitar 2 miliar dolar AS pada tahun 1961.

Dengan kemajuan ekonomi yang begitu pesat itu, tidak salah jika Alice H. Amsden (1989) memproyeksikan Korea Selatan sebagai "raksasa Asia berikutnya".

Meskipun pada pertengahan tahun 1997 Korea Selatan mengalami krisis ekonomi, tapi dengan cepat Korea Selatan berhasil keluar dari krisis ekonomi. Bahkan, pasca krisis ekonomi Korea Selatan berhasil dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2002. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan telah sukses menstabilkan perekonomiannya sehingga mampu mempersiapkan diri membangun sepuluh stadion megah berskala internasional.

BERBAGAI kemajuan dan prestasi membanggakan yang disandang oleh Korea Selatan menimbulkan pertanyaan seputar apa resep di balik itu semua.

Ternyata jika ditelusuri lebih jauh, faktor sumber daya manusia menempati posisi kunci. Sudah diketahui bahwa penduduk Korea Selatan tergolong paling tinggi tingkat literasinya setelah Jepang

di Asia. Investasi yang tinggi dalam pendidikan dan sumber daya manusia berperan penting dalam mendukung proses industrialisasi dana modernisasi Korea Selatan.

Meminjam istilah dari seorang psikolog sosial, David McClelland, masyarakat Korea Selatan memiliki dorongan untuk berprestasi (N-Ach, *The Need for Achievement*) yang sangat tinggi. N-Ach yang tinggi ini juga didukung pula oleh nilai dan semangat konfusianisme. Inilah yang membedakan Korea Selatan dari negara berkembang lainnya, yakni pengutamaan pada dimensi manusianya (*people dimension*), semangat dan kerja keras (*work hard*), kemandirian (*self reliance*), dan etos kerjanya.

Tampaknya, psikologi sosial yang ada di masyarakat Korea Selatan yang sangat homogen turut mempercepat proses pembangunan ekonomi. Usaha masyarakat secara material dan spiritual yang sedemikian menyatu (*unified*) merupakan aset yang sangat penting dalam keberhasilan ekonomi Korea Selatan, yang jarang ditemui di negara lain.

Etos kerja masyarakat Korea Selatan telah memainkan peranan besar bagi prestasi Korea Selatan. Keberhasilan Korea Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002 tidak dapat dilepaskan dari faktor etos kerja dan N-Ach yang tinggi dalam sanubari masyarakat Korea Selatan.

APA yang dapat kita ambil dan pelajari dari kisah sukses Korea Selatan ini?

Membayangkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia di masa mendatang sebagaimana Korea Selatan merupakan angan-angan yang sangat jauh dari kenyataan. Bukannya pesimis, tapi jika dilihat dari kondisi ekonomi bangsa Indonesia yang carut marut saat ini, keinginan untuk itu terkesan sangat utopis.

Meskipun Indonesia mempunyai banyak karakteristik persamaan dengan Korea Selatan, seperti karakteristik historis, geo-ekonomi, struktur pemerintahan, pengadopsian teori pembangunan, dan

sama-sama diterpa oleh krisis ekonomi, namun perbedaan menonjol dari kedua negara ini adalah karakteristik etos kerja dan N-Ach. Etos kerja Korea Selatan sangat tinggi dibandingkan dengan Indonesia.

Padahal aspek etos kerja menempati posisi krusial dalam proses pembangunan. Sebaik apapun ekonomi sebuah negara, tapi jika tidak didukung oleh etos kerja yang tinggi dari masyarakatnya niscaya akan mengalami kehancuran, cepat atau lambat. Korea Selatan telah membuktikan. Mungkin pula jika dipandang dari sudut pandangan ini dapat dikatakan secara sederhana bahwa aspek etos kerja merupakan kunci sekaligus jawaban atas masalah mengapa Korea Selatan lebih cepat keluar dari krisis ekonomi dibandingkan dengan Indonesia.

Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan jika kita semua perlu bercermin untuk belajar pada negeri Ginseng ini.

Prestasi ekonomi yang telah dicapai oleh Korea Selatan telah membawa negaranya pada pencapaian prestasi olahraga yakni menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002. Tentunya, Korea Selatan tidak "gagap" dalam mempersiapkan event bergengsi ini mengingat jauh sebelumnya, negara ini telah pula dijadikan ajang pesta olahraga dunia, Olimpiade 1988.

Dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002, banyak sekali keuntungan yang akan diperoleh negeri Ginseng ini terutama keuntungan di sektor ekonomi, pariwisata, dan hiburan lainnya. Aliran devisa berupa dolar akan membanjiri Korea Selatan yang tentunya akan menambah cadangan devisa dan penopang pembangunan ekonomi-industri.

Kunci sukses dari itu semua adalah faktor etos kerja yang tinggi. Karenanya, apabila bangsa Indonesia ingin ekonominya kuat dan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia, kunci utamanya adalah N-Ach dan etos kerja yang tinggi. Tanpa itu, segala angan-angan hanya akan jadi utopia. (*)

Agus Subagyo, mahasiswa Ilmu Politik Konsentrasi Politik Internasional, Pascasarjana UGM

Satu Tahun Tragedi WTC 11 September 2001

Oleh AGUS SUBAGYO

KALAU anda bukan teman saya, pasti lah anda musuh saya. Saya tidak membedakan terorisme dengan negara yang melindungi terorisme. Itulah kira-kira pemikiran yang saat ini bercokol dibenak presiden AS, George W. Bush, dalam menghadapi kelompok-kelompok terorisme global dan negara-negara yang dianggap melindungi dan memberikan fasilitas bagi praktek-praktek terorisme global. Pemikiran yang sangat subyektif ini telah mengkristal menjadi sebuah doktrin dan dijadikan sebagai patokan dalam upaya memerangi aksi terorisme global.

Tampilan politik luar negeri AS pasca tragedi WTC dan Pentagon memang menunjukkan perubahan yang sangat mendasar. AS sangat represif, ofensif dan reaktif terhadap negara-negara yang dianggap membahayakan bagi perdamaian dunia dan mengancam keamanan global. Atas nama gerakan antiterorisme global, AS kerap kali menuduh, mencup, dan menetapkan

negara-negara yang terlibat dalam jaringan terorisme global sebagai musuh yang harus diperingi. Ini bisa dilihat dari renitan pernyataan Bush yang cenderung menyudutkan beberapa negara seperti Irak, Iran dan Korea Utara yang dituduh sebagai poros kejahatan, serta Rusia, Cina, Korea Utara, Irak, Iran, Libia dan Suriah yang dituduh telah mengembangkan senjata pemusnah massal.

Bukan itu saja, kampanye antiterorisme AS yang disertai tekanan-tekanan politik telah menciptakan ketidakharmonisan kawasan. Di Asia Tenggara, kehadiran pasukan AS di Filipina, pernyataan menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew, yang menuduh Indonesia sebagai sarang teroris, dan isu kehadiran pasukan AS di Indonesia telah memunculkan ketegangan-ketegangan baru masing-masing negara. Di Asia Timur, proses reunifikasi dua Korea juga mengalami hambatan karena berbagai pernyataan Bush yang mendiskreditkan Korea Utara. Di Timur Tengah, rencana AS menyerang Irak dan konflik berkepan-

jangnan antara Israel-Palestina telah menciptakan keresahan di kawasan paling panas di dunia ini.

Doktrin Bush telah membelah dunia menjadi dua bagian yang terpisahakan, yakni antara ikut kubu AS memerangi terorisme global atau ikut mendukung terorisme Global. Negara-negara di dunia dihadapkan pada pilihan sulit dan mau tidak mau harus memilih diantara keduanya. Suasana politik yang demikian mengingatkan kita pada masa Perang Dingin dimana dunia terbelah menjadi dua blok: Komunis dan Kapitalis. Batas dan ukuran suatu negara dianggap teman atau musuh ditentukan oleh dua ideologi tersebut. Saat ini pun, hubungan antar bangsa dikondisikan oleh doktrin Bush pada batas-batas terorisme global. Doktrin Bush telah membentangkan garis pembatas antara zona anti teroris dan zona teroris.

Kembali ke High Politics
Doktrin Bush yang memprioritaskan pada upaya memerangi terorisme global dalam setiap langkah kebijakan politik lu-

siaian, perdamaian, dan stabilitas internasional.

Makna yang bisa diambil dari perubahan-perubahan besar politik dunia ini adalah terjadinya arus balik orientasi dan isu high politics yang mencakup kajian militer, keamanan, dan perang. Pada masa perang Dunia II dan perang Dingin, orientasi dan isu high politics sangat menonjol. Namun, berakhirnya Perang Dingin bergeser menjadi low politics yang mencakup ekonomi, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di awal abad ke-21 ini, kembali ke high politics. Hal ini dipicu oleh serangan teroris ke Gedung WTC dan Pentagon, 11 September tahun lalu. Ditambah lagi dengan doktrin Bush yang sangat kontroversial itu.

Realisme politik yang selama ini mengjiwai kebijakan politik luar negeri AS mulai mendapatkan penantangannya yang baru. Terorisme global telah membangkitkan kembali ideologi politik realis AS. Sebagai polisi Dunia, AS pun ingin menunjukkan bahwa dirinya memang benar-benar seba-

ar negeri AS, secepat kilat mendorong isu terorisme menjadi isu global di awal abad ke-21 ini, mengalahkan isu-isu yang sebelumnya mendominasi tatanan politik global seperti demokrasi, hak asasi manusia, good governance, dan lingkungan hidup. Isu terorisme telah mencuat ke permukaan sehingga sangat mempengaruhi dan mewarnai konstelasi politik dunia.

Sebagai sebuah isu global masa kini, terorisme membawa isu-isu ikutan lainnya yang sebelumnya telah terbenam seiring dengan berakhirnya perang Dingin. Isu-isu ikutan itu adalah militerisme, senjata nuklir, dan perang. Peran militer sangat dibutuhkan untuk menumpas terorisme global. Senjata nuklir yang sangat membahayakan keselamatan umat manusia mulai diperbincangkan untuk menghancurkan kelompok terorisme global dan negara yang melindunginya. Perang mulai dibarkan dengan legitimasi melawan aksi terorisme global. Isu-isu seputar terorisme global yang mengemuka akhir-akhir ini tentunya sangat membahayakan kemanu-



gai penjaga perdamaian dunia dengan menggalang koalisi internasional memerangi terorisme global.

Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan untuk membasmi basis-basis terorisme global, termasuk menyerang negara yang dinilai memberikan fasilitas pada aksi-aksi terorisme global sebagaimana yang telah dilakukannya pada rezim Thalib di Afghanistan yang melindungi Osama bin Laden dan jaringan Al Qaeda. Tentu saja, kebijakan kontroversial ini kerap kali memancing kemarahan negara-negara yang merasa dipojokan, dan menilai AS sangat arogan karena kebijakannya itu dapat melanggar kedaulatan negara dan menancam nilai-nilai hak asasi manusia.

Anarkisme Internasional

Kini tidak terasa telah satu tahun berlalu tragedi WTC dan Pentagon. Dalam hitungan satu tahun itu, berbagai perubahan mendasar telah terjadi, khususnya sorotan masyarakat internasional terhadap langkah

(Bersambung ke hlm 19 klm 6)

Satu Tahun Tragedi

(Sambungan dari hal 18 kol 9)

dan tindakan AS dalam memerangi terorisme global yang dinilai sangat berbau balas dendam. Derasnya kritikan dan kecaman terhadap langkah AS dalam memerangi tindakan terorisme global menunjukkan keresahan sebagian besar negara-negara di dunia. Mereka menilai bahwa gerakan antiterorisme global yang dicanangkan AS sangat bias akan kepentingan nasionalnya sendiri.

Kekhawatiran terhadap langkah AS ini sangat beralasan mengingat ada kecenderungan bahwa AS memanfaatkan gerakan antiterorisme untuk menghajar musuh-musuh bebuyutannya, seperti Irak, Iran, Korea Utara, dan Libia. Di samping itu, cara-cara yang dilakukan AS menangani terorisme sangat tidak mengindahkan nilai-nilai hak asasi manusia dan cenderung menekankan pendekatan militer ketimbang upaya-upaya dialog.

Apabila hal ini terjadi secara terus menerus, niscaya akan terjadi anarkisme internasional. Artinya, arogansi

AS akan menimbulkan resistensi dan radikalisme kelompok-kelompok massa di negara-negara yang dirugikan. Dan jika negara-negara tersebut melakukan perlawanan, yang terjadi kemudian hanyalah kekacauan dunia. Dalam situasi yang serba anarkis, setiap negara adalah serigala bagi negara-negara lain alias homo homini lupus, yang kemudian mendorong masing-masing negara melakukan self preservation. Upaya mempersenjatai diri inilah yang akan melahirkan anarkisme internasional.

Gejala ini sangat jelas mewarnai perilaku negara-negara di dunia. Beberapa negara yang anti AS telah mengembangkan senjata pemusnah massal dan mencoba meramu senjata kimia dan biologi. AS pun kebingungan dan ketakutan menghadapi hal tersebut. Karenanya, AS menuduh mereka sebagai teroris. Padahal, definisi terorisme sendiri masih mengalami perdebatan dan kerancuan. Sentimen anti AS pun

bermunculan dimana-mana.

Ancaman penyerangan pasukan militer AS ke Irak yang kian hari semakin santer dikumandangkan merupakan contoh tepat arogansi AS dalam memanfaatkan kata 'terorisme' sebagai alat untuk menghancurkan musuhnya. Irak yang selama ini dianggap membangkang terhadap AS, dijadikan sasaran kedua untuk diserang setelah sebelumnya menyerang dan menghancurkan rezim Thaliban di Afghanistan. Nampaknya, AS akan mendongkel kekuasaan rezim Sadam Husein dan menggantikannya dengan pemerintahan yang pro AS, sebagaimana yang telah dilakukannya di Afghanistan.

Oleh karena itu, agar supaya tidak terjadi gesekan-gesekan kepentingan masing-masing negara dalam memberantas terorisme global, diperlukan sebuah formula yang komprehensif. Artinya, dibutuhkan perumusan konsep untuk menangkal terorisme global secara bersama-sama tanpa bias kepentingan dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan kedaulatan negara, serta berusaha menghindari arogansi AS sebagai komandan gerakan antiterorisme.

Dengan demikian, masing-masing negara dengan disponsori oleh PBB seharusnya mencetuskan sistem penanganan dan pengelolaan yang dapat menangkal terorisme global (Global Antiterrorism Governance). Setelah itu, PBB harus mengambil alih tongkat komando dalam perang melawan terorisme sehingga sepak terjang AS dapat dikontrol alias dibatasi.

Selain itu, pengelolaan dan penanganan masalah terorisme secara global harus bertumpu pada pendekatan dialog dan, walaupun memakai cara-cara militer, harus didiskusikan secara mendalam dalam forum PBB sehingga tidak menimbulkan kritik dan resistensi dari berbagai pihak. Dengan begitu, diharapkan gerakan anti terorisme global mendapat dukungan semua negara dan pada akhirnya, praktek-praktek terorisme global dapat dicegah sedini mungkin.***

Penulis adalah Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani (UN-JANI) Bandung dan Alumnus Pascasarjana Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Internasional UGM Yogyakarta.

AS, Irak, dan Ancaman Perang Teluk

Oleh AGUS SUBAGYO

RUPANYA keinginan AS untuk melakukan operasi penyerangan terhadap Irak tidak main-main. Setidaknya hal ini bisa diamati dari langkah-langkah strategis AS dalam menggalang dukungan, baik dukungan domestik maupun internasional.

Secara domestik, AS dengan getol melakukan serangkaian pertemuan dan lobi-lobi dengan kalangan anggota parlemen untuk meyakinkan bahwa serangan militer ke Irak merupakan suatu keharusan. Selain itu, pemerintahan George W. Bush juga membangun opini publik kepada rakyatnya bahwa rencana penyerangan militer AS ke Irak dilakukan dalam rangka memerangi terorisme global. Dalam hal ini, Irak dipandang sebagai negara yang memproduksi senjata pemusnah massal yang diduga akan digunakan dalam aksi-aksi terorisme di seluruh dunia.

Sementara secara internasional, AS berupaya mendapatkan dukungan dari negara-negara sekutunya. Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru adalah negara-negara yang dimintai dukungan untuk membantu memberikan dukungan terhadap rencana serangan militer tersebut. Disamping itu, secara sistematis AS juga melakukan kontak-kontak telepon dengan negara-negara kunci di Dewan Keamanan (DK) PBB, seperti Rusia, Perancis, dan Cina yang dianggap AS sebagai negara-negara yang penting dukungan suaranya untuk dijadikan "modal" dan legitimasi dalam rangka operasi penyerangan militer terhadap Irak. Jauh sebelum kontak-kontak dan lobi-lobi yang dilakukan Presiden Bush terhadap negara-negara sekutunya dan negara-negara anggota tetap DK PBB, ia juga telah pernah mengirimkan utusan khususnya, Dick Cheney, yang juga Wapres AS, untuk mencari dukungan ke negara-negara Timur Tengah.

Selain itu, AS juga secara gencar membangun opini publik dunia bahwa Irak harus diserang dan rezim militer Saddam Husein harus digulingkan karena pemerintah Irak dianggap tidak kooperatif dan menolak tim inspeksi PBB (United Special Nations Commission, UNSCOM) masuk ke wilayah-wilayah Irak yang diduga mengembangkan senjata penghancur massal yang akan digunakan sebagai alat untuk melakukan teror terhadap dunia internasional. Menurut Bush, AS akan menghentikan rencana serangan militer ke Irak apabila UNSCOM diizinkan dan diberi kewenangan penuh oleh Irak untuk masuk dan memeriksa daerah-daerah yang diduga sebagai basis in-

dustri senjata kimia dan biologi.

Penolak dan pendukung serangan

Lalu, apa hasil dari upaya pencarian dukungan yang dilakukan oleh AS itu? Tampaknya, sampai saat ini, hanya Inggris, satu-satunya negara yang secara eksplisit dan bulat mendukung kebijakan Presiden Bush ini. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan PM. Inggris, Tony Blair, setelah bertemu dengan Presiden Bush di Camp David, beberapa waktu lalu. Blair mengatakan bahwa Inggris siap di belakang AS dalam operasi penyerangan terhadap Irak, sedangkan Australia dan Selandia Baru masih bersikap hati-hati dalam menyikapi tawaran Bush ini. Kelihatannya kedua negara ini masih bersikap *wait and see*.

Sementara itu, negara-negara yang menolak dengan tegas rencana operasi penyerangan AS terhadap Irak adalah Perancis, Rusia, dan Cina. Ketiganya adalah anggota tetap DK PBB. Ketiga negara ini kemudian melontarkan alasan penolakan bahwa tindakan AS tersebut akan me-

mancing timbulnya gejolak politik kawasan dan terganggunya perekonomian regional-global. Alasan ketiga negara besar ini sangat logis mengingat sebagian besar negara-negara Arab dan Timur Tengah juga menolak serangan AS terhadap Irak. Sebagian besar negara-negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa pun menolak dengan tegas rencana penyerangan AS tersebut. Bahkan, negara-negara Arab bersepakat untuk tidak akan memberikan akses wilayah dan fasilitas terhadap pasukan militer AS dalam menghukum Irak. Lebih dari itu, mereka juga mengancam akan memberlakukan embargo minyak apabila operasi militer AS dimulai. Singkatnya, mayoritas negara-negara dunia menolak rencana AS:

Pada umumnya, negara-negara yang menolak operasi serangan militer AS menyatakan bahwa tindakan AS itu dianggap sebagai aksi balas dendam yang melanggar hukum internasional. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa jika kebijakan AS tersebut tidak mendapat persetujuan PBB, AS telah melanggar aturan-aturan internasional. Oleh karena itu, sebaiknya rencana penyerangan terse-

but dipikirkan terlebih dahulu dan didiskusikan secara mendalam dalam forum PBB untuk mendapatkan persetujuan dan legitimasi.

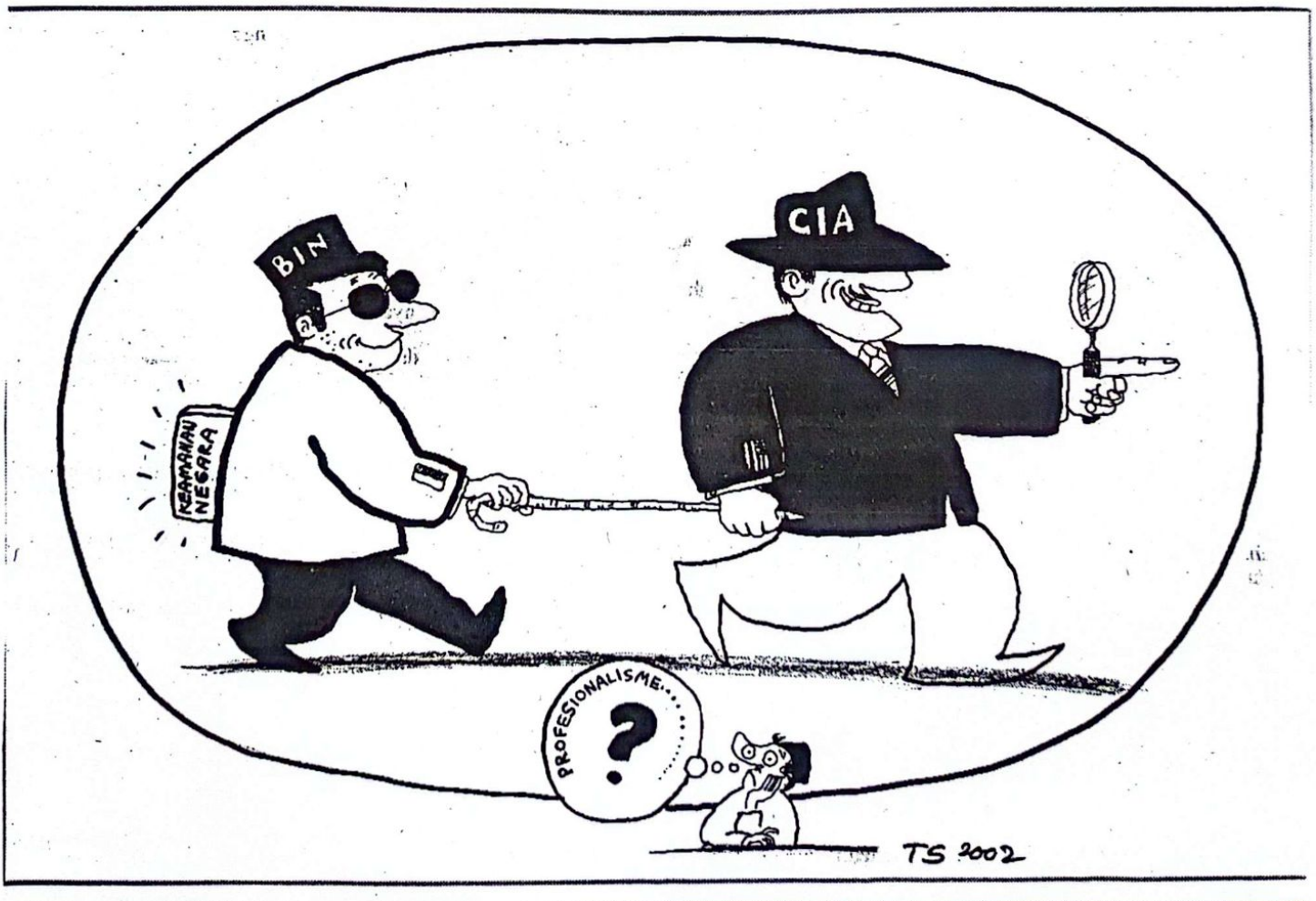
Beda persepsi

Bila diamati lebih seksama, ketegangan dan konflik antara AS dengan Irak lebih disebabkan oleh perbedaan persepsi atau pandangan masing-masing negara. Persepsi yang dikonstruksi oleh AS dan Irak memang sejak awal sudah berbeda dan bertentangan. Di satu sisi, dalam persepsi AS, Irak dipersepsikan sebagai negara yang selalu membangkang dan menghambat setiap kebijakan luar negeri AS. Pembangkangan yang dilakukan oleh Irak ini berawal ketika pecahnya Perang Teluk II. Dalam hal ini, Irak dipaksa keluar dari wilayah Kuwait oleh tentara sekutu pimpinan AS karena dianggap melakukan invasi terhadap Kuwait. Sejak itu, AS mulai melakukan embargo ekonomi dan persenjataan terhadap Irak. AS juga memberlakukan zona larangan terbang di Irak bagian utara dan selatan. Terakhir, Irak dituduh oleh AS telah memproduksi senjata kimia dan biologi yang sangat rawan digunakan sebagai senjata pemusnah massal. Kebencian AS semakin mengkristal

karena Irak diduga telah menjalin hubungan dengan jaringan terorisme global, Al Qaeda. Konstruksi persepsi yang demikian inilah yang membuat AS semakin agresif merencanakan untuk menyerang Irak.

Di sisi lain, dalam persepsi Irak, AS dipersepsikan sebagai negara yang intervensionis, imperialis, dan selalu menggunakan standar ganda dalam setiap politik luar negerinya. AS dipersepsikan oleh Irak sebagai negara yang mem-back up kolonialisme dan imperialisme Yahudi Israel di Palestina. Di samping itu, dalam pandangan Irak, AS adalah pelopor kapitalisme global yang sangat menyengsarakan negara sedang berkembang. Persepsi tersebut telah menciptakan sikap antipati masyarakat Irak terhadap AS.

Konstruksi persepsi yang saling berlawanan ini melahirkan rasa dan sikap saling curiga, benci, dan antipati antarmasing-masing negara. Sebagai contoh adalah pandangan yang kontradiktif antara AS dan Irak dalam melihat tim UNSCOM. Bagi AS, tim UNSCOM merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui secara pasti apakah Irak benar-benar membangun industri senjata pemus-



nah massal atau tidak. Namun bagi Irak, tim UNSCOM dipandang hanya merupakan alat kepentingan AS untuk menjustifikasi bahwa Irak telah memproduksi senjata pemusnah massal. Kecurigaan Irak ini didasari oleh adanya fakta pada tahun 1998 ketika tim UNSCOM diizinkan masuk ke Irak. AS secara tiba-tiba menggempur basis-basis pertahanan Irak. Kejadian ini mendorong Irak untuk selalu waspada terhadap tim UNSCOM yang dianggap Irak diboncengi kepentingan AS.

Dalam kondisi kritis seperti itu, sebenarnya peran PBB diperlukan untuk menengahi konflik dan menyamakan persepsi kedua negara. Sebagai lembaga internasional, PBB seharusnya menjadi mediator untuk memfasilitasi upaya-upaya dialog kedua negara sehingga tercipta persamaan persepsi yang berguna bagi peredaan ketegangan dan konflik. Tidak seperti sekarang ini, PBB malah terkesan kurang responsif dan pasif dalam menyikapi konflik yang mengarah pada pecahnya Perang Teluk III ini.

Secara lebih detail, ada beberapa upaya dan langkah strategis yang dapat dilakukan oleh PBB guna meredakan konflik dan mencari solusi sehingga ancaman terjadinya perang dapat dihindarkan. Pertama, PBB harus memprakarsai sebuah pertemuan yang dapat mempertemukan wakil-wakil dari AS dan Irak untuk duduk bersama dalam meja perundingan dibawah kerangka PBB. Kedua, dalam pertemuan tersebut diupayakan tercipta persepsi yang sama sehingga akan terbangun rasa saling percaya antarkedua negara. Rasa saling percaya ini sangat penting sebagai modal awal untuk masuk dan membicarakan persoalan yang diperdebatkan. Ketiga, memfokuskan pembicaraan pada persoalan tim UNSCOM yang diberi mandat untuk memeriksa wilayah-wilayah Irak yang dianggap dijadikan basis industri pemusnah massal.

Sementara itu, tindakan penyerangan pendahuluan yang dilakukan oleh AS dan Inggris seharusnya segera dihentikan karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Dikatakan demikian karena legitimasi formal sebagai landasan penyerangan itu tidak ada. PBB belum memberikan "restu" pada AS untuk menyerang Irak. Terlebih lagi, kenyataan pahit harus diterima oleh AS karena negara-negara anggota tetap DK PBB seperti Rusia, Cina, dan Perancis menolak serangan AS. Padahal, sikap penolakan ketiga negara ini akan sangat mempengaruhi upaya pencarian dukungan AS di PBB.

Nampaknya, AS harus segera disadarkan oleh masyarakat internasional melalui mekanisme PBB. Bahwa setting global saat ini berbeda dengan konteks global masa lalu ketika Perang Teluk II meletus. Pada masa Perang Teluk II tahun 1990 meletus, AS berada di atas angin karena mendapat mandat dari PBB, sekutu-sekutunya, dan negara-negara Arab. Akan tetapi saat ini, setting global telah mengalami perubahan ketika hanya Inggris saja yang mendukung AS. Oleh karena itu, dapat diprediksikan bahwa rencana operasi penyerangan militer AS terhadap Irak akan mengalami hambatan serius, baik secara substansi dan legitimasi maupun secara teknis-operasional. ***

Penulis adalah Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi dan Alumnus Pascasarjana Ilmu Politik, Konsekrasi Politik Internasional UGM Yogyakarta.

Teritorial TNI di Era Otonomi Daerah

Oleh Dr. SUTEJO ATMOWASITO & AGUS SUBAGYO, S.IP., M.Si.

MEMBICARAKAN hubungan ideal sipil-militer di Indonesia selalu menarik dan relevan, terutama sejak runtuhnya rezim orde baru pada 21 Mei 1998. Bersamaan runtuhnya rezim represif Soeharto, tumbuh pula dominasi militer dalam politik di Indonesia. Pada masa transisi dari *otoritarianisme* ke demokrasi yang sedang berjalan saat ini, banyak sekali serangkaian kritikan dan hujatan yang ditujukan terhadap ABRI atas peran yang dilakukannya selama 32 tahun dalam menopang kekuasaan rezim Soeharto. Kritik dan hujatan tersebut semuanya bermuara pada tuntutan agar ABRI menanggalkan Dwifungsinya. Artinya, ABRI dituntut untuk kembali ke barak (*back to basic*), tidak terjun ke kancah politik praktis dan hanya memainkan peran sebagai alat pertahanan negara dari ancaman eksternal.

Paradigma baru TNI

Di tengah kritik dan hujatan yang datang, baik dari dalam maupun luar ABRI, pada pertengahan tahun 1998, ABRI menjawabnya dengan melontarkan konsepsi redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran ABRI dalam kehidupan berbangsa dan bermegara. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu wujud reformasi internal ABRI karena di dalamnya diperkenalkan empat paradigma baru ABRI, yaitu *pertama*, ABRI akan mengubah posisi dan metode tidak harus selalu berada di depan. *Kedua*, ABRI mengubah konsep dari menduduki menjadi memengaruhi. *Ketiga*, ABRI ingin mengubah cara-cara memengaruhi dari secara langsung menjadi tidak langsung, dan *keempat*, ABRI bersedia melakukan *role sharing* atau kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kebangsaan dan kenegaraan dengan komponen bangsa lainnya.

Untuk menindaklanjuti empat konsepsi paradigma ABRI di atas, secara *gradual* ABRI melakukan langkah-langkah reformasi internal strategis. Dimulai dari perubahan nama ABRI menjadi TNI pada tanggal 1 April 1999, pemisahan TNI-Polri berdasar Tap MPR No. VII/MPR/2000, tidak digunakannya hak pilih TNI/Polri dalam pemilu 2004 mendatang, sampai dengan keputusan keluar dari DPR/MPR pas-capemilu 2004. Selain itu, TNI juga melakukan re-

visi piranti lunak berbagai doktrin TNI disesuaikan dengan era reformasi dan peran TNI di abad ke-21.

Dengan melihat serangkaian reformasi internal yang dilakukan secara sistematis oleh TNI tersebut, apakah publik kemudian merespons dengan positif? Pada umumnya kalangan publik menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh TNI patut diberikan apresiasi karena dengan ksatria dan legawa, TNI sangat responsif dalam menanggapi perubahan politik domestik maupun global. Namun, tidak sedikit kalangan publik yang mengatakan bahwa masih ada "sisa-sisa" reformasi TNI yang belum dilaksanakan, yakni terkait dengan peran dan fungsi teritorial TNI.

Fungsi teritorial TNI sebagai "Gray Area"

Seperti diketahui, konsep fungsi teritorial TNI memiliki dua dimensi penting. *Dimensi pertama* adalah operasional militer dalam arti fungsi pertahanan. Fungsi ini telah secara eksplisit tertuang dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 yang intinya menyerahkan aspek pertahanan ke dalam domain Pemerintah Pusat. *Dimensi kedua* adalah fungsi pembinaan dan pendayagunaan potensi di daerah untuk mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Pada dimensi inilah sebenarnya Pemerintah Daerah dapat berperan dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

Yang menjadi masalah dari dua dimensi di atas adalah dimensi yang terakhir, yakni dimensi pembinaan dan pendayagunaan potensi di daerah. Titik masalah berkisar pada siapa atau lembaga apa yang berhak diserahkan tugas mengelola pembinaan dan pendayagunaan potensi di daerah. Memang, selama ini fungsi teritorial di daerah menjadi urusan TNI. Namun, sejalan dengan diberlakukannya UU No. 22/Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tidak jelas dan menjadi wilayah abu-abu (*gray area*). Masih menjadi perdebatan apakah fungsi teritorial TNI menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau kewenangan struktur teritorial TNI.

Padahal, apabila fungsi teritorial tersebut diserahkan kepada salah satu pihak dari ketiga pihak di

atas, akan ada kelemahan-kelemahannya. Jika diserahkan ke Pemerintah Daerah, persoalannya adalah apakah dengan sumber daya yang dimiliki saat ini, Pemerintah Daerah sudah siap mengemban dan mengelola fungsi strategis tersebut. Kemudian jika diserahkan ke Pemerintah Pusat, akan terkesan sentralistik seperti model Orde Baru, yang tentunya akan mengundang kritikan publik. Apabila diserahkan kembali ke TNI, dikhawatirkan akan dijadikan alat kepentingan politik tertentu sebagaimana telah terjadi pada rezim Orde Baru.

Problem dilematis ini semakin rumit karena munculnya perdebatan ikutan lainnya, yakni pro-kontra yang berkembang di masyarakat maupun di internal TNI sendiri atas keberadaan komando teritorial (Koter) TNI di berbagai daerah. Sebagian kalangan mengatakan bahwa eksistensi komando teritorial TNI masih sangat diperlukan, khususnya bagi daerah-daerah yang sedang dilanda konflik, seperti di wilayah Aceh, Ambon, Poso, dan Papua. Karena itu, pembinaan teritorial untuk menyelesaikan masalah kebangsaan merupakan suatu keharusan.

Sementara tidak sedikit pula kalangan yang menolak keberadaan komando teritorial TNI. Argumentasinya adalah bahwa fungsi pembinaan teritorial TNI saat ini telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga penanganan masalah-masalah yang timbul dalam suatu wilayah merupakan tanggung jawab sekaligus di bawah kendali aparat Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, muncul pemikiran yang ekstrim bahwa berbagai komando teritorial TNI, mulai dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa seharusnya dibubarkan.

Penelitian Unjani

Berangkat dari problem dilematis ini dan adanya kesadaran untuk bersikap netral-objektif alias tidak terjebak pada dua ekstrim yang bertentangan itu, Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) bekerja sama dengan Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia akan melakukan penelitian kolosal berkaitan dengan peran dan fungsi teritorial di era Otonomi Daerah, dengan mengambil studi kasus pada lima kabupaten/kota di Indonesia, yakni Aceh, Bandung, Pontianak, Ambon, dan Papua. Penelitian yang menggunakan metode

deskriptif ini bertujuan antara lain: (1) merumuskan kembali posisi, peran dan fungsi Pemerintah Daerah dan TNI dalam pembinaan dan pendayagunaan potensi di daerah untuk kepentingan pertahanan negara di era otonomi daerah; (2) merumuskan kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan di daerah, dalam konteks pelaksanaan peran dan fungsi TNI dan Pemerintah Daerah di era otonomi daerah; (3) menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan Forum Konsultasi Nasional (FKN) dan Forum Konsultasi Daerah (FKD) dari berbagai *stakeholders* sebagai wadah wacana masalah-masalah pertahanan negara.

Sasaran dan penelitian, yang akan melibatkan lima universitas besar di Indonesia ini adalah: (1) dilakukannya peninjauan kembali (*review*) tentang eksistensi peran dan fungsi teritorial TNI oleh pihak-pihak yang berkompeten; (2) tercapainya pemahaman bersama tentang paradigma baru TNI dalam konteks peran dan fungsi teritorial TNI, dan hubungannya dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah; (3) terciptanya keserasian dan tertatanya secara terpadu hubungan antara Pemerintah Daerah dan TNI dalam pelaksanaan sistem pertahanan negara di era otonomi daerah.

Di samping melaksanakan proyek penelitian, juga diadakan *workshop* baik di daerah maupun di pusat sebagai wahana untuk mendiskusikan hasil penelitian dengan melibatkan unsur-unsur di daerah terkait dengan tema penelitian ini, yakni TNI, Polri, Pemerintah Daerah, DPRD, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi. Keterlibatan berbagai unsur bangsa ini untuk menjaga objektivitas penelitian sehingga kombinasi antara unsur militer dan nonmiliter sangat diperlukan dan bahkan mutlak diharuskan.

Harapannya, semoga penelitian dan *workshop*, yang dilakukan dalam rentang waktu satu tahun ini, berhasil merumuskan solusi-solusi penting yang dapat menyumbangkan percikan pemikiran bagi problem dilematis peran dan fungsi teritorial TNI di era otonomi daerah. Mengingat besarnya signifikansi penelitian ini, maka tim peneliti Unjani senantiasa melakukan proses penggodokan substansi dan prosedur yang diperlukan dalam proses penelitian.

Momentum HUT TNI Ke-57

Oleh karena itu, momentum hari ulang tahun TNI yang ke-57 ini kami mengharapkan akan memperoleh dukungan masyarakat Jawa Barat dalam melaksanakan penelitian, yang tentunya penuh risiko dan tantangan, baik internal maupun eksternal. Tentunya, kita semua menginginkan supaya TNI menjadi tentara yang profesional, efektif, dan efisien. Bukan tentara yang berkarakteristik pretorian.

Karenanya, agar supaya publik mengetahui berbagai langkah reformasi internal di tubuh TNI, institusi TNI seharusnya melakukan langkah sosialisasi perundang-undangan, baik yang telah ditetapkan maupun yang baru dirumuskan. Dengan demikian, momentum hari ulang tahun TNI yang ke-57 ini seharusnya dijadikan waktu yang tepat bagi TNI untuk menyampaikan kepada publik bahwa TNI saat ini telah merancang dan menggodok lima RUU sebagai amanat dari UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara.

Ditambah lagi, TNI juga harus mengkaji kembali doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Mengapa perlu dikaji ulang? Karena itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Artinya, doktrin Sishankamrata banyak mengandung kelemahan, khususnya yang berkaitan dengan ancaman adanya perang total atau perang modern. Strategi perang total dengan menggunakan senjata-senjata teknologi mutakhir tidak bisa diantisipasi oleh doktrin Sishankamrata yang hanya dapat mengantisipasi terjadinya perang secara konvensional dengan melakukan perlawanan gerilya secara terus menerus.

Sebagai kalimat akhir, melalui media ini, kami ingin menyampaikan bahwa masalah teritorial TNI hanya akan dapat diselesaikan secara kongkret apabila berbagai *stakeholders* bangsa, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, dan unsur-unsur lainnya mau duduk bersama untuk mendialogkan masalah krusial ini. Tanpa itu, semua yang dilakukan akan mengalami hambatan dan kesulitan serius.***

Dr. Sutejo Atmowasito, Kajar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unjani, Cimahi; Agus Subagyo, S.IP., M.Si. Dosen Tetap Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unjani, Cimahi.

Terorisme dalam Hubungan Internasional

Oleh AGUS SUBAGYO

MENARIK sekali *talk show* tentang terorisme global yang diselenggarakan oleh Panitia Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PNMHI) XIV di Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi beberapa waktu yang lalu. *Talk show* yang menampilkan pembicara Dr. Sutejo Atmowasito (Kajur HI Unjani) dan Drs. Teuku Rezasyah, M.A. (Kajur HI Unpad) itu menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dalam perspektif kajian hubungan internasional, organisasi terorisme global, dan terorisme global telah menjadi aktor dan isu utama global abad XXI.

Talk show yang dihadiri oleh delegasi mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia ini melahirkan pemikiran bulat bahwa praktik-praktik terorisme global sangat bermacam dan bertentangan dengan stabilitas keamanan, perdamaian, dan kemanusiaan. Hanya, mereka tidak setuju dengan cara-cara dalam menangani terorisme global saat ini, khususnya cara-cara yang dipertontonkan oleh AS, yang tidak mengindahkan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip kedaulatan negara. Oleh karena itu, perlu dirumuskan sebuah strategi khusus berskala global dalam menangani, mencegah, dan memberantas terorisme global.

Bertolak dari pemikiran di atas, tulisan ini ingin mengupas masalah terorisme dari perspektif hubungan internasional. Pertanyaan yang layak diajukan disini adalah bagaimanakah konfigurasi hubungan internasional menyusul merebaknya aksi-aksi terorisme di hampir seluruh penjuru dunia? Bagaimana pula dampaknya

terhadap stabilitas kawasan? Bagaimana formasi negara bangsa merespon kejadian-kejadian tersebut?

Aktor dan Isu global abad XXI

Awal abad ke-21 sekarang ini, dunia masih terus menyaksikan rentetan perubahan cepat dan mendasar yang pada gilirannya mempengaruhi proses transformasi pada konfigurasi politik dan ekonomi global. Secara politik, muncul gelombang demokrasi yang sarat akan nilai-nilai kebebasan dan persamaan. Secara ekonomi, timbul gejala globalisasi ekonomi pasar yang kental akan nuansa kapitalisme global dan perdagangan bebas. Perubahan politik dan ekonomi global tersebut telah memampatkan negara-bangsa pada pola hubungan saling ketergantungan (interdependensi) dan saling keterkaitan (*interlinkage*).

Bersamaan dengan dinamika perubahan global ini, telah lahir pula isu baru yang sangat besar pengaruhnya terhadap tatanan politik ekonomi global saat ini. Isu baru ini adalah isu seputar masalah terorisme. Meskipun isu mengenai terorisme telah ada secara dominatif pada masa Perang Dingin dan sesudahnya, namun klimaks dari menguatnya gejala ini adalah meletusnya tragedi WTC dan Pentagon, AS, pada tanggal 11 September 2001 lalu. Tragedi kemanusiaan yang memakan korban ribuan orang ini telah menjadi titik tolak lahirnya isu terorisme menjadi isu global masa kini. Isu terorisme telah mampu menyamai - dan mungkin juga menggeser - isu-isu dalam agenda internasional sebelumnya, seperti masalah hak asasi manusia, intervensi humaniter, demokratisasi, *good governance*, dan lingkungan hidup.

Konsekuensi dari mencuatnya isu terorisme ke permukaan ini adalah lahirnya teroris sebagai aktor yang sangat diperhitungkan di atas pentas internasional. Hal ini sejalan dengan kecenderungan dalam hubungan internasional bahwa aktor politik global tidak lagi terbatas pada pemerintah (*nation state*), melainkan juga meliputi unsur-unsur non pemerintah, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), perusahaan multinasional (PMN), media massa, dan organisasi terorisme internasional. Terorisme dan teroris telah hadir secara nyata dalam kehidupan antar bangsa. Saat ini, setiap negara, terutama AS dan negara-negara Eropa Barat disibukan oleh ulah para teroris yang siap menengancam kehidupan umat manusia di dunia.

Dalam konteks ini, dunia telah terbelah menjadi dua bagian yang terpisah, yakni antara ikut kubu AS memerangi terorisme global atau ikut mendukung terorisme global. Negara-negara di dunia dihadapkan pada pilihan itu dan mau tidak mau harus memilih diantara keduanya. Suasana politik yang demikian mengingatkan kita pada masa Perang Dingin dimana dunia terbelah menjadi dua blok: Komunis dan Kapitalis. Batas dan ukuran suatu negara dianggap teman atau musuh ditentukan oleh dua ideologi tersebut. Saat ini pun, hubungan antarbangsa dikondisikan pada batas-batas terorisme global. Hubungan internasional telah dipetakan dalam bentangan garis pembatas antara zona antiteroris dan zona teroris.

Makna yang bisa diambil dari perubahan-perubahan besar politik dunia ini adalah terjadinya arus balik orientasi dan isu *high politics*, yang mencakup kajian militer, keamanan, dan perang. Pada masa Perang Dunia

II dan Perang Dingin, orientasi dan isu *high politics* sangat menonjol. Akan tetapi, berakhirnya Perang Dingin bergeser menjadi *low politics* yang mencakup ekonomi, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di awal abad ke-21 ini, kembali ke *high politics*. Hal ini dipicu oleh serangan teroris ke Gedung WTC dan Pentagon, AS.

Instabilitas regional Asia

Isu terorisme global yang mengemuka di hampir seluruh penjuru dunia telah menimbulkan stabilitas keamanan regional menjadi kacau dan tidak harmonis. Hal ini diperkuat lagi dengan tampilan politik luar negeri AS pasca tragedi WTC dan Pentagon yang sangat represif, ofensif, dan reaktif terhadap negara-negara yang dianggap membahayakan bagi perdamaian. Atas nama gerakan antiterorisme global, AS kerap kali menuduh, menpac, dan menetapkan negara-negara, yang diduga secara sepihak, terlibat dalam jaringan terorisme global sebagai musuh yang harus diperingi. Ini bisa dilihat dari rentetan pernyataan Bush yang cenderung menyudutkan beberapa negara seperti Irak, Iran, dan Korea Utara yang dituduh sebagai poros kejahatan, serta Russia, Cina, Korea Utara, Irak, Iran, Libia, dan Suriah yang dituduh telah mengembangkan senjata pemusnah massal.

Kampanye antiterorisme AS yang disertai tekanan-tekanan politik itu telah menciptakan ketidakharmonisan kawasan. Di Asia Tenggara, kehadiran pasukan AS di Filipina, pernyataan Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew, yang menuduh Indonesia sebagai sarang teroris, dan isu kehadiran pasukan AS di Indonesia telah memunculkan ketegangan-ketegangan baru di masing-

masing negara. Di Asia Timur, proses reunifikasi dua Korea juga mengalami hambatan karena berbagai pernyataan Bush yang mendiskreditkan Korea Utara. Di Asia Selatan, penghancuran AS terhadap rezim Talibhan di Afghanistan dan perubahan politik luar negerinya terhadap Pakistan dan India juga ikut merasakan kawasan ini. Di Timur Tengah, Rencana AS menyerang Irak dan konflik berkepanjangan antara Israel-Palestina telah menciptakan keresahan di kawasan paling panas di dunia ini.

Pendek kata, konfigurasi politik kawasan telah mengalami kegoncangan yang amat membahayakan. Masing-masing negara dalam kawasan saling curiga dan menuduh satu sama lain meskipun tidak ada bukti yang akurat. Solidaritas dan solidaritas telah terkoyak oleh isu terorisme global dan kampanye perang AS melawan terorisme global.

Formasi negara

Untuk merespons konteks global yang berubah tersebut, masing-masing negara di dunia sebagai entitas politik yang otonom melakukan proses-proses penyesuaian. Hal ini bisa dilihat dalam kebijakan domestik masing-masing negara yang terkesan hanya menanggapi dinamika eksternal yang terjadi. Sebagai contoh adalah Indonesia yang mengeluarkan Perpu Antiterorisme dan penggodokan UU Antiterorisme. Hal yang sama dilakukan oleh Australia yang mengeluarkan UU Antiterorisme.

Selain itu, secara bersamaan ada semacam kesadaran dari masing-masing negara untuk meningkatkan kerja sama intelijen dan melakukan perjanjian ekstradisi. Latihan kemiliteran gabungan yang bertujuan untuk

menangkal praktik-praktik terorisme global dan fenomena bantuan militer dan peralatan teknis lainnya juga semakin merebak mewarnai dinamika internal masing-masing negara di dunia.

Dalam kasus Indonesia, isu terorisme juga telah merenggangkan hubungan antara pemerintah dengan kelompok-kelompok Islam. Hal ini dipicu oleh tragedi bom di Legian Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 lalu. Fenomena yang demikian tentunya sangat memprihatinkan seluruh elemen bangsa. Kekhawatiran selanjutnya adalah indikasi menguatnya peranan militer dalam kancah politik nasional sebagai sarana untuk menghancurkan kelompok-kelompok terorisme global.

Logikanya, dalam memerangi terorisme global tentunya pemerintah memerlukan kekuatan militer, khususnya intelijen. Kondisi yang demikian tentu saja sangat riskan terhadap terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim penguasa untuk menjadikan militer sebagai alat kepentingannya sendiri. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya Perpu Antiterorisme yang dipandang oleh berbagai kalangan sebagai pisau bermata dua.

Melihat berbagai fenomena di atas, dapat dikatakan bahwa formasi negara dalam interaksi domestik dan internasional mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Proses penyesuaian ini sebenarnya hanya sekadar merespons dinamika eksternal yang berkembang, khususnya menanggapi kepentingan AS yang secara gencar menggembar-gemborkan perang melawan terorisme global. Oleh karena itu, kita semua harus mewaspadaikan kepentingan asing yang sebenarnya ingin memecah persatuan bangsa. ***

Penulis adalah dosen tetap Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Bandung dan alumnus Pascasarjana Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Internasional UGM Yogyakarta.

Ancaman Kemacetan Ilmu-ilmu Sosial

Oleh AGUS SUBAGYO

MICHAEL Foucault (1980), seorang ilmuwan sosial pelopor postmodernisme, pernah mengatakan bahwa pengetahuan bukan sesuatu yang ada tanpa hubungan kekuasaan. Hubungan pengetahuan adalah hubungan kekuasaan. Pengetahuan adalah peredaran perwakilan negara, perusahaan multinasional, universitas, dan organisasi formal lainnya dalam memajukan masyarakat kapitalis. Foucault sebenarnya hendak mengatakan bahwa proses muncul dan berkembangnya ilmu pengetahuan sangat terkait dengan relasi kekuasaan. Ilmu pengetahuan akan semakin dominan dan dianut kebenarannya oleh masyarakat akademik apabila ditopang secara kuat oleh struktur kekuasaan.

Dalam dataran empiris, struktur kekuasaan ini dapat berupa kapital. Artinya, penguasaan struktur kapital dapat dipergunakan secara mudah untuk memengaruhi tumbuh kembang dan benar salahnya suatu pengetahuan. Para elite politik (penguasa) dan elite ekonomi (pengusaha) dengan struktur kapital yang mereka miliki dapat dengan mudah memengaruhi dan mengendalikan proses-proses penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial supaya hasil penelitian tersebut sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Fenomena semacam inilah yang dinamakan dengan "kapitalisasi ilmu-ilmu sosial" ke dalam struktur hegemoni kapitalisme.

Hegemoni kapitalisme

Banyak kalangan mengatakan bahwa hampir tidak ada satu pun teori sosial yang lahir di Indonesia dan dikonstruksi secara *genuine* oleh ilmuwan sosial Indonesia. Kenyataan memprihatinkan ini menunjukkan bahwa kecenderungan stagnasi ilmu-ilmu sosial di Indonesia bukan isapan jempol belaka. Penyebab utama dari kemacetan perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia ini sebenarnya adalah hegemoni struktur kapitalisme yang merajalela di

seluruh aspek kehidupan, baik domestik maupun internasional.

Ada beberapa bukti yang memperkuat argumentasi bahwa hegemoni struktur kapitalisme telah memasung perkembangan ilmu-ilmu sosial. Pertama, marilah kita lihat pola perilaku para ilmuwan sosial Indonesia yang cenderung hanya menjadi pelayan kapitalisme dan "corong" teori

dominan modernisasi. Ilmuwan sosial seringkali berebut proyek-proyek penelitian bernilai miliaran rupiah yang pada hakikatnya lembaga dananya berasal dari penganut kapitalisme. Kebergantungan pada dana penelitian inilah yang membuat ilmuwan sosial bersifat akomodatif pragmatis dan oportunis. Oleh karena itu, mudah ditebak hasil-hasil penelitian para ilmuwan sosial cenderung mengarah pada pemberian legitimasi terhadap struktur kapitalisme dunia.

Kedua, lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti universitas di Indonesia telah terkooptasi oleh hegemoni kapitalisme. Universitas sebagai lembaga yang memproduksi karya-karya ilmiah dan terobosan-terobosan pengetahuan kritis telah menjadi praktik-praktik kapitalisme. Sinyalemen kapitalisme pendidikan, komersialisasi kampus, dan universitas sebagai ajang bisnis telah semakin menguat menjadi kenyataan. Para ilmuwan sosial cenderung men-

jadi birokrat dan pengusaha kampus. Kapitalisme pendidikan telah menyingkirkan hasrat kaum miskin berpotensi untuk mengenyam sekolah. Universitas-universitas negeri yang seharusnya menampung kaum miskin berpotensi telah diisi oleh golongan kaya yang memiliki kapital besar.

Ketiga, para pekerja sosial, khususnya aktivis LSM telah terjebak pada gelimang kapital sebagai hasil akomodasinya terhadap struktur kapitalisme. Bahkan secara ekstrem, Petras

dan Veltmeyer (2001) mengatakan bahwa LSM saat ini telah menjadi pelayan kapitalisme-imperialisme, bukan pelayan rakyat yang memberdayakan masyarakat sebagaimana yang mereka klaim selama ini. Para pekerja LSM cenderung memanfaatkan kondisi rakyat untuk dijual kepada agen kapitalisme agar memperoleh kucuran dana. Padahal, dana yang mereka kucurkan tidak semuanya dipakai untuk pemberdayaan rakyat. Rakyat telah dikorbankan sebagai produk yang dipasarkan ke pihak asing.

Ketiga fenomena empiris di atas telah menyebabkan perkembangan ilmu-ilmu sosial mengalami stagnasi. Hegemoni struktur kapitalisme telah mengondisikan ilmuwan sosial menjadi mandul daya inovasi dan kreasinya. Mereka cenderung bersikap pragmatis agar memperoleh keuntungan dari struktur kapitalisme demi kepentingan pribadi. Menurut mereka dengan mengabdikan kepada struktur kapitalisme, kesejahteraan material akan terjamin. Penolakan terhadap struktur kapitalisme akan menyebabkan mereka menjadi "miskin".

Dekonstruksi positivismisme

Jika dalam dataran praksis empiris, ilmu-ilmu sosial terhegemoni oleh struktur kapitalisme, maka dalam dataran teoritis-metodologis, ilmu-ilmu sosial juga terkooptasi oleh dominasi positivismisme sebagai produk teoritik dari sistem kapitalisme. Positivismisme yang menekankan aspek kuantitatif, empiris, dan *causal laws* telah mendominasi metodologi ilmu-ilmu sosial sehingga memarginalkan metodologi antipositivismisme yang lebih kualitatif, normatif, dan interpretatif. Implikasi negatifnya adalah ilmu-ilmu sosial telah jauh keluar dari induknya dan mengagung-agungkan logika kalkulatif berdasar angka-angka sebagaimana metodologi dalam ilmu-ilmu eksakta.

Ilmu-ilmu sosial positivistis telah mencampakkan filsafat moral dan nilai-nilai etika. Menurut ilmuwan sosial positivistis, ilmu-ilmu sosial harus be-

Ancaman

(Sambungan dari hlm 18 kol 9)

sitivismisme adalah ilmu ekonomi dan psikologi. Di dalam ilmu politik pun telah ada pendekatan dominan positivismisme, yakni behavioralisme yang ingin membawa ilmu politik mengikuti jejak ilmu ekonomi dan psikologi. Positivismisme telah mengooptasi ilmuwan-ilmuwan sosial untuk membawa ilmu-ilmu sosial menggunakan metodologi ilmu-ilmu eksakta.

Akibat negatif dari positivismisme ini adalah bahwa ilmuwan sosial tidak peka terhadap objek studinya karena hilangnya nilai-nilai moral etika yang ada dalam dirinya. Ilmuwan sosial juga cenderung gagal dalam memahami fenomena sosial karena empirisitas yang mereka anut tanpa mengindahkan makna di balik fenomena sosial tersebut. Selain itu, tujuan ilmu-ilmu sosial sebagai *problem solving*, mereka tolak karena akan terjadi pemihakan. Sikap demikian telah mendorong ilmu-ilmu sosial positivistis jauh dari kenyataan objek studinya sehingga daya analisisnya selalu mengalami ketumpulan dan kebiasaan.

Melihat kenyataan dominasi positivismisme yang memacetkan metodologi ilmu-ilmu sosial di atas, perlu kiranya para ilmuwan sosial yang antipositivismisme dan masih memegang teguh filsafat moral dan etika untuk mendekonstruksi positivismisme. Dekonstruksi positivismisme tidak bisa dilakukan secara parsial dan sendiri-sendiri oleh masing-masing disiplin ilmu sosial. Namun, harus dilakukan secara bersama-sama baik dalam ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, dan ilmu politik. Dalam ilmu ekonomi pun telah ada kegelisahan terhadap

dominasi positivismisme. Hal ini dapat dilihat dalam karya-karya Gunnar Myrdal (1969) dan Amartya Sen (1988). Oleh karena itu, perlu dibentuk forum lintas disiplin ilmu sosial untuk mengonsolidasi diri.

Saat ini tengah muncul teori-teori sosial alternatif yang berani menantang hegemoni kapitalisme dan metodologi positivismisme. Dua teori sosial yang saat ini banyak dikaji dan digemari oleh ilmuwan sosial di Indonesia itu adalah *critical theory* dan postmodernisme. Teori kritis yang dikembangkan oleh mazhab Frank-

furt, Jerman, tahun 1930-an ini dipelopori oleh Horkheimer, Marcuse, dan Jürgen Habermas, sedangkan Post Modernisme muncul dilatarbelakangi oleh pemikiran-pemikiran Michael Foucault, Jean-Francois Lyotard, Jacques Derrida, dan Roland Barthes.

Agenda kerja dari kedua teori sosial alternatif ini adalah menggugat dominasi epistemologi positivistik dan ingin membuka ruang akademik bagi pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk saling tukar konsepsi dan teori. Harapannya, dengan pembukaan ruang berpikir (*think*

space) yang sama bagi ilmuwan-ilmuwan sosial dengan berbagai pendekatan yang berbeda dapat memajukan ilmu-ilmu sosial ke taraf kritisisme. Mungkinkah teori kritis dan post modernisme mampu membebaskan ilmu-ilmu sosial dari ancaman kemacetan? *Wallahualam bishawab.****

Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi dan Alumni Pascasarjana Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Internasional UGM Yogyakarta.

bas nilai sehingga karya-karya yang dihasilkan bersifat objektif empirik. Dua disiplin ilmu sosial yang telah benar-benar *all out* menerapkan po-

(Bersambung ke hlm 19 klm 6)

Pikiran Rakyat

Ambisi Bush Ingin Melebihi Ayahnya

Oleh SUTEJO ATMOWASITO & AGUS SUBAGYO

Kami adalah anggota PBB menyatakan menyelamatkan generasi berikut dari bahaya perang yang telah terjadi dua kali selama hidup kita dan telah mengakibatkan pada suatu keadaan yang menakutkan dari umat manusia di dunia ini dan menegaskan kembali keyakinan atas hak asasi manusia yang fundamental, atas kemuliaan dan keagungan dari umat manusia, di dalam kesamaan hak antara pria dan wanita dan juga pada negara besar maupun kecil

(Atlantic Carter, Piagam PBB).

SEMAKIN berlarut-larunya krisis AS-Irak telah menyedot perhatian dunia internasional. Masyarakat internasional dibuat berdebar-debar oleh sajian permainan yang dipergakan oleh AS, Irak, dan PBB. Rencana AS menyerang Irak dengan kekuatan militer telah menimbulkan berbagai pro dan kontra di antara negara-negara di dunia yang pada gilirannya mendorong terciptanya suatu kondisi instabilitas internasional. Penggelaran pasukan militer AS dan sekutunya di kawasan Teluk menunjukkan secara nyata bahwa AS akan membuktikan ancamannya dalam menyerang Irak yang dianggap mengembangkan senjata pemusnah massal, meskipun tanpa dukungan PBB.

Melanjutkan ambisi Bush Sr.

Ada beberapa alasan yang mendorong AS berencana melakukan penyerangan militer terhadap Irak. Pertama, menurut versi pemerintah AS, Irak dinilai telah mengembangkan senjata pemusnah massal, seperti senjata nuklir, kimia dan biologi. Bagi AS, senjata-senjata yang dikembangkan Irak itu dipersepsikan akan digunakan untuk menghancurkan kepentingan-kepentingan AS di berbagai belahan dunia. Sikap paranoid yang menjangkiti AS semakin menguat ketika muncul spekulasi bahwa rezim Saddam Husein mempunyai hubungan dengan jaringan terorisme internasional, Al-Qaeda, pimpinan Osama Bin Laden. Pemerintah Bush khawatir jika senjata pemusnah massal yang dikembangkan Irak akan dipergunakan secara bersama dengan Al-Qaeda dalam kegiatan terorisme global. Oleh karena itu, AS berniat melucuti senjata pemusnah massal tersebut dengan cara-cara militer.

Kedua, analisis yang saat ini

berkembang bahwa motif dibalik serangan AS terhadap Irak adalah faktor minyak. Irak adalah negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi. Cadangan minyak Irak 112,5 miliar barel dengan produksi 2,4 juta barel per hari. Menurut berbagai kalangan, keluarga Bush yang berasal dari negara bagian Texas memiliki perusahaan-perusahaan minyak berskala global. Presiden Bush akan mendapatkan keuntungan yang melimpah apabila Irak berhasil dikuasai dan dikendalikan karena perusahaan minyaknya bisa secara mudah mengeksploitasi kandungan minyak Irak.

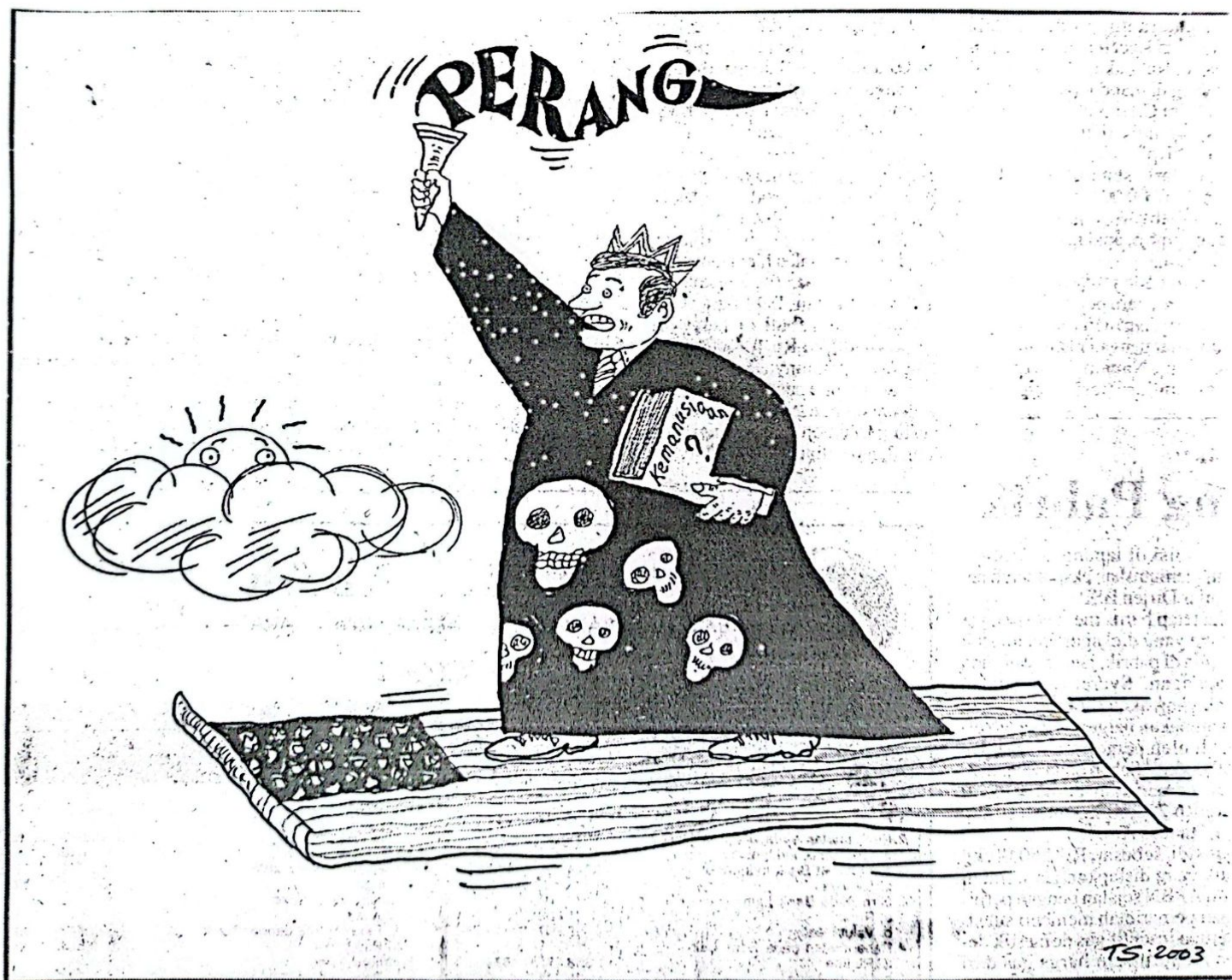
Selain soal minyak, para analis militer mengatakan bahwa rencana AS menyerang Irak didorong oleh Doktrin Bush yang diumumkan pertengahan tahun 2002. Doktrin Bush, yang lahir karena terjadinya tragedi WTC dan Pentagon, intinya adalah perubahan strategi militer dari defensif menjadi ofensif. AS berencana mengujicobakan Doktrin Bush yang baru tersebut terhadap Irak setelah sebelumnya berhasil diujicobakan pada rezim Taliban di Afganistan.

Ketiga, menurut analisis penulis sendiri, kegigihan AS berencana menyerang Irak lebih disebabkan oleh keinginan George W. Bush (Bush Jr.) melanjutkan ambisi bapaknya, George Bush (Bush Sr.), yaitu menggulingkan rezim Saddam

Husein, mendudukkan rezim di Irak yang pro AS, dan menempatkan pasukan militer AS di Irak selama masa transisional. Bush Jr. ingin mengikuti pola-pola pendudukannya di Afganistan untuk diterapkan di Irak. Dalam kasus Irak, Bush Jr. bertekad melanjutkan ambisi Bush Sr. yang tidak kesampaian ketika Perang Teluk I (1991) meletus. Pada saat itu, Bush Sr. memiliki ambisi untuk menggulingkan Saddam Husein, tapi tidak terwujud karena terhambat oleh Resolusi DK PBB yang hanya memberi mandat AS, sebagai pemimpin pasukan multinasional, mengusir pasukan militer Irak dari wilayah Kuwait, bukan menyerang dan menghancurkan rezim Saddam Husein. Meskipun PBB telah memberikan sanksi terhadap Irak berupa

embargo ekonomi-militer dan pemblakuan zona larangan terbang di Irak bagian Utara dan Selatan, namun ambisi Bush Sr. yang ingin menguasai Irak tidak kesampaian. Oleh karena itu, sebagai anak yang berbakti pada orang tua, Bush Jr. ingin mewujudkan ambisi dan membalaskan dendam Bush Sr. dengan menyerang dan menghancurkan rezim Saddam Husein.

Di samping itu, faktor yang harus diperhitungkan terhadap getolnya rencana AS menyerang Irak adalah MIC (*Military Industrial Complex*). Analisis tentang perilaku para pengusaha AS di bidang militer dan persenjataan ini muncul pertama kali dimasa pemerintahan Presiden Dwight Eisonhover. Sangat mungkin apabila para pengusaha senjata



(*war monger*) melakukan lobi-lobi mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri AS untuk menyerang Irak. Pecahnya perang AS-Irak akan memberikan keuntungan milyaran dollar pada MIC karena lakunya senjata canggih yang diproduksi. Perang AS-Irak dijadikan medium pemasaran dan uji coba persenjataan teknologi mutakhir oleh para MIC, seperti Titan Corporations.

Legitimasi dan sentimen agama

Upaya persiapan AS menyerang Irak tidaklah semulus yang dibayangkan. Berbagai kendala siap menghadang negara adidaya ini untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya menyerang Irak. Paling tidak terdapat tiga kendala yang dihadapi AS dalam menyerang Irak. Pertama, kendala legitimasi. Seperti telah diketahui, AS belum mendapat 'lisensi' dari PBB, sebagai organisasi internasional untuk menyerang Irak. Bahkan, dalam DK PBB, tiga negara anggota tetap yang memiliki hak veto, yakni Prancis, Rusia dan Cina secara tegas menolak cara-cara militer dalam menyelesaikan krisis Irak. Hanya Inggris yang sejak awal mendukung rencana AS tersebut. Oleh karena itu, AS dengan gigihnya berusaha mempengaruhi para anggota DK PBB agar mendukung kebijakan AS tersebut, seperti upaya yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri AS, Collin Powell, dalam membeberkan bukti dan data versi AS bahwa Irak benar-benar menyimpan senjata pemusnah massal di hadapan sidang DK PBB. Lobi-lobi AS juga ditujukan pada ketua Tim Inspeksi Senjata PBB untuk Irak, Hans Blix, agar laporan-laporannya menyudutkan posisi Irak.

Kedua, opini publik dunia nampaknya tidak berpaling kepada AS. Merebaknya demonstrasi di berbagai belahan dunia mengancam dan menolak serangan AS terhadap Irak menunjukkan bahwa masyarakat internasional justru bersimpati terhadap Irak. Bahkan, unjuk rasa menentang AS datang dari dalam negeri AS sendiri. Rakyat AS menginginkan penyelesaian dengan cara-cara damai nonmiliter dalam mengatasi krisis AS-Irak. Penyerangan militer AS terhadap Irak dianggap hanya akan menimbulkan sentimen anti-AS yang pada akhirnya akan melahirkan gerakan-gerakan teror yang akan menghantam AS dan kepentingannya di berbagai penjuru dunia.

Ketiga, kendala sentimen agama.

Biar bagaimana pun, Irak adalah simbolisasi Islam. Meskipun krisis AS-Irak berdimensi politis dan bukan perang yang berlatarbelakang agama, masyarakat internasional, khususnya negara-negara Islam akan melihat persoalan krisis AS-Irak secara simplistik, yakni perang agama, negara Islam diserang oleh negara non-Islam. Simplifikasi persoalan AS-Irak ini bias dipahami mengingat AS bertindak secara berbeda terhadap masalah yang hampir sama, yakni soal nuklir Korea Utara. Kelompok Islam fanatik akan beranggapan bahwa perlakuan berbeda oleh AS ini disebabkan karena Korea Utara bukan negara Islam, sedangkan Irak memiliki label Islam. Oleh karena itu, bisa dipastikan, jika AS menyerang Irak, akan muncul gerakan-gerakan Islam militan yang akan membahayakan AS.

(Bersambung ke hlm 19 klm 1)

Ambisi Bush Ingin Melebihi

(Sambungan dari hlm 18 kol 9)

Skenario ke depan Sekurang-kurangnya terdapat tiga skenario ke depan terkait dengan rencana AS menyerang Irak. Pertama, PBB memutuskan tidak memberikan ijin kepada AS melakukan tindakan militer terhadap Irak karena laporan Tim Inspeksi Senjata PBB tidak menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa Irak menyimpan senjata pemusnah massal. Jika ini terjadi, kemungkinan AS akan tetap menyerang Irak, walaupun mendapat veto dari Rusia, Cina, dan Prancis. Perang Dunia Ketiga bias terjadi apabila ketiga negara besar ini marah dan memback up Irak karena

vetonya di DK PBB tidak dilindungi.

Skenario kedua, PBB menetapkan tidak memberi 'lisensi' pada AS dalam menyerang Irak. AS kemudian melakukan langkah organisasional mengusulkan untuk menggelar Sidang Umum PBB dalam kerangka Majelis Umum PBB meminta dua pertiga anggota Majelis Umum PBB memberikan mandat kepada AS dalam menyerang Irak (*Uniting for Peace Resolution*). Kemungkinan yang terjadi adalah AS tidak akan mendapat dukungan dari Majelis Umum PBB, namun AS tetap menyerang Irak. Meskipun AS akan dihujani

berbagai kecaman dan kutukan dari masyarakat internasional.

Skenario ketiga, berdasarkan laporan Tim Inspeksi Senjata PBB yang kemungkinan memojokkan Irak, DK PBB merancang sebuah resolusi yang 'menghalalkan' cara-cara militer untuk melucuti senjata pemusnah massal di Irak, tapi bukan menggulingkan rezim Saddam Husein. Jika ini terjadi, AS akan tampil ke depan mengambil tongkat komando perang melawan Irak. Kemungkinannya, Irak akan kalah melawan AS dan sekutunya. Kemudian AS akan melucuti senjata nuklir, kimia dan biologi milik Irak sesuai Resolusi

DK PBB. Namun, Bush tidak berhenti sampai di situ. Bush Jr. akan melanjutkan ambisi bapaknya menggulingkan rezim Saddam Husein dan mendudukkan sebuah rezim yang pro Barat. Dengan begitu, Bush Jr. akan menjadi anak yang patuh, taat dan berbakti pada orang tua.***

Dr. Sutejo Atmowasito Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unjani dan Mantan Diplomat RI.

Agus Subagyo, S.I.P., M.Si. Dosen Tetap Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unjani.

Menelanjangi Kapitalisme Global

Oleh AGUS SUBAGYO & SUTEJO ATMOWASITO

FRANCIS Fukuyama dalam bukunya "The End Of History and The Last Man" mengatakan bahwa proses perjalanan sejarah manusia telah berakhir. Artinya, proses dialektika pergulatan ideologi telah mencapai kepada kebenaran mutlak dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal mengalahkan ideologi sosialisme dan fasisme. Semua negara di dunia akan berjalan dengan tuntunan kapitalisme dan demokrasi liberal hingga pada akhirnya tercipta sebuah pemerintahan tunggal dunia yang menyatu di bawah pimpinan AS sebagai aktor utama dunia.

Jika dilihat secara mendalam realitas relasi politik internasional dengan konteks ekonomi global saat ini, apa yang menjadi tesis dari Fukuyama tersebut memang sesuai dan menunjukkan penggambaran perilaku negara bangsa dalam konteks global. Sejak dasawarsa 1980-an dan mencapai puncaknya pasca-Perang Dingin, berbagai negara di belahan dunia, khususnya negara-negara Dunia Ketiga berbondong-bondong menerapkan sistem ekonomi kapitalis dan sistem politik demokrasi liberal. AS dan negara-negara Barat lainnya dijadikan model oleh berbagai negara (*demonstration effect*) dengan harapan kemajuan, kemakmuran, keadilan, dan stabilitas dapat tercipta secara cepat bagi negara-negara yang menerapkan model tersebut.

Kapitalisme dan demokrasi liberal seolah-olah dianggap sebagai satu-satunya ideologi yang dapat membawa negara-negara di dunia dari jurang kemiskinan, ketidakadilan, dan keterasingan ke arah kemakmuran. Bahkan, ada negara yang menganggapnya sebagai "kitab suci" yang membawa sinar pencerahan

dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, negara-negara yang tidak berpijak pada kapitalisme dan demokrasi liberal akan mengalami keterbelakangan dan keterasingan. Cina, Vietnam, dan Kamboja yang pada awalnya bersikukuh dengan sosialisme, lambat laun mulai meninggalkan ideologi produksi marxisten-leninis tersebut dan secara hati-hati serta malu-malu memasukkan nilai-nilai kapitalisme. Tampaknya secara kondisional dan kontekstual global, mereka dipaksa untuk menerima kemampuan kapitalisme global.

Wacana globalisasi

James Petras & Veltmeyer (2001) menyebut bahwa globalisasi adalah sebuah wacana yang dijadikan oleh aktor-aktor kapital global sebagai alat untuk memberikan payung bagi pergerakan dan penyebaran ideologi kapitalisme ke seluruh penjuru dunia. Melalui wacana globalisasi, ditumbuhkan mitos-mitos pembangunan, modernisasi, dan industrialisasi. Disebarkan keyakinan bahwa globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari karena timbul dari proses-proses alamiah.

Walau demikian, jika dilihat secara detail, wacana globalisasi merupakan sebuah rancangan global yang dibuat untuk menyatukan bangsa-bangsa di dunia di bawah panji-panji kapitalisme global. Menurut Petras & Veltmeyer, cikal bakal rancangan global ini berpangkal pada sistem Bretton Woods (diberlakukan mulai tahun 1944) yang ingin menciptakan tatanan dunia baru. Bank Dunia, IMF, dan lembaga-lembaga keuangan internasional (IFI) serta perusahaan-perusahaan transnasional tidak hanya menjadi penyangga tatanan

imperial global, melainkan sebagai "jaringan keuangan global".

Tatanan dunia baru ini juga disangga oleh Forum Perencanaan dan Kebijakan Strategis Global, seperti Kelompok Tujuh (G-7), Komisi Trilateral (TC), Forum Ekonomi Dunia (WEF), dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi Negara-negara Maju (OECD). Agen-agen lokal kapitalisme global (*comprador class*) yang terdapat di Negara-negara Dunia Ketiga juga dirancang untuk melayani dan berkolaborasi dengan kepentingan-kepentingan modal global. Kesatuan lembaga-lembaga yang dirancang hingga menjadi suatu sistem ini menjadi bagian integral dari imperialisme baru, yakni "sistem pemerintahan global" baru dalam sebuah bingkai globalisasi.

Wacana globalisasi juga membangun mitos bahwa kapitalisme global akan mendorong tumbuhnya sistem politik yang demokratis sebagaimana yang dinurubuatkan oleh Seymour Martin Lipset. Asumsinya, sebuah negara yang menerapkan kapitalisme global akan melahirkan kelompok atau kelas menengah yang mampu secara ekonomi-politik menjembatani korespondensi antara penguasa dan rakyatnya. Kelas menengah di desain untuk menjadi katakalisator, dinamisator, dan stabilisator mekanisme relasi ekonomi-politik dari pemerintah dan rakyatnya. Mitos-mitos yang lahir dari wacana globalisasi telah membuai negara-negara di dunia sehingga mereka tidak menyadari konsekuensi negatif atas realitas empirik yang terjadi.

Relasi kapitalisme-imperialisme

Lenin (1963), seorang pelopor utama sosialisme, pernah berkata bahwa imperialisme adalah tahap tertinggi dari kapitalisme (*Imperialism is The Stages of Capitalism*). Ujung-ujung dari menyebarnya kapitalisme

Pikiran Rakyat

BANDUNG - SABTU (KLIWON) 15 MARET 2003

adalah imperialisme. Imperialisme merupakan tujuan dari negara-negara kapitalis untuk menguasai negara-negara lain melalui cara-cara yang tidak langsung alias nonfisik. Hal ini dilakukan mengingat praktik-praktik kolonialisme sudah ditasbihkan oleh masyarakat dunia untuk dihapuskan. Kapitalisme global merupakan alat baru untuk menguasai negara-negara lain di dunia. Pernyataan Lenin ini didukung oleh Bill Warren (1980) yang mengatakan bahwa imperialisme adalah pelopor kapitalisme.

Karena sifatnya yang imperialistis, kapitalisme global secara empirik membawa implikasi negatif yang bertentangan dengan mitos-mitos yang digembar-gemborkannya. Ada kecenderungan di negara-negara Dunia Ketiga yang memakai model kapitalisme sebagai pijakan sistem ekonomi-politiknya mengalami kondisi yang memprihatinkan, seperti kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, ketimpangan, kerusakan lingkungan, pelecahan seksual, pelanggaran hak asasi manusia, dan akhir dasawarsa 1990-an muncul krisis ekonomi yang menimpa negara-negara Asia seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan.

Semua kenyataan di atas diduga akibat proses pembangunan yang bersifat kapitalistis tanpa memprioritaskan kepada aspek-aspek kemanusiaan dan lingkungan. Pembangunan kapitalistis hanya memahami dimensi pembangunan secara materialistis tanpa mengindahkan konsepsi pembangunan yang membebaskan manusia. Dengan kata lain, pembangunan telah mengungkung kebebasan manusia dalam menjajalkan hak-haknya. Contoh tepat dari hal ini adalah pembangunan ala rezim Orde Baru yang tidak mem-

berikan manfaat bagi rakyatnya, tapi malah merampas, mengungkung, dan merepresi hak-hak rakyatnya.

Kapitalisme global juga membawa nilai-nilai liberal Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Tentang hal ini, Anthony Giddens (1999) menduga bahwa kapitalisme global telah merombak tatanan kehidupan masyarakat. Perombakan ini tidak hanya pada dataran relasi kelompok sosial, tetapi telah merasuk pada perombakan tradisi dan nilai-nilai keluarga, termasuk persoalan seksualitas dan perkawinan. Di level nasional, kapitalisme global telah melunturkan kedaulatan sebuah bangsa karena munculnya blok-blok ekonomi regional yang siap melaksanakan proyek pasar bebas sebagaimana diduga oleh Kenieci Ohmae (1996).

Sebenarnya, jika dilihat jauh ke belakang, berbagai kelemahan dan kritikan terhadap meluasnya ideologi kapitalisme global yang dibungkus dalam sebuah wacana globalisasi telah mengemuka sejak pertengahan tahun 1970-an, dengan sekelompok pemikir ekonomi-politik dari Amerika Latin mendeklarasikan sebuah teori strukturalis (dependensi, ketergantungan) sebagai *counter* terhadap teori modernisasi. Asumsi inti dari pemikiran strukturalis ini mengatakan bahwa keterbelakangan dan ketergantungan yang dialami oleh negara Dunia Ketiga saat ini adalah adanya penetrasi asing yang mendistorsi sektor perdagangan-ekonomi internal dan distorsi yang mengarah pada konflik sosiopolitik. Inilah awal dari munculnya neo imperialisme di negara Dunia Ketiga.

Inkonsistensi Indonesia

Dalam konteks Indonesia, yang saat ini tengah berupaya keluar dari krisis ekonomi, gambaran cerita di atas seyogyanya dijadikan cerminan

dalam melakukan hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IMF. Saat inilah waktu yang tepat bagi para pengambil keputusan untuk menentukan apakah Indonesia tetap menautkan diri dalam sistem kapitalisme global dengan tetap meminta bantuan IMF atau memutuskan segala hubungan dengan IMF sebagai representasi dari kapitalisme global.

Berlarut-larutnya krisis ekonomi di Indonesia sebenarnya dikarenakan ambivalensi dan ketidaktegasan pemerintah dalam berinteraksi dengan IMF. Sikap setengah-setengah (kadang mengikuti IMF dan kadang tidak) sangat menunjukkan inkonsistensi sikap pemerintah sehingga merugikan diri sendiri karena kita telah menyepakati Lol IMF. Oleh karena itu, sikap konsistensi sangat diperlukan untuk berani menerima atau menolak hubungan dengan IMF beserta segala konsekuensinya.

Dalam kaitan ini, menarik sekali pernyataan yang dilontarkan oleh Kwik Kian Gee, yang mengatakan bahwa merujuk pada Program Pembangunan Nasional (PROPE-NAS), Indonesia akan mengakhiri kontrak dengan IMF pada tahun 2003. Perlu dipikirkan secara masak-masak apakah Indonesia sanggup untuk hidup tanpa IMF atau tidak. Kalau memang sanggup, yang harus dilakukan sekarang adalah persiapan agar supaya ketika Indonesia benar-benar memutuskan untuk *good bye* terhadap IMF, perekonomian kita benar-benar telah kuat, mapan, dan stabil. Jangan sampai ketika kita secara lantang penuh keberanian memutuskan hubungan dengan IMF, perekonomian kita malah merosot dan ambruk. Oleh karena itu, saat inilah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita mampu hidup mandiri tanpa

bantuan ketergantungan dari lembaga keuangan internasional.***

Penulis keduanya dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unjani Cimahi.

Negara Palestina Merdeka Tahun 2005?

Pikiran Rakyat

BANDUNG, JUMAT (PAHING) 20 JUNI 2003

Oleh Dr. SUTEJO ATMOWASITO dan AGUS SUBAGYO, S.I.P., M.Si.

"Sharon is changing his lexicon but not his ideology. Last week Sharon assured the Jewish settlers living in the West Bank and Gaza; there is no restriction here, and you can build for your children and grand children, and I hope for your great-grand children as well" (Newsweek, Juni 9, 2003, hlm. 31).

MEMANASNYA situasi di Timur Tengah, khususnya konflik antara Israel-Palestina semakin meningkatkan pesimisme terhadap proses perdamaian di Timur Tengah yang dirancang dalam sebuah *peace road map* alias peta jalan damai yang diumumkan pada 30 April 2003 lalu. Berbagai pelanggaran terhadap *peace road map* yang dilakukan oleh Israel dan Palestina telah menempatkan *peace road map* tersebut pada posisi di ujung tanduk. Peningkatan kekerasan dan ancaman perang di Tepi Barat dan Jalur Gaza merupakan sebuah ironi besar ketika prakarsa perdamaian sedang diinisiasi, malah direspons dengan berbagai tindak kekerasan dan ancaman pembunuhan.

Ihwal munculnya gagasan untuk menghidupkan kembali prakarsa perdamaian di Timur Tengah adalah pertemuan kelompok "kuartet" yang terdiri dari Rusia, Uni Eropa, PBB, dan AS. Hasil pertemuan itu menyepakati sebuah proposal *peace road map* yang disodorkan oleh AS. Dalam *peace road map* itu antara lain disebutkan bahwa Palestina harus menghentikan aksi kekerasan terhadap Israel, melakukan demokrasi dan pembaruan internal, dan mengakui eksistensi Israel. Sebaliknya, Israel dituntut menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta mencabut blokade terhadap masyarakat Palestina (Kompas, 3/05/2003).

Yang menarik dari butir-butir *peace road map* tersebut adalah proyeksi yang secara tegas dan eksplisit tentang pembentukan negara Palestina merdeka tahun 2005. Untuk mencapai itu, akan dibentuk konferensi internasional tahun 2004

yang bertujuan mendorong penarikan Israel dari daerah pendudukan.

Apabila dilihat secara sekilas, butir-butir *peace road map* itu kelihatan indah dipandang mata, tapi apakah impiementasinya juga kelihatan indah dan berjalan mulus? Renteian peristiwa yang terjadi dua hari setelah *peace road map* ditandatangani menunjukkan bahwa konsistensi implementasi menjadi suatu problem serius jika perdamaian ingin difegakkan. Sejarah menunjukkan bahwa prakarsa perdamaian telah beberapa kali dirancang, tapi kedua belah pihak tidak mengimplementasikan butir-butir perdamaian yang disepakati.

Di balik "peace road map" Ada setidaknya empat kejanggalan yang mewarnai kelahiran *peace road map*. Pertama, seperti diketahui bahwa *peace road map* merupakan gagasan AS, dalam hal ini adalah Deputi Asisten Menlu AS, William Burn, yang menjadi otak peta perdamaian. Sebelum diserahkan ke Uni Eropa, PBB, dan Rusia, proposal *peace road map* dikirimkan terlebih dahulu kepada PM Israel, Ariel Sharon pada tanggal 15 Oktober 2002. Uni Eropa, PBB, dan Rusia malah baru menerima sehari sesudah Israel (Tempo, 18 Mei 2002).

Kedua, konsekuensi dari tindakan AS yang menyerahkan proposal *peace road map* kepada Israel jauh sebelum dibahas kuartet adalah munculnya lobi-lobi yang dilakukan oleh Tel Aviv kepada Washington, khususnya lobi-lobi tentang butir-butir penting dalam proposal *peace road map* terkait dengan masalah perbatasan, pengungsi, pemukiman, dan status Yerusalem. Tercatat terdapat lebih dari seratus perubahan dalam *peace road map* sesuai yang diusulkan oleh Israel. Di samping itu, Israel juga berhasil membujuk AS untuk menunda pengumuman *peace road map* hingga pemilu dilangsungkan akhir Januari lalu di Israel.

Ketiga, jika dilihat momentum dan timing-nya, *peace road map* yang diluncurkan pada tanggal 30

April 2003 sebenarnya hanya taktik dan siasat AS agar supaya citranya membaik setelah invasi AS ke Irak. Peluncuran *peace road map* hanya merupakan upaya pemulihan citra AS yang memburuk di mata masyarakat internasional dan komunitas Timur Tengah akibat invasinya ke Irak. AS sangat berkepentingan untuk perbaikan citra dirinya agar supaya dapat ditrima lagi dalam percaturan politik di Timur Tengah.

Keempat, adanya klaim bahwa *peace road map* sebagai hasil kesepakatan bersama antara AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB dalam wadah penamaan kuartet. Padahal, jika dilihat proses lahirnya *peace road map* adalah berasal dari gagasan dan dirumuskan oleh AS serta adanya koreksian dari Israel, PBB, Uni Eropa, dan Rusia sangat terbatas perannya dalam penggodokan proposal *peace road map* tersebut. Oleh karena itu, tepat kiranya jika disebut bahwa *peace road map* bukan berasal dari kuartet murni, melainkan bipartit, antara AS dan Israel.

Kelima, tidak dilibatkannya negara-negara Arab dalam proses penggodokan dan penyajian "menu" *peace road map*. Padahal, kalau dilihat faktanya, permasalahan konflik Israel-Palestina tidak hanya permasalahan internal kedua pihak, tetapi permasalahan negara-negara Arab yang secara geografis berada di Timur Tengah. Menyadari kesalahan itu, AS kemudian mulai merangkul negara-negara Arab. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan KTT Sharm el-Sheikh, Mesir, 3 Juni 2003 yang dihadiri oleh Presiden Mesir Hosni Mubarak; Presiden AS George W. Bush; Raja Yordania Abdullah II; Raja Bahrain Syech Hamid Bin Isa Al Khalifah; Putra Mahkota Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz; PM Palestina Mahmoud Abbas; dan PM Israel Ariel Sharon; dan KTT Aqaba, Yordania, 4 Juni 2003 yang dihadiri oleh AS, Israel, Palestina, dan Yordania.

Garis keras Israel dan Palestina Meskipun secara legal-formal, Israel dan Palestina telah menyetu-

jui *peace road map* dengan indikasi statemen PM Ariel Sharon dan PM Mahmoud Abbas alias Abu Mazen, namun belum tentu faksi-faksi yang terdapat di Israel maupun Palestina menerima *peace road map* itu. Apabila dianalisis secara mendalam, sebenarnya terdapat faksi-faksi, baik di Israel maupun di Palestina, yang menolak mentah-mentah butir-butir dalam *peace road map*.

Di Israel, terdapat beberapa orang tokoh ultra kanan yang sangat gigih menciptakan opini publik domestik agar Israel keluar dari kerangka kesepakatan *peace road map*. Di antara tokoh ultra kanan ini adalah Yeheil Hazan, anggota Partai Likud dan Ketua Lobi Kneset untuk Urusan Pemukiman, yang dengan mentah-mentah menolak *peace road map*. Menurutnyanya, persetujuan Israel atas *peace road map* merupakan sebuah bencana besar. Di samping itu, Beny Elon, tokoh Partai Persatuan Nasional dan Menteri Pariwisata, terus-menerus melobi AS agar *peace road map* digagalkan (*Tempo*, 1 Juni 2003, hlm. 137).

Ariel Sharon pun sebagai tokoh kunci munculnya *peace road map* bersikap ambivalen. Di satu sisi, ia mengatakan bahwa *peace road map* harus dilaksanakan, sedangkan di sisi lain, ia mengatakan bahwa pemukiman Yahudi dijamin hidup di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Sikap Ariel Sharon yang berbeda antara ucapan dan tindakan bisa dilihat misalnya dalam artikel Joshua Hammer dalam *Newsweek* yang diberi judul "Words and Deeds", 9 Juni 2003, halaman 30-35. Dalam artikel itu, Sharon mengatakan bahwa tidak ada pembatasan pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Rakyat Israel boleh membangun pemukiman untuk anak, cucu, dan cicitnya.

Sementara itu, di Palestina terdapat empat faksi besar yang jelas-jelas menolak *peace road map*. Ketiga faksi garis keras itu adalah Hamas, Jihad Islam, dan Brigade Al-Aqsa. Ketiga faksi sempalan ini memang dikenal militan sejak dulu sehingga hampir tidak mau kompromi dengan Israel. Oleh karena itu, mereka tidak suka dengan PM Palestina Abu Mazen, yang mau berkompromi

dengan Israel dalam sebuah kerangka *peace road map*. Mereka menganggap Abu Mazen sebagai orang yang lemah dan tidak populer di mata rakyat Palestina karena memang sebelumnya Abu Mazen menduduki kursi PM atas dukungan Israel dan AS.

Bahkan, kelompok pejuang Hamas saat ini telah mengobarkan gendang perang melawan Israel dan menyuruh orang-orang asing keluar dari wilayah Israel karena pejuang Hamas akan melakukan aksi perang. Tindakan keras Hamas ini dilakukan karena dipicu oleh upaya uji coba pemburuan yang dilakukan Israel atas tokoh Hamas, Abdul Aziz Ar-Rantisi, meskipun gagal. Saat ini, Israel maupun pejuang militan Palestina saling bersiap perang, tidak memerdulikan butir-butir *peace road map* yang telah disepakati.

Palestina merdeka 2005?

Melihat realitas di lapangan, khususnya fakta inkonsistensi implementasi butir-butir *peace road map*, hal itu dapat diprediksikan dari sekarang bahwa berdirinya negara Palestina merdeka tahun 2005 sebagaimana yang tertuang dalam *peace road map* dan jauli Presiden AS George W. Bush tidak akan terwujud alias akan mengalami kegagalan.

Pandangan pesimistis dan bahkan skeptis ini bukannya tanpa alasan, melainkan memiliki dasar yang rasional-empirik. Ada sekurang-kurangnya empat alasan yang melandasi prediksi bahwa negara Palestina tidak akan merdeka tahun 2005, sesuai dengan *peace road map*. Pertama, merebaknya serangkaian peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Israel dan Palestina yang sebenarnya bertentangan dan melanggar *peace road map*. Celakanya lagi, tidak adanya pengaturan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar dalam *peace road map* tersebut. Akibatnya, satu aksi kekerasan ditanggapi dengan reaksi yang sama dan begitu sebaliknya.

Kedua, AS sebagai aktor utama dalam proses perdamaian Timur Tengah tidak mau bersikap *fair*. Artinya, AS sampai saat ini masih bersikap mendua atau ambigu. Di

satu sisi, AS berjuang sebagai juru penyelamat konflik Israel-Palestina. Namun di sisi lain, AS seringkali memihak Israel dan menyalahkan Palestina sebagai biang kekerasan dan terorisme. Belum lagi, Bush harus menghadapi kelompok garis keras dalam pemerintahannya yang banyak disebut dengan aliran neokonservatif yang sebenarnya memihak ke Israel. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan pernyataan Bush, "Saya adalah tipe orang yang jika menyatakan sesuatu artinya memang benar-benar yang saya maksudkan" (*Tempo*, 15 Juni 2003, hlm. 151).

Ketiga, meskipun secara formal, prakarsa *peace road map* merupakan produk dari kuartet, yakni PBB, Uni Eropa, Rusia, dan AS, namun ketiga aktor yang disebutkan pertama ini, sampai saat ini, belum menunjukkan perannya dalam menyelesaikan implementasi *peace road map*. Sikap pasif yang ditunjukkan PBB, Uni Eropa dan PBB bisa jadi ada dua kemungkinan penyebabnya. Mereka memang tidak mau karena *peace road map* merupakan prakarsa AS atau mereka memang tidak diikutsertakan alias dikesampingkan oleh AS, baik dalam proses perumusan peta perdamaian maupun dalam implementasinya. Kalaupun pada 22 Juni 2003 nanti diadakan pertemuan kuartet, itu merupakan simbolisasi saja dan sulit untuk menyelesaikan permasalahan.

Keempat, prakarsa perdamaian yang terbungkus dalam *peace road map* tidak lebih dari sekadar angangan yang sulit terwujud. Pandangan skeptis ini bukan tanpa argumentasi. Lihat saja ke belakang, berapa buah perjanjian damai ditandatangani, tapi selalu gagal sehingga naskah perjanjian itu hanya tersimpan tidak berguna di laci lemari. Dimulai dari perjanjian Camp David 1979, Perjanjian Oslo yang melahirkan Deklarasi Prinsip 1993, *Why River I* 1998, *Why River II* 1999, sampai dengan Camp David II 2000, tidak ada satu pun yang menyelesaikan problem konflik Israel-Palestina.

Bahkan, sebelum lahir *peace road map* yang memproyeksikan Palestina merdeka tahun 2005, Deklarasi

Prinsip pernah memuat pasal yang memproyeksikan Palestina merdeka tahun 1999, tapi hasilnya tidak ada. Bagi penulis, dasar dari perdamaian Israel-Palestina adalah penghapusan faksi-faksi garis keras baik di Israel maupun Palestina yang membawa simbolisasi agama sehingga mengarah pada fundamentalisme agama. Dengan demikian, *peace road map* yang saat ini diperjuangkan oleh AS, sebenarnya tidak akan bisa menciptakan negara Palestina merdeka tahun 2005. Ibarat pepatah, "Masih jauh panggang dari api".***

Kedua penulis adalah Dosen Tetap Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unjani Cimahi.

PTN, Jalur Khusus dan Kesalahan Pemerintah

Oleh Dr. SUTEJO ATMOWASITO dan AGUS SUBAGYO, S.I.P., M.Si.

DALAM konstruksi ideologi mana pun, baik sosialis maupun liberal, negara diwajibkan untuk menyediakan pendidikan bagi seluruh rakyatnya. Pendidikan dianggap sebagai alat yang ampuh untuk melestarikan ideologi masing-masing negara.

Dalam ideologi sosialis misalnya, negara secara penuh terlibat dalam proses pendidikan, mulai dari pengelolaan anggaran keuangan, sistem administrasi, sampai dengan penentuan kurikulum akademik. Rakyat memperoleh pendidikan tanpa biaya sepeser pun. Meskipun demikian, dalam sistem sosialis, khususnya yang otoriter dan totaliter, negara kerap menuai kritik karena besarnya intervensi negara ke dalam dunia pendidikan sehingga yang muncul bukan pendidikan yang mencerahkan, tapi indoktrinasi yang membelenggu rakyat.

Sementara itu, dalam ideologi liberal, peranan pemerintah di bidang pendidikan sangat kecil dan terbatas karena penyelenggaraan pendidikan dikelola sepenuhnya oleh sektor swasta. Asumsinya, pendidikan adalah domain privat, bukan domain publik. Pendidikan akan berjalan secara profesional, efektif, dan efisien apabila diserahkan kepada swasta. Posisi pemerintah sebagai fasilitator saja dan akan melakukan intervensi pendidikan jika diperlukan.

Implikasi negatifnya adalah bahwa pendidikan menjadi ajang bisnis. Lingkungan sistem liberal yang sarat akan ruansa kompetisi mendorong terjadinya industrialisasi, komersialisasi, kapitalisasi, dan medonalisasi pendidikan. Konkretnya, hanya anak orang kaya saja yang dapat mengenyam pendidikan, sedangkan orang miskin akan sulit mendapatkan akses pendidikan.

Lalu, jalur pendidikan Indonesia berada dalam sistem ideologi yang mana? Pada masa Orde Lama, orang bersekolah tanpa biaya alias gratis. Pada masa Orde Baru, keadaan berubah. Meskipun negara terus melakukan upaya pemberian subsidi, tapi pendidikan menjadi mahal. Kendati pendidikan mengalami komersialisasi, negara sering turut campur dalam proses pendidikan, seperti indoktrinasi penataran P4, penentuan kurikulum, hingga larangan membaca buku yang dianggap mengancam stabilitas.

Di era Reformasi saat ini, negara memberlakukan kebijakan otonomi kampus yang kemudian menetapkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai Badan Hukum Milik Negara (PP No. 61/Tahun 1999). Berdasarkan PP No. 154/2000, empat PTN telah men-

jadi BHMN, yakni UGM, UI, ITB, dan IPB. Konsekuensi dari otonomi kampus ini adalah penguangan subsidi terhadap PTN sehingga PTN harus mandiri alias mencari dana operasional sendiri tanpa menggantungkan lagi subsidi pemerintah. Salah satu cara dalam mencari dana untuk mengoperasikan PTN itu adalah pembukaan jalur khusus yang saat ini ramai diperbincangkan. Sejumlah PTN besar UGM, UI, ITB, dan IPB berlomba membuka jalur khusus penerimaan mahasiswa baru dengan memasang tarif Rp 15 juta sampai Rp 150 juta (Kompas, 16 Juni 2003).

Keunggulan PTN

Sebelum membahas kontroversi jalur khusus, terlebih dahulu akan diuraikan tentang mengapa setiap orang memilih kuliah di PTN? Mengapa mereka tidak memprioritaskan kuliah di PTS? Apa keistimewaan PTN sehingga diburu setiap orang meskipun saat ini biayanya mahal? Padahal, jika dilihat dari data statistik, jumlah PTN di Indonesia hanya 48 buah dan PTS berjumlah kurang lebih 2.200 buah.

Pertama, adanya anggapan bahwa biaya pendidikan di PTN relatif lebih murah dibandingkan dengan PTS. Pandangan yang tidak sepenuhnya benar ini dilatarbelakangi pengalaman masa lalu di mana PTN masih disubsidi oleh pemerintah. Akan tetapi, saat ini pandangan ini sudah kurang relevan lagi. Kedua, PTN memiliki kualitas SDM dan kuantitas sarana-prasarana yang bagus dan lengkap, seperti tenaga pengajar yang terkenal dan fasilitas laboratorium praktikum yang memadai.

Ketiga, alumni dan *network group* dari PTN sangat kuat, baik di lingkungan pemerintahan maupun di sektor perusahaan, domestik dan asing. Lulusan dari PTN biasanya lebih terasap oleh *stakeholder* masyarakat dan pasar dibanding lulusan perguruan tinggi swasta (PTS). Hal ini disebabkan — salah satunya — oleh jaringan alumninya yang sangat kuat. Dalam tataran realitas, semangat alumni memang sangat menentukan bursa tenaga kerja.

Keempat, sesuatu yang abstrak, tapi berkembang di masyarakat kita adalah bahwa PTN memiliki prestise, *image*, citra, dan gengsi yang tinggi dibanding PTS. Seseorang yang masuk PTN akan memiliki prestise sebagai orang yang berkualitas dan memiliki kadar intelektual tinggi. Anggapan yang tidak sepenuhnya tepat ini sangat kuat mengakar dalam masyarakat. Budaya semacam ini sebenarnya warisan dari pemerintahan kolonial Belanda di mana

dikotomi antara PTS dan PTN masih sangat kuat di Eropa. Di Amerika Serikat, dikotomi PTN dan PTS hampir tidak ada. Bahkan, PTS lebih berkualitas dibanding PTN, Harvard University misalnya.

Kontroversi jalur khusus Ada sedikitnya empat alasan yang menyebabkan rencana jalur khusus yang akan dibuka PT BHMN dipersoalkan dan menjadi wacana publik sampai saat ini. Pertama, pembukaan jalur khusus dianggap sebagai praktik komersialisasi, industrialisasi, dan kapitalisasi pendidikan. Dengan menyerot sejumlah uang tertentu, seseorang dapat masuk PT BHMN terlepas apakah ia berkualitas atau tidak. Artinya, hanya orang kaya saja yang dapat masuk ke PTN bergengsi ini. Kaum miskin yang tidak punya kapital tidak mungkin masuk PTN.

Kedua, diskriminasi mahasiswa. Pembukaan jalur khusus dinilai menciptakan sebuah diskriminasi mahasiswa di mana mahasiswa yang masuk lewat jalur khusus akan mendapatkan layanan fasilitas yang memadai dan perlakuan istimewa dibanding mahasiswa yang berasal dari jalur reguler. Kondisi stratifikasi yang timpang ini sangat rawan menimbulkan konflik sosial antarmahasiswa.

Ketiga, pembukaan jalur khusus yang sebenarnya meniru model manajemen PTS tentunya akan dilihat sebagai pesaing PTS dalam menjaring mahasiswa baru. Seperti, diketahui, operasional pendidikan di PTS sepenuhnya berasal dari dana mahasiswa sehingga PTS selalu memadamkan antara unsur kapital dengan unsur kualitas. Artinya, PTS merajang mahasiswa yang pandai, tetapi kaya. PTN pun saat ini juga ingin meniru model PTS. Kalau jalur khusus jadi dilaksanakan PTN, PTS bisa kehilangan ladang erasnya.

Keempat, meskipun PTN beragumentasi bahwa pembukaan jalur khusus untuk menutupi defisit anggaran pendidikan masing-masing PTN, namun beberapa kalangan menilai bahwa pencarian dana itu sebenarnya bisa diperoleh dari pembukaan program pendidikan diploma, reguler, pascasarjana, dan program internasional.

Jalur khusus sebagai kewajaran Di tengah derasnya arus penolakan jalur khusus yang dilakukan oleh PT BHMN, penulis berpendapat bahwa pembukaan jalur khusus sebagai sebuah kewajaran. Penulis berupaya objektif dalam melihat permasalahan ini dengan cara memahami kondisi keuangan PTN dan logika akademik yang diajukan.

Setidaknya ada empat alasan yang menyebabkan penulis berpandangan bahwa pembukaan jalur khusus

oleh PT BHMN sebagai suatu yang wajar dan realistis. Pertama, kebijakan otonomi kampus yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan PT BHMN yang intinya adalah swastanisasi PTN memiliki konsekuensi dikurangnya subsidi pemerintah terhadap pendidikan tinggi negeri sehingga mendorong PTN untuk menggali dananya secara mandiri demi operasional pendidikannya. PTN kekurangan dana karena subsidi pemerintah dikurangi sehingga alternatif pencarian dana yang cepat adalah dari mahasiswa.

Kedua, dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas, PTN dituntut untuk mencari dana yang besar untuk memenuhi standar pendidikan seperti kualitas dosen, laboratorium praktikum, perpustakaan manual dan digital, alokasi dana riset, dan penyediaan fasilitas internet. Kesemuanya itu tentunya punya korelasi positif dengan biaya pendidikan. Secara praktis, dapat dikatakan bahwa tanpa biaya pendidikan yang besar, mustahil akan tercipta kualitas dan mutu pendidikan yang tinggi.

Ketiga, pembukaan jalur khusus bisa dijadikan sebagai alternatif bagi golongan orang kaya yang ingin menyekolahkan anaknya ke luar negeri untuk masuk ke PTN BHMN. Saat ini banyak anak-anak dari orang kaya di Indonesia yang kuliah di luar negeri hanya karena mereka tidak lolos ujian masuk PTN. Dengan adanya jalur khusus, mereka dapat masuk ke PTN dengan biaya yang lebih murah dibandingkan jika mereka kuliah di luar negeri. Di samping itu, jalur khusus PT BHMN diharapkan juga mampu menyaingi PTN luar negeri yang saat ini banyak masuk ke Indonesia.

Keempat, di era liberalisasi di mana Indonesia masuk dalam pusanranayz, mensyaratkan adanya pengurangan peran negara di segala sektor, termasuk pendidikan. Pada fase liberal ini, manajemen PTN sama dengan PTS. Jalur khusus PT BHMN merupakan pemanasan bagi PTN untuk mandiri sebagaimana PTS sehingga mereka mampu bersaing jika liberalisasi pasar diterapkan secara penuh. Penulis berasumsi bahwa dengan swastanisasi PTN, dikotomi antara PTN dan PTS akan hilang sehingga di masa mendatang, baik PTS maupun PTN bersifat sama. Artinya, sama-sama dikelola secara mandiri dengan menggunakan manajemen swasta.

Siapa yang salah? Yang perlu dipersoalkan saat ini dalam dunia pendidikan kita sebenarnya adalah masalah konsistensi pemerintah dan posisi DPR dalam menjalankan fungsi *budgeting*. Menurut penulis, permasalahan pendidikan nasional, terutama pendidikan tinggi

terletak pada pemerintah dan DPR. Ada beberapa kesalahan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan DPR terkait dengan pendidikan nasional kita.

Pertama, bila kita menengok Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 amandemen keempat, dengan jelas disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Akan tetapi, mengapa anggaran pendidikan saat ini hanya 7 persen dari total APBD? Jika dilihat dari logika buku tersebut sebenarnya pemerintah telah melanggar konstitusi.

Kedua, terkait dengan fungsi *budgeting*, DPR perlu dipertanyakan konsistensinya karena berani menyetujui anggaran pendidikan yang hanya 7 persen dari total APBN. Padahal, DPR lebih kuat dibandingkan pemerintah dalam menetapkan APBN sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tentang hak *begrooting*. Dengan demikian, DPR sebenarnya telah melanggar konstitusi.

Ketiga, kebijakan otonomi pendidikan yang disusul dengan penetapan PT BHMN yang sebenarnya intinya adalah swastanisasi PTN, tidak dilengkapi dengan regulasi pendidikan tinggi yang jelas dan komprehensif. Akibatnya, ketika PT BHMN membuka jalur khusus, terjadi pro dan kontra di mana pemerintah tidak bisa memberikan argumentasi rasional terhadap publik.

Sebenarnya bila dilihat secara mendalam, subsidi pemerintah untuk 48 PTN di Indonesia hanya Rp 4 triliun per tahun. Coba kalau dibandingkan dengan anggaran pendidikan di Universitas Kyoto yang mencapai Rp 12 triliun per tahun. Pantas kiranya kalau Universitas Kyoto dengan anggaran pendidikan yang besar ini, dinilai dan diberikan kategori atau tolok ukur, merupakan universitas dengan peringkat nomor satu se-Asia.

Dengan demikian, apabila terjadi pro dan kontra tentang jalur khusus yang dilakukan oleh PT BHMN sebenarnya kalau ditelusuri secara rasional merupakan kesalahan pemerintah dan DPR. Jalur khusus tidak akan mungkin dilaksanakan oleh PT BHMN kalau subsidi pemerintah tidak dikurangi atau dicabut. Bagi penulis, ini merupakan sebuah pilihan yang terbaik dari pilihan yang terjelek. Marilah kita semua bersaing secara kompetitif, tetapi tetap berpegang teguh pada aturan yang ditetapkan karena ini merupakan kesempatan agar supaya dikotomi PTN dan PTS dihilangkan.

Kedua penulis adalah pengamat pendidikan, dosen tetap Ilmu Hubungan Internasional FISIP, Unjani Cimahi.



Melalui perangkat hukum pemberlakuan asas tunggal tahun 1973, rezim Orde Baru dapat dengan mudah menuduh, menangkap, dan membubarkan individu dan organisasi yang berideologikan selain Pancasila. Seolah-olah Pancasila dianggap oleh rezim Orde Baru sebagai kitab suci mengalahkan kitab suci Alquran dalam Islam.

Wacana Pancasila telah dijadikan sarana bagi penguasa sebagai legitimasi, justifikasi, dan benteng pengaman bagi praktik-praktik kekuasaan otoriter. Relasi kuasa (rezim Orde Baru) telah memproduksi wacana (Pancasila) demi terciptanya tatanan sosial yang bersifat *status quo*.

Ketiga, secara historis, relasi kuasa dan wacana dapat kita telusuri dari masa lalu, khususnya dalam sejarah perjalanan manusia dari zaman kuno sampai zaman modern. Kita semua tentu masih ingat dengan kisah Galilea Galileo yang dihukum pancung oleh sang raja karena penemuan ilmunya yang berbeda dan bertentangan dengan pengetahuan penguasa. Kita semua tentunya juga masih ingat tentang revolusi Copernicus yang menceritakan perjuangan ilmuwan Copernicus dalam meyakinkan penguasa berkait penemuannya bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Teori Copernicus akhirnya bisa mengalahkan teori Ptolemaeo (teori geosentris) yang ditopang penguasa.

Relasi kuasa dan wacana juga dapat dijumpai dalam struktur gerejawi dan kerajaan pada abad pertengahan di Eropa. Pada masa itu, penguasa kerajaan bekerja sama dengan struktur gereja untuk menindas rakyat. Penguasa dan kaum bangsawan kerajaan diberi legitimasi oleh gereja sehingga segala tindakan penguasa dianggap benar oleh rakyat. Praktik-praktik pengakuan dosa dan pengampunan dosa telah disalahgunakan oleh raja dan gereja. Oleh karena itu, wajar jika kemudian muncul gerakan-gerakan pembebasan yang dilakukan oleh Martin Luther King dan Calvin. Dalam sejarah Islam, Jawa pun terdapat relasi kuasa dan wacana. Cerita tentang pembangkangan dan kematian Syekh Siti Jenar yang dianggap melawan struktur kekuasaan Raja Demak

dan Wali Songo merupakan contoh yang tepat bahwa relasi kekuasaan punya konsekuensi politik.

Seks di balik kuasa

Masih teramat sedikit ilmuwan yang menaruh perhatian terhadap masalah kuasa yang dikaitkan dengan seks. Padahal, jika ditinjau lebih mendalam, terdapat muatan yang sarat makna dari proses seksualitas manusia di balik logika kekuasaan. Dalam sejarahnya, seks merupakan monopoli kekuasaan. Seks selalu melekat dalam struktur kekuasaan. Bagi penguasa, seks dijadikan simbol kekuatan dan kekuasaan yang senantiasa dipamerkan kepada rakyatnya berupa wanita-wanita cantik dalam ritus-ritus kerajaan. Berikut ini akan dipaparkan beberapa contoh tentang hegemoni kuasa atas seks.

Pertama, kita semua tentu tahu bahwa raja-raja di masa lampau memiliki istri atau pendamping hidup lebih dari satu. Raja Tumapel, Singosari, Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram merupakan sedikit contoh dari raja-raja Jawa yang memiliki istri lebih dari satu. Biasanya istri-istri itu digolongkan menjadi dua jenis, permaisuri dan selir. Permaisuri biasanya satu, sedangkan selir biasanya lebih dari satu.

Sampai di sini muncul pertanyaan mengapa para penguasa raja selalu memiliki permaisuri dan selir? Selain alasan klasik-biologis, alasan yang lebih mendalam adalah karena para pemilik kuasa ingin menunjukkan besarnya kekuasaan yang dimilikinya. Semakin banyak wanita yang dipersunting, semakin besar kekuasaannya. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit wanita yang dikawini, semakin kecil kekuasaannya. Dalam konteks ini, wanita telah dijadikan alat simbolisasi kekuasaan. Bukankah wanita (selain harta benda) selalu dijadikan upeti bagi suatu kerajaan yang kalah perang? Di sinilah konsepsi harta, takhta, dan wanita berlaku.

Kedua, pengetahuan tentang seksualitas biasanya bersumber pada mekanisme kekuasaan. Contoh akurat tentang hal ini adalah ilmu seks Kamasutra dari India yang bila ditelusuri lebih mendalam sebenarnya merupakan produksi penguasa kerajaan yang ada di India.

Seks adalah monopoli kekuasaan. Rakyat dianggap tabu, latah, dan pamali jika membicarakan masalah seks. Oleh karena itu, pendidikan seks yang saat ini menjadi pro kontra dalam masyarakat merupakan eksekusi dari penelikungan kuasa atas seks. Jika pendidikan seks tidak dimonopoli oleh penguasa, bisa jadi pro kontra pendidikan seks tidak akan terjadi. Di Indonesia, sebenarnya konsepsi seks di balik kuasa juga dapat dilihat dalam relief Candi Borobudur yang hampir mirip dengan Kamasutra. Tetapi sayang, relief itu malah ditutup oleh penguasa sehingga sangat sedikit orang yang tahu tentang betapa kayanya khazanah budaya Indonesia.

Ketiga, di masa Orde Baru, seksualitas perempuan selalu dimaknai dalam konteks strategi pengendalian populasi, disiplin medis, ekonomis, demografi, dan aparatus administrasi. Melalui mekanisme BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) dengan program KB-nya, penguasa mulai memasuki wilayah privat masyarakat dan membuat sebuah jeratan sosial yang menuntun pola pikir, perbincangan, dan perilaku yang seragam terhadap seks. Kegiatan seks dan praktik-praktik seksual keluarga telah diintervensi oleh penguasa dengan berbagai program KB.

Melihat uraian relasi dan mekanisme kuasa, wacana, dan seks di atas dapat dikatakan bahwa kuasa mampu menghasilkan wacana dan seksualitas yang bisa menciptakan legitimasi dan simbol kekuatan dan kekuasaan yang maha dahsyat. Yang dikhawatirkan apabila terjadi konspirasi antara kuasa, wacana, dan seks secara terselubung. Artinya, wacana dan seks bersekutu bahu-membahu mendukung kuasa mengeksploitasi rakyat yang sebenarnya telah tuna kuasa. Dengan kata lain, konspirasi kuasa, wacana, dan seks hanya akan melahirkan sistem politik dan praktik-praktik sosial yang otoriter dan diktator. ***

Penulis, dosen tetap Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Bandung dan Alumnus S-II Ilmu Politik UGM Yogyakarta.



Pikiran Rakyat

Oleh AGUS SUBAGYO, S.I.P., M.Si.

Konspirasi Antara Kuasa, Wacana, dan Seks

MICHEL Paul Foucault (1926-1984), seorang filosof Prancis terkemuka abad ke-20 memiliki perhatian secara khusus melalui karyanya tentang relasi dan mekanisme kekuasaan, pengetahuan, dan seksualitas. Ketajaman analisisnya dapat dilihat dari kemampuannya memahami dan menguraikan persentuhan antara kuasa, wacana (pengetahuan) dan seks. Sebuah temuan pemikiran yang hampir semua orang belum pernah memikirkannya, apalagi mengaitkan ketiga konsep tersebut dalam struktur yang tidak terpisahkan.

Menuai pemikiran Foucault, konsepsi kuasa sangat erat berhubungan dengan pengetahuan. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan sebaliknya tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Artinya, pengetahuan bisa muncul, berkembang, dan dianut oleh seluruh komunitas intelektual karena ditopang dan kemudian digigitisasi oleh struktur kekuasaan. Pengetahuan memerlukan kekuasaan untuk mendapatkan pengakuan kebenaran. Sedangkan kekuasaan memerlukan pengetahuan untuk melanggengkan hegemoninya terhadap yang dikuasainya. Relasi kuasa dan pengetahuan bersifat mutualisme. Tanpa perlindungan kuasa, pengetahuan tidak dapat didefinisikan, tanpa bentuk dan jauh dari kebenaran.

Selain konsepsi kuasa berhubungan erat dengan pengetahuan, kuasa juga berkorelasi positif dengan seksualitas. Foucault ingin menunjukkan bahwa seks bukan sesuatu yang bersifat alamiah, namun seks merupakan sebuah fakta sejarah yang sarat makna dan kuasa. Seksualitas menunjukkan sebuah simbol, kekuatan dan kekuasaan sehingga banyak kaum bangsawan di masa lampau mencari istri atau pendamping hidup lebih dari satu. Tujuan utama kepemilikan wanita lebih dari satu ini bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi lebih jauh dari itu, untuk membuktikan kepada rakyat bahwa mereka merupakan pemilik kekuasaan yang kuat dengan simbolisasi wanita yang ada di sekelilingnya.

Relasi kuasa dan wacana

Konsepsi kuasa dan wacana tidak berdiri sendiri. Wacana bukan sesuatu yang ada tanpa hubungan kekuasaan. Relasi wacana adalah relasi kuasa. Kuasa akan selalu memproduksi wacana. Konstruksi wacana akan senantiasa dipengaruhi dan dikendalikan oleh kuasa demi terciptanya opini publik yang bersifat *status quo*. Terdapat beberapa contoh empiris yang dapat diambil untuk menunjukkan relasi kuasa dan wacana.

Pertama, wacana pembangunan (developmentalism) yang mendominasi negara-negara dunia ketiga pasca Perang Dunia II. Sebagai produk dari barat, wacana pembangunan diujicobakan kepada masyarakat dunia ketiga dengan berbagai pola dan interaksinya. Wacana pembangunan dimitoskan oleh Barat sebagai obat mujarab dalam mengobati segala permasalahan yang dihadapi negara dunia ketiga sehingga negara dunia ketiga harus menerima wacana pembangunan dimasukkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara dunia ketiga tidak sadar bahwa sebenarnya wacana pembangunan bukanlah sebuah pengetahuan yang netral. Wacana pembangunan adalah pengetahuan yang sarat nilai (*value loaded*). Artinya, wacana pembangunan sangat terkait dengan ideologi liberalisme, kapitalisme, dan imperialisme sehingga mengandung muatan menguasai, mengendalikan, dan menaklukkan. Dengan demikian, relasi wacana (diskursus pembangunan) merupakan suatu prosedur dan seperangkat praktik yang dikendalikan oleh pranata-pranata barat dalam formasi kuasa-wacana dari tata sosial modern.

Kedua, wacana Pancasila yang diagung-agungkan oleh rezim Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, ideologi Pancasila telah dijadikan alat bagi rezim berkuasa untuk melegitimasi setiap kebijakannya dalam proses-proses politik. Rezim Orde Baru selalu memakai ideologi Pancasila untuk membentengi kekuasaannya dari kekuatan-kekuatan oposisi yang menentanginya.